



SIAPKAN 20.000
RUMAH BAGI
PAHLAWAN DEvisa
**PEMILU DAN PILKADA
SERENTAK**
**PENYELENGGARA
KEWALAHAN**
ORMAS DALAM
BIDIKAN
**SEKOLAH RAKYAT
JANGAN CACAT**
MENGUPAYAKAN
HARMONI DI KORIDOR
DEMOKRASI
**PASAR KERJA
NASIONAL TIDAK
BAIK BAIK SAJA**
PROGRAM BARAK
MILITER UNTUK SISWA
BERMASALAH: SOLUSI
PENDIDIKAN ATAU
BENTUK MILITERISASI
ANAK?

GIBRAN DIGOYANG PURNAWIRAWAN

45.000 WARGA MUBA
DILINDUNGI BPJS
KETENAGAKERJAAN
**SUMSEL SUKSES
TINGKATKAN PRODUKSI
PANGAN HINGGA
5 BESAR NASIONAL**
PROGRAM GEBRAK
UNTUK 3 JUTA
RUMAH
**MENGUJI NIAT SERIUS
PRABOWO BAHAS RUU
PERAMPASAN ASET**



Rp75.000,-



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INOVASI UNTUK NEGERI



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : redaksi@infoindonesia.id

LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📄
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📄

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH NO. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
MEI
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Mutasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap mengundang aneka tafsir. Apa sebenarnya yang terjadi?



22

INFO SUMSEL

Untuk melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru telah menyiapkan 7 (tujuh) program prioritas yang akan dijalkannya bersama Wakil Gubernur H Cik Ujang.



32

INFO DAERAH

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali mencatatkan langkah progresif dalam dunia ketenagakerjaan.



68

INFO NASIONAL

Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat direncanakan secara matang dan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.



56

INFO EKONOMI

Tingkat pengangguran diperkirakan naik mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sejak 2023 hingga awal 2025 juga cenderung meningkat dibandingkan masa sebelum pandemi, menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang.



64

INFO ISTANA

Setelah enam bulan menjabat dan berulang kali menyampaikan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.



87

INFO KHUSUS

Pernah menjadi sorotan dalam konteks ideologi dan politik, kini organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi isu ekonomi politik di bidang investasi dan bisnis.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

48 INFO WISATA

52 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

72

INFO NASIONAL

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim stok beras nasional saat ini mencapai 3.517.294 ton, tertinggi sejak 57 tahun terakhir, dan sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri tanpa adanya impor per awal Mei 2025.



URGENT

Ketidakpastian kerap menyertai kita. Karena itulah upaya mengurangi ketidakpastian adalah naluri manusia. Baik dalam konteks pribadi, keluarga, lingkungan terdekat, bahkan negara, hingga tingkatan global.

Begitulah ketidakpastian global tampak kian meningkat sejak awal April 2025. Momentumnya adalah pengumuman penerapan kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025. Bersamaan dengan itu, muncul ketidakpastian baru: apakah kita memahami pengumuman Presiden Trump secara utuh?

Nah, Kementerian Perdagangan sudah menjelaskan, ada tiga bentuk penerapan tarif impor yang dikenakan oleh AS. Pertama New Baseline Tariff, tarif dasar baru, Tarif ini naik 10 persen dari sebelumnya. Sedangkan tarif dasar lama beragam nilainya sebagaimana produk impor ke AS. Toh tarif dasar baru hanya berlaku untuk dua negara tetangga AS: Kanada dan Meksiko.

Kedua, tarif timbal balik (reciprocal tariffs) yang mencakup semua negara mitra dagang AS. Indonesia bukan perkecualian. Produk ekspor kita yang masuk AS dikenai tarif masuk sebesar 32 persen dari harganya. Toh, penerapannya ditangguhkan selama 90 hari sejak jadwal penerapan semula, 5 April 2025.

Ketiga, tarif sektoral. Pada jenis tarif ini, AS menerapkan tambahan sebesar 25 persen dari tarif semula yang sudah berlaku untuk produk impor baja, aluminium, otomotif dan komponen otomotif. Untuk tarif sektoral, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengemukakan, jika tarif sektoral sudah dikenakan terhadap satu jenis produk, maka untuk barang yang sama tak akan kena tarif pertama (new baseline) dan kedua (reciprocal) tadi.

Bagaimana dengan kabar tarif impor hingga 47 persen sebagaimana yang beredar di berbagai platform media arus utama maupun media sosial, malah dengan sindiran negosiasi minta turun tarif namun ternyata kena lebih tinggi? Pada titik ini kita dapat memastikan banyak yang belum memahami secara utuh kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Trump.

Soal 47 persen itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menjelaskannya pada Jumat, 18 April 2025. Intinya, AS bersikukuh menerapkan tarif impor tambahan 10 persen untuk tekstil dan produk tekstil (TPT, atau tekstil dan garment) yang sebelumnya sudah dikenai tarif impor oleh AS dengan kisaran 10-37 persen. Jadi, angka 47 persen itu berasal dari produk yang sebelumnya kena tarif 37 persen plus tambahan tarif baru 10 persen hingga total 47 persen. Toh tidak semua TPT atau produk ekspor lainnya akan kena tarif 47 persen. Menko Airlangga sudah menyebut kisarannya akan menjadi 20 hingga 47 persen.

Kabar baiknya, angka tarif impor ini masih bisa berubah karena negosiasi tetap terbuka antara Indonesia dan AS. Persoalan mendasarnya, bagaimana kondisi industri TPT Indonesia saat ini dan selanjutnya, juga keseluruhan industri nasional kita?

Pernah mengemuka Indonesia terancam deindustrialisasi. Namun, peluang reindustrialisasi tetap terbuka. Yang mendesak (urgent) adalah upaya kita mengurangi ketidakpastian, lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



DARI MUTASI KE MUTASI

Mutasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap mengundang aneka tafsir. Apa sebenarnya yang terjadi?

Bermula dari mutasi. Kemudian terjadi revisi. Karena terjadi revisi, yang niscaya tadi menjadi nisbi, relatif, berkaitan dengan banyak hal. Yang terakhir ini, relatif, kait-mengait saling berhubungan. Malah mengundang banyak tafsir.

Begitulah, maka mutasi di organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29

si dengan surat keputusan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Total ada tujuh jabatan perwira TNI dalam revisi mutasi itu.

"Jadi memang telah dikeluarkan surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554A/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep/554/IV/2025 yang dikeluarkan 29 April. Banyak pertanyaan tentang mengenai mutasi Letjen TNI Kunto," kata Brigjen TNI Kristomei

masih dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka saat ini. Sedangkan tujuh pati yang batal dimutasi berdasarkan KEP 554A/IV/2025 adalah sebagai berikut:

1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, semula dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD.
2. Laksda TNI Hersan, semula dijadwalkan menggantikan posisi Kunto sebagai Pangkogabwilhan I dari jabatan sebelumnya sebagai Pang-



April 2025 mengundang banyak tafsir. Terlebih lagi, Keputusan Panglima TNI ini direvisi pada keesokan harinya.

Pada SK No 554 tadi, mutasi meliputi 237 perwira tinggi TNI. "Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu, 30 April 2025.

Namun ternyata mutasi melalui SK tertanggal 29 April itu direvisi pada Rabu, 30 April 2025. TNI merevisi muta-

Sianturi dalam jumpa pers virtual, Jumat malam, 2 Mei 2025.

Sebagaimana disebut langsung oleh Kapuspen, perubahan keputusan nomor 554 menjadi 554A mencakup tujuh perwira tinggi. Menurut dia, keputusan ini murni merupakan penyesuaian internal karena adanya rangkaian jabatan yang belum bisa diisi, dan bukan karena polemik atau tekanan dari pihak luar.

"Dalam satu rangkaian mutasi itu, jika satu tidak bisa bergeser maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat," kata Kristomei

la menegaskan, pertimbangan utama pembatalan mutasi adalah karena beberapa pati dalam daftar tersebut

koarmada III.

3. Laksda TNI H. Krisno Utomo, semula Pangkolinlamil, direncanakan menjadi Pangkoarmada III.
4. Laksda TNI Rudhi Aviantara, semula Kas Kogabwilhan II, dijadwalkan menjadi Pangkolinlamil.
5. Laksma TNI Pundhi Rusbandi, semula Waaskomlek KSAL, direncanakan menjadi Kas Kogabwilhan II.
6. Laksma TNI Benny Febri, semula Kadiskomlekal, akan menjadi Waaskomlek KSAL.
7. Laksma TNI Maulana, semula Staf Khusus KSAL, direncanakan mengisi posisi Kadiskomlekal.

Nah, dari daftar tujuh pati itu, tafsir bermuatan politik dengan mudah melekat pada nomor urut 1, Letjen TNI

Kunto Arief Wibowo. Alasan utamanya, Kunto adalah putra Jenderal Purnawirawan TNI Try Sutrisno yang juga pernah menjabat Wakil Presiden RI pada 1993-1998.

Pak Try, sapaan akrabnya, ternyata ikut menandatangani dokumen deklarasi delapan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satunya, usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum ini mengklaim mewakili ratusan purnawirawan, mulai dari jenderal bintang empat hingga kolonel.

Selain Pak Try bergabung pula sejumlah figur berpengaruh seperti mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hingga mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Isi delapan poin usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menyerukan langkah penyelamatan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Para Purnawirawan juga menyinggung soal program strategis nasional PIK 2 dan Rempang, termasuk masalah tenaga kerja asing.

Pada poin keenam, mereka meminta dilakukan reshuffle bagi menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas pada pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Sedangkan usulan pergantian Wakil Presiden merupakan pada poin terakhir, kedelapan, dalam pernyataan tadi.

Menurut mereka, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-undang Kekuasaan Hakim.

Selain mengusulkan Gibran diganti, mereka juga mendesak Polri agar berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikut isi dokumen tersebut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.



• INFO UTAMA

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing

Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Ke-

tidak terikat dengan TNI aktif. Dia menekankan bahwa revisi mutasi TNI, termasuk anak Wakil Presiden RI periode 1993-1998 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo, adalah karena kebutuhan organisasi. "Tidak terkait dengan... beliau purnawirawan TNI tidak terkait dengan TNI aktif saat ini, kegiatan itu juga tidak mengakibatkan 'Oh, gara-gara itu Pak Kunto bergeser', nggak. Ini memang karena ada perencanaan dari organisasi personalia," ungkapnya.

Kapuspen Kristomei menjelaskan mutasi prajurit, termasuk penyesuaian rencana mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). "Setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI," kata dia.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, sambung Kristomei, secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dengan penyesuaian tersebut, Letjen Kunto, yang merupakan putra wakil presiden keenam RI Try Sutrisno, tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Menurut Kapuspen, perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, kata dia, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI dalam rangkaian rotasi dimaksud. "Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut," ujarnya.

Kapuspen pun menegaskan bahwa kebijakan terbaru Panglima TNI itu tidak terkait dengan adanya isu-isu lain yang saat ini berkembang, termasuk terkait dengan sikap Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang merupakan ayah



Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan pertertiban pengelolaan pertambahan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI

hakiman.

Alhasil, muncul pula tafsir bahwa mutasi ini kait-mengait dengan deklarasi Forum Purnawirawan TNI. Toh Kapuspen TNI membantah mutasi ini karena ada tuntutan forum purnawirawan terkait usulan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi sudah saya jelaskan bahwa mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi, ini sesuai dengan proporsionalitas dan sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata Kristomei.

la mengatakan purnawirawan TNI

dari Letjen Kunto. "Tidak ada kaitan dengan hal lain," tegas Kristomei.

Sedangkan dalam pandangan lembaga Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), keputusan meralat rotasi sejumlah Pati TNI memberikan dampak negatif bagi institusi. Alasannya, kebijakan yang berubah-ubah akan mempengaruhi perwira dan prajurit.

"Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks reformasi militer dan profesio-

mengenai mutasi Kunto kala itu adalah gegara artikelnya yang berjudul "Etika Menuju 2024" itu dimuat di laman web berita kompas.com pada April 2023. lalu, Dalam tulisannya, Kunto menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Ada kekhawatiran di diri Kunto terjadi provokasi dan perpecahan jelang Pemilu 2024.

"Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif, sekaligus sarat muatan provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi

di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam mutasi TNI di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini Mayjen Kunto beralih jabatan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, jabatan yang diemban jenderal bintang tiga. Sebelumnya, Kunto adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas.

Pengangkatan Kunto sebagai Pangkogabwilhan I ini tidak lazim sebab baru kali ini posisi Pangkogabwilhan I dijabat dari Angkatan Darat. Biasanya



alisme TNI, hal ini merupakan kemunduran yang perlu mendapat perhatian serius," kata Co-Founder ISDS, Dwi Sasongko, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Mei 2025.

Meski begitu, layak pula dicermati, bukan sekali ini saja Letjen Kunto mengalami proses mutasi yang memunculkan spekulasi. Saat menjabat Pangdam III Siliwangi dengan pangkat Mayor Jenderal di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, putra Pak Try ini pernah dimutasi menjadi Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Wadankodiklatad) yang dinilai tidak memiliki prospek karir lebih tinggi.

Spekulasi atau tafsir yang muncul

ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai," tulis Kunto.

Dalam konteks Pemilu 2024, kata dia, yang dibutuhkan adalah melaksanakan Pancasila dalam politik sekarang ini, karena sedang tidak baik-baik saja. "Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi," tutup Kunto.

Terlepas dari isi artikel itu, toh karir militer Kunto kembali bersinar setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi 300 perwira tinggi melalui surat Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan

dari masa ke masa, Pangkogabwilhan I diisi perwira tinggi Angkatan Laut.

Analisis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menilai mutasi Kunto ini adalah bentuk promosi setelah sempat dibuang di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sejumlah perwira tinggi yang semula jadi rising star kemudian dimasukkan 'keranjang sampah' sama Jokowi, kemudian naik lagi seperti Kunto Arief Wibowo, putra Pak Try Sutrisno," ujar Selamat Ginting dikutip dari Youtube Hersubeno Point.

Jadi, simpulan ringkasnya, dari rangkaian mutasi demi mutasi yang diputuskan Panglima TNI, sangat perlu memahami bahwa Panglima Tertinggi adalah Presiden RI. • Editor: GE

MENGUPAYAKAN HARMONI DI KORIDOR DEMOKRASI

Politik memang kerap menjadi pentas drama tempat aktornya memainkan peran. Hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal pemakzulan putra sulungnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak lagi aktor politik lain mengemukakan pandangan soal pemakzulan itu beserta jalin kelindannya.

Mulai saja dari Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI purnawirawan TB Hasanuddin. Terkait dengan mutasi perwira tinggi TNI yang direvisi sehari kemudian, TB Hasanuddin berpendapat tindakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam proses mutasi tersebut mengarah pada bentuk pembangkangan terhadap prosedur resmi militer.

Berbicara dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Senin, 5 Mei 2025, TB Hasanuddin mengemukakan proses mutasi perwira tinggi TNI harus melalui mekanisme panjang di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Namun, mutasi Letjen Kunto dinilai dilaksanakan secara tidak lazim.

"Namanya mutasi pada level atas

itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda (Perwira Bantu Muda), dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI," ujar TB Hasanuddin

Ia menjelaskan, putusan mutasi itu melalui proses panjang. Namun, kata TB Hasanuddin, tampak ada yang aneh dalam proses mutasi kali ini yang menyangkut Letjen Kunto. "Berarti ini dalam keadaan, mohon maaf, pembangkangan menurut hemat saya. Kok ujug-ujug langsung ditan-datangani oleh Panglima TNI dan diumumkan, ini aneh," sambungnya.

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebelumnya dimutasi dari posisi Panglima Kogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat



(KSAD) melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Namun, hanya sehari berselang, mutasi tersebut dibatalkan bersama enam lainnya melalui SK Nomor Kep/554.a/IV/2025.

TB Hasanuddin juga menyebut adanya dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam keputusan tersebut. Ia menilai tindakan Panglima TNI mengindikasikan adanya pengaruh politik di luar kewenangannya.

"Konon itu yang menjadi penggan-
tunya (Letjen Kunto) adalah mantan
ajudan Presiden ke-7. Berarti pangli-
ma TNI ini atas arahan dan mungkin
quote and quote atas perintah Pres-
iden ke-7, ini yang tidak bener," ujar
TB Hasanuddin.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Dengan begitu, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini.

"Panglima TNI memutasikan yang bukan KASAD, KASAL, KASAU boleh, memutasikan Jenderal Kunto? boleh. Tetapi masalahnya itu sudah sesuai perintah dari Presiden (Prabowo)? Nah di sini (memutasi Letjen Kunto) atas perintah siapa?" sambung TB Hasanuddin.

Terlebih lagi, muncul dugaan mu-
tasi Letjen TNI Kunto terkait dengan
pernyataan sikap purnawirawan TNI
yang ikut ditandatangani oleh Jen-
dral TNI Try Sutrisno yang juga ayah
kandung Kunto. Namun, Jenderal TNI
(Purn) (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan
yang kini menjabat Ketua Dewan
Ekonomi Nasional (DEN) mem-
bantah anggapan yang menye-
but mutasi perwira tinggi TNI

terbaru bersi- fat
politis,

apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan sikap Try Sutrisno terhadap usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak ada, saya tahu itu," kata Luhut menjawab pertanyaan warta-
wan di Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin, 5 Mei 2025.

Luhut mengatakan tak ada kaitan mutasi dengan delapan tuntutan yang diajukan forum purnawirawan. Menurut dia, lebih baik semua ele-
men bangsa menjaga kekompakan di
tengah situasi dunia yang tidak pasti.
"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak,
gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia
begini," ujarnya.

Mantan Menko Marves ini men-
ganggap pihak yang ribut-ribut itu
kampungan. Luhut mengatakan
semua pihak harus berfokus men-
dukung pemerintah ke depan.

"Ribut-ribut begitu
kan kampungan
itu. Kita harus
fokus gimana
mendukung
pemerintahan
dengan baik,"
ujarnya.

Sebelumn-
ya, Mantan
Kepala Badan
Intelijen Negara
(BIN), Jenderal
(Purn) Abdullah
Mahmud Hendro-
priyono mengemu-
kakan sikap Forum

Purnawirawan TNI AD bukan berasal dari seluruh purnawirawan TNI AD. Berbicara di kanal Youtube pribadi Prof Rhenald Kasali pada Minggu, 4 Mei 2025, Hendro membahas pula soal desakan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.

"Padahal itu (desakan pemakzulan Wapres Gibran) kan diluruskan oleh PPAU (Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara) duluan ya tang-
gal 21 (April). Saya baca Persatuan
Purnawirawan Angkatan Darat dan
Angkatan Laut tanggal 28," ungkap
Hendro.

Sebelumnya Hendro juga menge-
emukakan gagasan purnawirawan
TNI soal pemakzulan Gibran sudah
terukur. "Tidak akan keluar dalam bi-
dang ideologi, Pancasila, UUD 1945,"
katanya Sabtu, 26 April 2025.

Ia juga mengemukakan tuntutan
para purnawirawan TNI itu seba-
gai aspirasi. menurut dia, di
negara demokrasi penyam-
paian aspirasi sah-sah saja.
"Tapi yang penting, kalau
harapan saya, selalu kita
menjaga stabilitas na-
sional," ujar Hendro

Sedangkan Pelak-
sana tugas (Plt) Ket-
ua Umum Persatuan
Purnawirawan Angka-
tan Darat (PPAD), Mayjen
(Purn) Komaruddin Siman-
juntak angkat bicara
terkait desakan penco-
potan Gibran dari
kursi wapres.
Men-



urut mantan Panglima Kodam IX/Udayana ini, desakan menggantikan Wapres Gibran bukan keputusan bulat seluruh pensiunan TNI AD.

"Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut didasari semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa

Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyampaikan penjelasan bahwa pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada sore hari tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara halalbihalal para Purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo Subian-



pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," ungkap Komaruddin Simanjuntak.

Selanjutnya, pada Rabu, 30 April 2025, rombongan PPAD Komaruddin Simanjuntak menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Komaruddin Simanjuntak mengatakan pertemuan itu hanya membahas halalbihalal. "Persatuan

to," kata Komaruddin dalam keterangannya, Minggu, 4 Mei 2025.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh panitia acara halalbihalal, yaitu Ketua Panitia Letjen (Purn) Dodik Widjanarko, Wakil Ketua dan Mantan Kasad Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo. Komaruddin menjelaskan kegiatan halalbihalal ini juga sudah sering dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri. Dia menegaskan tak ada perbincangan lain dari itu.

"Lain dari halalbihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana. Intinya bahwa semua mengajak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati dan menjaga netralitas," sambung Komaruddin.

Toh wacana pemakzulan Wapres Gibran mengundang tanggapan langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi yang juga ayah Gibran upaya pemakzulan Wapres harus melewati proses panjang.

Jokowi menyebut pemakzulan Wapres harus mengikuti mekanisme konstitusional yang jelas, dimulai dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan berakhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, kata Jokowi MPR yang akan memutuskan apakah pemakzulan dapat diteruskan atau tidak.

"MPR harus lewat MK. Kembali lagi ke MPR saya kira. Proses konstitusinya seperti itu," kata Jokowi di kediamannya, kawasan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 5 Mei 2025.

Namun, sebagai gagasan dan sikap, yang disampaikan oleh purnawirawan TNI itu, menurut Jokowi, merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi. "Iya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya. Boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita," ujar Presiden ke-7 itu.

Toh dalam pandangan Jokowi, masyarakat sudah mengetahui bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu 2024. "Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum," ungkapnya.

Mengenai majunya Gibran yang dinilai menyalahi konstitusi, Jokowi menegaskan bahwa semua sudah melalui proses. "Ya, itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali," ungkapnya.

Sedangkan dalam pandangan pengamat politik Adi Prayitno, pemer-

intah Prabowo-Gibran telah menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan publik. "Istana (memang) harus menampilkan wajah negarawan. Ini bukan negara fasis yang kalau ada isu dari masyarakat langsung ditolak," ujar Adi melalui tayangan YouTube, Minggu, 4 Mei 2025.

Analisis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut, negara demokratis seperti Indonesia memang harus memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan pandangan. Sejauh ini, sambungnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan ruang komunikasi itu ada dan terbuka lebar.

dang Politik dan Keamanan, Wiranto. Ia mengatakan Presiden Prabowo menghormati dan memahami usulan-usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Terlebih, Prabowo juga mantan prajurit TNI yang satu almamater dan perjuangan dengan para purnawirawan.

"Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa sapta marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu," jelas Wiranto usai menghadap Prabowo di

ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu," ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra yang terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat. "Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa," ungkap Wiranto.

Selain itu, Prabowo meminta



Soal desakan pergantian Wakil Presiden, kata Adi, adalah murni sebagai bentuk aspirasi publik yang sah dalam sistem demokrasi. "Ini omongon masyarakat yang disebut political opportunity. Itu adalah kesempatan politik yang dimanfaatkan oleh setiap orang, setiap individu, setiap masyarakat untuk ngomong apa pun, kecuali negara kita tidak demokratis," ujarnya.

Nah, salah satu sikap Istana yang menanggapi langsung soal usulan pemakzulan Wapres Gibran datang dari Penasihat Khusus Presiden Bi-

Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025

Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukanlah masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu. "Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu

masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keharmonisan Indonesia.

"Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa," tandas Wiranto. ● Editor: GE

KEGADUHAN BUKAN PILIHAN

Semakin kelihatan, penyelenggaraan negara oleh Presiden Prabowo Subianto lebih memilih upaya mencapai konsensus di bidang politik. Termasuk dalam menanggapi potensi kegaduhan masal soal mutasi perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dan revisinya; juga gagasan dan aspirasi pemakzulan Wakil Presiden.

Tradisi Halalbihalal khas Indonesia kerap menjadi sarana menjajaki upaya saling pengertian, di samping kesempatan untuk saling memaafkan. Keunikannya, tradisi silaturahmi yang beriringan dengan Hari Raya Idul Fitri itu dapat meliputi hubungan antaranggota keluarga, lingkungan terdekat seperti tetangga dan tempat bekerja, bahkan untuk ranah politik nasional sekalipun.

Memang belum tentu halalbihalal dapat menyelesaikan masalah rumit. Namun, pertemuan silaturahmi terbuka itu akan lebih memudahkan dalam memfasilitasi upaya mencapai resolusi, kesamaan pendapat, bahkan untuk mencegah konflik semakin tajam.

Maka mudah memahami bahwa Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya lebih memilih hadir di acara halalbihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-POLRI Tahun 1446 H/2025 M di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025. Terlebih menjelang acara ini, berlangsung polemik terutama

menyangkut mutasi TNI dan revisinya, serta wacana pemakzulan Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saling jalin berkelindan.

Gesture (bahasa tubuh) Presiden saat menghadiri acara halalbihalal itu dapat menjadi pembahasan para ahli. Juga isi pidato sambutannya.

Dalam acara ini Presiden Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, dan Sultan Hamengkubuwono X sesaat setelah tiba di Balai Kartini pada sekitar pukul 16:27 WIB. Tampak mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Sebelum menuju meja yang berada di barisan terdepan, Presiden Prabowo menyempatkan berkeliling untuk menyalami satu persatu para purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di jajaran meja depan. Turut hadir dalam kegiatan itu, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Ang-



gota Komisi I DPR TB Hasanuddin, dan Titiek Soeharto.

Selain itu, juga tampak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AM Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Perwakilan DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. Menag Nasaruddin membuka acara dengan tausiyah dan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengisahkan tentang sejarah adanya halal bihalal.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyebut agenda itu digelar dalam rangkaian mempererat tali silaturahmi Presiden dengan para purnawirawan. "Kehadiran beliau di acara ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan," katanya.

Di acara halal bihalal tadi, Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada para purnawirawan dan seluruh undangan yang hadir. Ia pun memanjatkan doa memohon keselamatan dan petunjuk bagi bangsa dalam

menjalani tahun mendatang. "Semoga kita menghadapi tahun yang akan datang, kita diberi perlindungan, diberi petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dalam keadaan yang baik, dan selalu di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Swt," ucap Presiden.

Namun, poin penting yang berkaitan dengan wacana mutasi TNI maupun gagasan pemakzulan Wapres adalah pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya membangun bangsa secara bertahap dan kolektif. Aspek penting lainnya yakni dengan menghargai kontribusi para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional.

"Enggak mungkin kita membangun dalam lima tahun, dalam sepuluh tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun, tapi apa yang dilahirkan oleh Presiden-Presiden kita, dan tidak hanya Presiden. Membangun bangsa itu tidak hanya satu, dua orang," ungkap Presiden Prabowo.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan ini. Di samping itu, Prabowo mendorong para

purnawirawan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing.

"Kita sebagai purnawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan," ucap Presiden.

Presiden juga mengemukakan kaum elite bangsa yang pura-pura tak memahami arti penting dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kembali pada jati diri bangsa demi menjaga keutuhan nasional di tengah hambatan yang terjadi berulang setiap kali Indonesia hendak bergerak maju. "Tiap kali kita mau take off, dihajar kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama," kata Prabowo.

Presiden pun menyinggung pola pecah belah yang sudah berlangsung sejak era kolonial. Ia mengingatkan bahwa strategi *divide et impera* masih



terus memecah belah bangsa hingga kini.

Menurut Presiden, ada kelengahan serius di kalangan elite yang kerap melupakan rancang bangun perjuangan pendiri bangsa. "Banyak di antara elite yang tidak memahami, tidak mau memahami, atau pura-pura tidak melihat arti dari pasal-pasal penting dalam UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa warisan Angkatan '45 berupa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman yang harus terus dijaga. Prabowo lantas mencontohkan bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap aspek kehidupan militer

hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan telah dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat," ujarnya.

Presiden Prabowo menyebut bahwa pengalaman langsung digembleng oleh para tokoh Angkatan 45 adalah sebuah keberuntungan yang mendalam baginya dan rekan-rekan seangkatannya. Menurut Presiden, Angkatan 45 tidak hanya terdiri atas prajurit bersenjata, tetapi juga kelompok-kelompok non-militer yang turut memperjuangkan kemerdekaan RI.

"Mereka adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Dengan patriotisme yang berko-

"Generasi ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah, tidak mau jadi bangsa kuli atau bangsa yang lemah. Mereka berani mengambil sikap di tengah keterbatasan, tanpa anggaran, tanpa organisasi yang kuat, bahkan dengan senjata yang direbut dari penjajah," katanya.

Di bagian lain sambutannya, Presiden Prabowo sempat membahas TNI yang beralih ke ranah politik demokratik. "Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi direkrut yang masuk adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar dari



melalui Sapta Marga, Sumpah Prajurit, hingga doktrin lainnya yang selalu merujuk pada konstitusi.

Presiden pun menyampaikan penghormatan khusus kepada pejuang generasi muda Angkatan 1945 dalam acara Halalbihalal kali ini. Dalam pidatonya, Kepala Negara menekankan pentingnya nilai-nilai keprajuritan dan semangat kepemimpinan muda yang diwariskan oleh generasi pejuang di era merebut kemerdekaan Indonesia.

"Kita sebagai purnawirawan diajarkan sejak muda sebagai prajurit bahwa

bar dan kepercayaan diri luar biasa, berani menghadapi kekuatan besar dunia saat itu," katanya.

Presiden juga menyoroti keberanian para pemuda Angkatan 45 yang tampil di garis depan pada usia sangat muda. Ia menyebut sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjadi pemimpin tertinggi TNI pada usia 29 tahun serta Ignatius Slamet Riyadi yang memimpin brigade pada usia 22 tahun sebagai contoh nyata kepemimpinan muda yang tangguh dan visioner menghadapi penjajah.

TNI, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa masih kuat," kata Prabowo.

Selanjutnya Prabowo mengemukakan tak sedikit senior TNI yang mengabdikan dengan terjun ke politik dan mendirikan partai, termasuk dirinya. Dia menegaskan hendak berkuasa dengan mandat dari rakyat. "Karena itu senior-senior banyak yang terjun ke politik, Pak SBY bikin partai, Wiranto bikin partai, saya bikin partai. Karena apa? Karena kita ingin berbakti, karena itu kita mau berkuasa meminta mandat

dari rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan TNI pun tidak mau berkuasa dengan senjata. "Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum karena ada krisis. Janganlah kita mau utak-atik sejarah. Kita patriot, ksatria. Katakanlah yang bener itu bener, yang salah itu salah," ujar dia.

Berkaitan dengan itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengemukakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan. Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

"Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau," kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Gubernur Lemhannas pun mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

Selain itu, Lemhannas menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut. Ace Hasan menegaskan, penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

"Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final. Itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat," ujarnya.

Jadi, sambung Ace, seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

Selain itu, sambungnya, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) RI. Dengan begitu, tambah Ace, Lemhannas pun tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

Pada sisi lain, Presiden juga berupaya menjaga kekompakan internal para penyelenggara negara, terutama jajaran kabinet. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, sehari sebelum halalbihalal, lebih banyak lagi pernyataan Presiden yang mengarah

kebijakan baru yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat, disertai lebih dari 100 hingga hampir 200 produk hukum.

"Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa," tegas Presiden.



pada kebijakan memilih konsensus daripada konflik yang menguras energi dan mengurangi kesempatan mencapai kemajuan bangsa.

Dalam pidato saat pembukaan sidang kabinet kali ini, Presiden Prabowo mengemukakan bahwa enam bulan pertama masa pemerintahannya telah menghasilkan capaian-capaian yang signifikan dan fundamental untuk memperkuat landasan kebangkitan bangsa. Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah menghasilkan 28

Namun demikian, Presiden mengingatkan pentingnya evaluasi yang objektif agar pemerintahan tidak terjebak dalam sikap merasa puas diri. Ia menganalogikan pentingnya akurasi dalam pemerintahan layaknya pendulum atau azimuth kompas: sedikit deviasi di awal dapat menyebabkan penyimpangan besar di kemudian hari. "Kalau kita deviasi, yang saya katakan di awal penyimpangannya sedikit, di ujungnya penyimpangan yang besar," tandas Presiden. • Editor: GE

TANTANGAN PAUS DI MASA DEPAN

Senin pagi itu betul-betul sangat mengesankan. Pukul 08.00 WIB saya terima utusan Vatikan yang membawa surat yang isinya mengundang saya menjadi salah seorang pembicara dalam sebuah konferensi internasional di Vatikan bulan September yang akan datang.

Saya diminta membahas poin-poin utama di dalam Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani bersama Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Alangkah kagetnya, tiga jam kemudian saya mendapatkan berita bahwa Paus Fransiskus wafat.

Ketika bulan lalu saya harus opname di rumah sakit karena kecelakaan, kaki saya harus dioperasi. Pada hari yang sama saya menonton televisi, Paus Fransiskus juga masuk rumah sakit. Saya hanya teringat foto kami berdua di Istiqlal yang menjadi The Photo of the Year sedang berangkulan. Apakah ini keinsidensi atau ada makna yang lain. Allahu a'lam.

Paus meninggalkan kita ketika umat mulai merasakan ada jarak intelektual dengan agama. Mereka mengesankan ajaran agama terlalu dogmatis untuk menyelesaikan persoalan di dalam lingkungan pacunya yang sedemikian rasional.

Doktrin agama yang mereka peroleh dari nara-sumbernya dikesankan lebih membatasi, berorientasi masa lampau, terkesan konservatif, statis, tradisional, terlalu tekstual, kualitatif, dan deduktif. Sementara lingkungan pacu mereka ditantang untuk lebih bebas, berorientasi masa depan, dinamis, mobile, canggih, kontekstual, dan induktif.

Dalam kehidupan empiris, mereka berhadapan dua dunia yang seakan berbeda. Satu sisi mereka berada di sebuah locus spesifik (nation states) dengan regulasi yang amat ketat, tetapi juga dunia networking yang sedemikian sophisticated. Mereka hidup dalam sebuah bingkai budaya (cultural frame) yang sedemikian unik, sementara di luar dirinya ada banyak tawaran opsi baru. Mereka juga sering merasakan adanya tumpang tindih kepentingan antara kendali pemerintah (government controlled) dan kehendak pasar (market driven).

Bisnis mereka juga sering kali diperhadapkan dua nilai yang berbeda: antara export-lead dan consumer-driven, antara male dominated dan emergence of women. Belum lagi dengan standar ganda yang diterapkan oleh pemerintah dan orientasi politik global. Sebetulnya tantangan ini tidak hanya diperhadapkan kepada Paus, tetapi juga untuk para pemimpin agama lain, termasuk agama Islam.

Era "post-truth"

Kini umat betul-betul berada di dalam era post-truth, di

mana kebenaran sulit didefinisikan. Era post-truth menciptakan tantangan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, politik, sains, dan kehidupan sehari-hari karena sulitnya membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid.

Pembentuk opini publik semakin ramai mengepung masyarakat seiring dengan perkembangan internet dan media sosial yang semakin cepat dan luas. Akibatnya, kini umat sering berhadapan dengan berbagai bias informasi dan konfirmasi.

Setiap orang cenderung mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing sambil mengabaikan atau menolak informasi dari luar. Misleading informasi dan penyebaran berita palsu (fake news) dan disinformasi menjadi umum, di mana informasi disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau memengaruhi opini publik. Belum lagi ujaran kebencian keagamaan (religious hate speech) semakin menjamur di media sosial.

Para elite agama yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat (key structures) menjadi lemah karena munculnya trust decline berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi dan institusi yang selama ini sudah mapan, termasuk institusi pemerintah, institusi agama, pranata sosial, lembaga

adat-budaya.

Fenomena disfungsionalisasi pemimpin umat semakin nyata di dalam masyarakat publik. Seruan-seruannya mengalami degradasi wibawa. Tokoh agama dan institusi keagamaannya sama-sama mengalami pelemahan.

Pergumulan antara dunia pemerintahan dan dunia keagamaan selalu terjadi juga di dalam lintasan sejarah. Kini, seperti halnya dunia pemerintahan memegang peran lebih dominan. Tokoh-tokoh agama lebih banyak dilibatkan di sektor hilir, tidak di sektor hulu yang menentukan kebijakan.

Tokoh-tokoh agama lebih banyak diundang di Kementerian Sosial untuk menyelesaikan masalah atau akibat, seperti kerusakan lingkungan dan kenakalan remaja, tetapi jarang diundang di Bappenas untuk bersama-sama merancang dan merumuskan berbagai konsep yang bakal melahirkan berbagai akibat.

Masalahnya, bagaimana mungkin pemimpin umat bisa diajak menyelesaikan suatu akibat, sementara perumusan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul tidak dilibatkan?

Tokoh agama tentu bukan "pemadam kebakaran" atau "pendorong mobil mogok", melainkan figur yang memiliki potensi luar biasa. Tidak hanya untuk pemberkahan (consecration), tetapi untuk legitimator dan motivator untuk meraih

**OLEH: NASARUDDIN UMAR
MENTERI AGAMA RI DAN IMAM BESAR MASJID
ISTIQLAL JAKARTA**

partisipasi masyarakat.

Masalah lainnya juga bagaimana para elite agama bisa hadir menawarkan konsepnya jika dalam diri mereka mengalami inferiority complex. Agama dan pemimpinnya tidak bisa lagi otonom karena sudah menjadi subordinasi pemerintah. Sumber energinya berada di bawah otoritas pemerintah. Dalam situasi seperti ini, agama dan para pemimpinnya sulit melancarkan fungsi kritisnya karena dependensinya kepada pemerintah terlalu kuat.

"Universal values"

Dahulu kala amat mudah mendefinisikan kebenaran. Mudah juga menjadi tokoh atau pemimpin umat. Apa kata hati nurani dan apa yang valid secara intelektual (universal values), apalagi didukung kitab suci, maka serta-merta dapat

Geertz dengan pemain layang-layang. Layangannya di selang, tetapi pemainnya di atas rumput lapangan.

Kenyataan seperti itu membuat agama tidak lagi dirasakan sebagai sebuah pencerahan, tetapi dirasakan sebagai sebuah beban. Tentu bukan seperti ini maksud Tuhan menurunkan agama kepada hambanya.

Tantangan Paus dan para pemimpin agama lainnya di masa depan ialah bagaimana mengembalikan otoritas institusi agama menjadi lebih independen. Untuk itu, para pemimpin agama terlebih dahulu harus lebih independen. Tidak menggantungkan nasibnya kepada kelompok kepentingan tertentu, termasuk kepada pemerintah.

Para pemimpin agama diharapkan mampu memainkan diplomasi agama (religious diplomacy) yang bermartabat. Diplomasi ini bisa dalam bentuk membangun hubungan antarnegara dan



diterima dan diterapkan di dalam masyarakat karena secara konvensional itulah kebenaran sejati (legitimate values).

Akan tetapi, sekarang sudah berubah. Apa yang selama ini dinyatakan sebagai universal values belum serta-merta diterima masyarakat karena referensi kebenaran kini lebih banyak ditentukan oleh "otoritas baru" yang dipromosikan oleh "raja baru" yang disebut media sosial.

Tantangan Paus dan tokoh-tokoh agama lainnya di masa depan semakin berat. Diperlukan epistemologi baru untuk mengembalikan eksistensi kitab suci di dalam hati dan pikiran masyarakat. Tentu diperlukan juga figur mumpuni yang didukung oleh otoritas besar, semisal Paus yang memegang institusi besar.

Jika pimpinan umat seperti ulama, pastor, pendeta, resi, imam, syekh, dan kiyai gagal mengartikulasikan nilai-nilai ajaran agama di dalam masyarakat modern, tidak mustahil umat akan berada pada posisi apa yang disebut Clifford

antarbangsa dengan menggunakan elemen-elemen agama sebagai sarana untuk menciptakan pemahaman, kerja sama, dan perdamaian dunia yang lebih konstruktif.

Peran dan diplomasi tokoh agama amat diperlukan untuk melahirkan sebuah tatanan dunia yang lebih feminine-nurturing. Tatanan dunia yang masculine-struggling sudah harus dilewati. Sudah saatnya kita menciptakan lingkungan pacu yang berkeadaban semesta. Kementerian Agama kini sedang merumuskan sebuah gagasan Eco-Theology, yang di antara perwujudannya ialah penyusunan kurikulum berbasis cinta secara komprehensif.

Selamat jalan tokoh dan pahlawan kemanusiaan, warisan kearifanmu akan senantiasa hidup subur di dalam hati dan pikiran kami. Harus lebih independen, tidak menggantungkan nasib kepada kelompok kepentingan tertentu, termasuk kepada pemerintah. ●



SIAPKAN 7 PROGRAM PRIORITAS UNTUK PEMERATAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Untuk melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru telah menyiapkan 7 (tujuh) program prioritas yang akan dijalkankannya bersama Wakil Gubernur H Cik Ujang

Tujuh program prioritas ini disampaikan Gubernur Herman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel 2026 dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatera Selatan.

Menurutnya Musrenbang 2025 dalam rangka penyusunan RKPD adalah awal dari pembangunan daerah. Melalui RKPD ini diharapkan ada kesamaan pandangan, kesamaan gerak dan kesamaan aksi bagi Bupati/Walikota.

Sehingga Bupati/Walikota di Sumsel harus tahu bahwa bingkai besar mereka adalah Sumsel dan Sumsel juga menuju bingkai besar nasional. Hal itu diistilahkannya sebagai hierarki dalam pelaksanaan pembangunan.

Herman Deru mengatakan bahwa Musrenbang RKPD ini penting dilakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketujuh 7 program prioritas pembangunan dari HDCU itu adalah :

1. Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas.
2. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
4. Pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang

berkualitas;

7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

"Setiap pekerjaan yang sukses selalu diawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data. Rencana tanpa ada data hasilnya juga akan sporadis," ujar HD.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr Restuardy Daud mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam dalam penyusunan RKPd 2026.

Dimana pemerintah daerah telah menetapkan tema pembangunan yaitu "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan" yang mereka cermati juga ikut mendukung tema dalam rencana awal RKP 2026.

Mereka juga mencermati bahwa berbagai indikator makro yang dijabarkan kepala Bappeda. yang sejatinya telah disusun adalah untuk mencapai atau menjadi bagian memperkuat agregat target nasional dengan memperhatikan SDA maupun kemampuan dan potensi yang ada di Provinsi Sumsel.

"Konsistensi ini, kami titipkan kepada jajaran Pemprov Sumsel sebagai wakil pusat di daerah untuk bersama-sama memfasilitasi proses pembinaan umum dan urusan pemerintahan 17 kab/kota agar rencana pembangunan kab/kota juga dapat disusun selaras dengan tema nasional maupun tema provinsi 2026," jelasnya.

Perluas Segmen Program GSMP

Salah satu tujuh program prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel itu adalah membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk menjalankan hal tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward

Candra menggelar rapat Koordinator Keberlanjutan Kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Dikatakan Sekda untuk melihat sejauh mana GSMP menysasar ke masyarakat, saat ini dinas terkait diharapkan dapat melakukan pendataan maupun pemetaan.

"Kita perlu pemetaan, sampai tahun 2024. Berapa desa dan kelurahan yang sudah kita bantu dan berapa desa dan kelurahan yang mengimple-

saja desa dan kelurahan yang bisa dibantu untuk terus menjalankan program GSMP," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Ruzuan Efendi mengatakan sejak diluncurkan Desember tahun 2021 GSMP telah melampaui perjalanan panjang dan membawa dampak yang positif.

Hal ini ini juva sesuai visi misi strategis Gubernur Sumsel H. Herman Deru, sehingga kedepan GSMP akan terus



mentasikan GSMP. Dari data ini kita bisa menentukan target. Kalau tahun 2024 sudah 90%, tahun 2025 ini targetnya 100%," kata Edward.

Untuk mendukung GSMP ini lanjut Edward diperlukan upaya kolaboratif baik pemerintah maupun pihak lainnya seperti BUMN, BUMD, Swasta organisasi kepemudaan, organisasi wanita dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Data ini penting agar kita tahu mana

dikembangkan.

"GSMP memberikan dampak, ekonomi, sosial dan lingkungan di Sumsel. Nantinya ini akan terus dikembangkan dan diperluas segmennya," ujar Ruzuan.

Kedepan gerakan yang mengajak warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam ini segmennya akan diperluas lagi. Ada segmen masyarakat seperti sekolah, panti sosial dan dasa wisma. •

SUKSES TINGKATKAN PRODUKSI PANGAN HINGGA 5 BESAR NASIONAL

Di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru berhasil menempatkan Provinsi Sumatera Selatan di peringkat 5 penopang pangan nasional. Setelah sebelumnya sempat menempati peringkat 8 besar nasional. Ke depan Provinsi Sumsel menargetkan ada di nomor 1 nasional.

Atas pencapaian tersebut Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memberikan pujian dan mengaku bangga akan prestasi yang telah diraih sejumlah daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang telah mampu meningkatkan produksi pangannya.

"Saya ucapkan terimakasih kepada semua unsur, Mentan, semua stakeholder. Semua unsur, semua Pemda, para Gubernur, Bupati. Pemimpin di daerah se-

terjadi peningkatan produksi padi Sumsel dari 3 juta ton pertahun menjadi 4 juta ton pertahun.

"Ini luar biasa naik 25 persen dalam satu tahun. Indonesia akan jadi pemimpin revolusi hijau di dunia. Indonesia tidak hanya swasembada pangan. Indonesia akan jadi lumbung dunia," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo menyambut baik program cetak sawah baru dengan optimalisasi lahan atau Oplah yang tengah

butuh waktu 25 hari," ucap Presiden.

Sementara Mentan Andi Amran Sulaiman yang menyebutkan ada 150 Bupati/Walikota, 10 Gubernur dan 5 orang Wakil Gubernur yang turut hadir secara virtual pada kegiatan Penanaman Padi Serentak Se Indonesia kali ini.

Menurut Mentan, tanam serentak yang telah dilakukan di bulan April 2025 ini sudah mencapai luasan 1,3 juta hektar. Dengan target produksi panen mencapai 7,5 juta ton.



muanya bahu membahu, meningkatkan penerimaan yang didapat petani kita," tegasnya saat memberikan sambutan di sela-sela melakukan Penanaman Padi serentak yang dipusatkan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.

Dikatakan Prabowo dirinya juga mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa

digalakkan Kementan. 105 ribu hektar lahan sawah yang akan ditanami di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan sistem modern.

"Sekarang kita tengah sawah 105 ribu hektar dengan teknik modern. Tadi kita melihat drone menebar benih. Ternyata bisa 1 hari 25 hektar yang tadinya kalau dengan tenaga manusia atau tradisional

Khusus untuk lahan yang ada di lokasi acara Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dijelaskan Mentan dilakukan penanaman benih di atas lahan 105 ribu hektar yang merupakan bagian dari program Optimalisasi Lahan dari 1 kali tanam ditingkatkan menjadi 3 kali tanam dalam satu tahun.

Bahkan Oplah di Sumsel lanjut Men-

tan, berpotensi dikembangkan menjadi 1 juta hektar yang jika direalisasikan Sumsel akan mampu mengalahkan Jawa Timur sebagai penghasil pangan di Indonesia.

Launching Gerakan Indonesia Menanam

Untuk diketahui Kunker Presiden ke Sumsel selain melakukan penanaman padi serentak di Ogan Ilir juga launching program nasional Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) yang digagas oleh Ustadz Adi Hidayat.

Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak bersama 14 provinsi secara nasional di Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan tanam padi serentak ini menjadi bagian dari percepatan tanam sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan.

"Alhamdulillah saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Selatan untuk melihat peningkatan lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya disini adalah tempatnya buaya. Sekarang sedang dibangun 105 ribu hektare sawah dan teknik-teknik yang paling modern di dunia," ucap Presiden.

Di area tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menjajal penebaran benih padi dengan menggunakan teknologi pertanian yakni drone DJI Agras T40. Menurut Presiden, penebaran benih dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menjangkau 25 hektare lahan dalam waktu sehari.

"Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang menyebarkan, menebarkan benih. Ini ternyata bisa 1 hari 25 hektar. Yang tadinya 1 hektar kalo pake tenaga manusia 25 hari, sekarang 25 hektar 1 hari," lanjutnya.

Presiden pun menyampaikan optimisme tinggi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional dan peran Indonesia di kancah global. Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tetapi akan menjadi lumbung pangan dunia.

Nanti Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua di dunia, yang tadinya banyak yang tidak percaya, tidak yakin, sekarang di depan mata kita, kita sedang

melihat ini benar-benar sangat mungkin dan akan terwujud cita-cita kita. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia," katanya.

Usai menebar benih menggunakan drone di Ogan Ilir, Presiden Prabowo bertolak ke Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin untuk meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (GERINA).

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), sebuah

pada Gerina.

"Apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Setiawan Ichlas, kawan saya lama ini beliau, ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Apa yang dirintis di sini menjadi contoh dan saya percaya banyak seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh," kata Presiden.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Ustadz Adi Hidayat menyampai-



gerakan kolaboratif untuk membangkitkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan. Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah petani.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pangan. Untuk itu, Presiden mengapresiasi partisipasi aktif berbagai pihak turut mewujudkan dan memastikan ketahanan pangan nasional terpenuhi, salah satunya inisiasi dari Ustadz Adi Hidayat

kan perlu adanya kolaborasi sejumlah pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, perlu ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat untuk membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu bagian yang penting untuk stabilitas negeri.

"Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat mempersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran," ucap Ustadz Adi Hidayat. •



DUKUNG PROGRAM 3 JUTA RUMAH LEWAT PROGRAM GEBRAK

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru launching Program Gerakan Benerin Rumah Agar Layak (Gebrak) Tahun 2025 yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Program Gebrak tersebut sebagai langkah konkret dalam mendukung program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah.

Menurut Gubernur Herman Deru program Gebrak juga selaras dengan Gerakan Bedah Rumah Serentak Se Sumatera Selatan yang telah berjalan selama ini.

"Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal hunian yang layak dan sehat," ucap Herman Deru.

Dikatakan Herman Deru, dalam mendukung dan mewujudkan program 3 juta rumah pemerintah pusat di Sumsel, pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD bisa juga dilakukan melalui kerja sama dengan per-

sahaan BUMN/BUMD dan badan Amil zakat di Sumatera Selatan.

"Kita dapat mewujudkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dengan pembiayaan melalui kolaborasi bersama BUMN/BUMD, Amil Zakat di Sumatera Selatan. Saya berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka," tambahnya.

Herman Deru mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka masyarakat.

"Terima kasih kepada semua pihak

yang telah berkontribusi dalam program ini. Saya berharap Gebrak dapat menjadi contoh bagi program-program lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.

Herman Deru juga meminta kepada Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati untuk mendorong Perumnas agar sesegera mungkin bergerak terkait dengan perbaikan rumah susun yang ada di Kota Palembang agar masyarakat yang menghuni rumah susun dapat memiliki rumah yang layak dan ruang terbuka hijau.

Dalam kesempatan itu Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan

dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar segera melakukan perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia sebanyak 3 juta rumah dimana 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Ia mengatakan dalam mewujudkan pekerjaan tersebut harus dilakukan secara gotong royong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk membangun 3 juta rumah ini harus dilakukan dengan gotong royong dalam mewujudkannya. Alhamdulillah hari ini kita launching 70 rumah yang akan direnovasi di Palembang. ini merupakan wujud nyata dalam mendukung terwujudnya program 3 juta rumah tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya dia mengatakan pikanya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sangat terbuka untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menuntaskan permasalahan pemukiman yang kurang layak di Sumatera Selatan.

Sementara itu Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa menjelaskan, bahwa saat ini Gebrak melakukan renovasi terhadap 70 rumah masyarakat Kota Palembang yang kurang layak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan layak tinggal.

Disampaikannya pula bahwa Gebrak merupakan program kolaborasi antara Pemerintah Kota Palembang dan BUMN BUMD serta Pihak Swasta melalui CSR nya.

“Ini merupakan program kerjasama dan kolaborasi pemerintah bersama BUMN/BUMD serta Swasta. Dan ini merupakan wujud nyata negara dalam menjamin hak dasar masyarakat khususnya Kota Palembang,” tuturnya.

Revitalisasi Rusunawa Pekerja

Pemprov Sumsel bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI) juga segera melakukan revitalisasi keberadaan Rumah Susun Pekerja, yang berlokasi di Jalan Srijaya Palembang untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang ini masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” katanya Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah.

Dikatakan Fahri, pihaknya menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, pemerintah harus hadir untuk membuat rumah singgah agar tidak orang yang terlantar. Maka selanjutnya diarahkan untuk menempati rumah sewa seperti rusunawa, baru kemudian setelah menyewa rumah bisa menabung dan menicil untuk memiliki rumah sendiri.

“Pemerintah berusaha memenuhi

kebutuhan dan menjamin hunian yang layak bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi (Wagub) Sumsel H Cik Ujang menegaskan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, untuk kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP pengelolaannya, karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik Kementerian.

“Ini kita bersurat dulu ke Kementerian karena ini aset kementerian, setelah bersurat ke kementerian, perencanaan kedepannya kita menunggu hasil keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” tegas Cik Ujang.

Untuk diketahui, Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Sumsel, memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air. ●



PELANTIKAN 101 CPNS FORMASI 2024, GUBERNUR HERMAN DERU TEKANKAN INTEGRITAS DAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi melakukan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumsel formasi tahun anggaran 2024 sebanyak 101 CPNS di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (9/5/2025) siang.

Pelantikan ini disaksikan langsung Kepala BKD Provinsi H. Ismail Fahmi Sumsel dan Plt Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Prima Sepriza.

Dalam kesempatan itu Herman Deru menyampaikan ucapan selamat kepada CPNS yang sudah diresmikan.

Menurutnya menjadi Aparatur Sipil

untuk memenuhi keinginan orang lain," ujarnya.

Jika dihitung rata-rata, CPNS ini nanti kata Herman Deru akan mengabdikan hingga 30 tahun lamanya. Dengan waktu yang cukup panjang itu, ia ingin agar CPNS ini menghasilkan karya dan berani berinovasi.

"Yang daftar 4.025 kalian 101 ini yang

layan masyarakat. Ia pun meminta para PNS ini bersungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini kalian resmi jadi pelayan masyarakat bukan bos. Saya tidak mau dengar cerita misal pelayan kesehatan ada pasien keluhkan sikap. Saya tidak ingin dengar keluhan masyarakat karena ketidakpedulian kalian," tegas Herman



Negara (ASN) tentu ibarat membuka lembaran baru yang bersejarah. Sehingga pilihan menjadi PNS ini diharapkan bukan sekedar untuk coba-coba. Apalagi terpaksa karena keinginan orang lain.

"Jangan sampai merasa menjalani ini

lulus tentu hebat. Tapi kehebatan ini tidak ada gunanya jika tidak diaplikasikan dengan berkarya dan berinovasi," jelasnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan, sejak diresmikan menjadi CPNS hari ini artinya mereka telah resmi menjadi pe-

Deru.

Dalam kesempatan itu Herman Deru juga berpesan agar CPNS memahami postur Pemprov Sumsel. Ibarat rumah, mereka bagus tahu dimana letak ruang tamu, ruang dapur, kamar tidur atau kebun.

“Jadi mulai besok harus tahu jumlah Kabupaten/Kota di Sumsel ada berapa. Jumlah kecamatan, jumlah desa dan kelurahannya ada berapa harus tahu,” katanya.

Di ujung sambutannya Herman Deru kembali berpesan agar CPNS inj dapat bekerja dan bertanggung jawab dengan amanah yang telah diembankan pada mereka. lain meminta CPNS untuk menutup harapan dan keinginan menjadi kaya dari jabatan dan profesi ini.

“Cukup dan bertanggung jawab dengan amanah yang diemban. Selamat bekerja semoga menjadi ASN



Jadi mulai besok harus tahu jumlah Kabupaten/Kota di Sumsel ada berapa. Jumlah kecamatan, jumlah desa dan kelurahannya ada berapa harus tahu.

yang membanggakan keluarga dan masyarakat Sumsel serta diri sendiri,” paparnya.

Sementara itu Kepala BKD Provinsi H.Ismail Fahmi Sumsel menjelaskan 101 CPNS yang diresmikan hari ini telah melalui rangkaian seleksi sejak

Ada sebanyak 4025 orang yang ikut mendaftar seleksi dengan formasi 185. Dimana sampai seleksi akhir ada 104 orang yang lulus kemudian mundur 3 orang sehingga tinggal 101 CPNS yang diresmikan hari ini.

Dari formasi tersebut tercatat 81 sub spesialis tidak ada pelamar sedangkan 101 CPNS yang diresmikan hari ini terdiri dari tenaga kesehatan dan teknis.

CPNS ini tersebar di OPD di Pemprov Sumsel seperti, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumsel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Humas dan Protokol, serta RSUD Siti Fatimah dan sejumlah OPD lainnya. •



HUT ke 79 Provinsi Sumsel

MELEBUR BERSAMA MEMBANGUN DAERAH

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk bersama-sama terlibat langsung dalam rangkaian kegiatan menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sumsel ke-79 yang jatuh pada tanggal 15 Mei 2025 mendatang

Dikatakannya “Melebur Bersama” bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah semangat untuk menghapus sekat-sekat birokrasi dan meningkatkan kinerja ASN dalam melayani masyarakat.

“Saya dan Wakil Gubernur Cik Ujang ingin kita berbaur dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ayo leburkan diri menjadi satu dan mencatatkan prestasi bagi Sumsel. Jangan ada lagi perbedaan dari kontestasi pilkada yang lalu mengganggu kinerja dan terlibat dalam dinamika politik,” ajak Herman Deru.

Dikatakannya, 80 hari menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel pasca dilantik pada Februari 2025 lalu. Dirinya bersama H Cik Ujang sangat senang karena bisa bersama-sama mengawali rangkaian HUT Provinsi Sumsel dengan menggelar jalan santai dan senam bersama ASN dan Non ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.

“Kegiatan pagi hari ini mengawali rangkaian peringatan HUT ke-79 Provinsi Sumsel. Tentu banyak kemajuan dan tantangan yang kita hadapi. Kita sudah berniat dengan tulus untuk mengabdikan di Pemprov Sumsel sesuai dengan tupoksi masing-masing,” imbuhnya.

Dengan tema “Bersama Membangun Sumsel” perayaan HUT Sumsel kali ini sangat istimewa sekaligus menjadi momentum meningkatkan semangat dan kinerja ASN dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu semangat “Melebur Bersama” dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dalam membangun Sumsel.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH berkesempatan melepas peserta jalan santai yang terdiri dari para pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel, dan dilanjutkan dengan senam bersama. Selain itu masih ada kegiatan



yang akan dilakukan dalam menyemarakkan HUT Provinsi Sumsel tahun ini.

"Nanti ada juga kunjungan ke panti sosial, donor darah pada tanggal 14 Mei, ada pula pasar murah. Selain itu akan ada penanaman pohon di Jakabaring. Puncaknya pada tanggal 15 Mei diselenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel dalam rangka hari jadi ke-79 Pemprov Sumsel," ujarnya.

Sementara dalam rangka memeringati HUT Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ke 79 Tahun, RSUD Siti Fatimah melaksanakan kegiatan Skrining Osteoporosis. Kegiatan berlangsung mulai 02 sampai 14 Mei 2025 dengan target peserta sebanyak 79 orang.

Skrining Osteoporosis dilaksanakan untuk mendeteksi dini penurunan kepadatan tulang sebelum terjadi patah tulang, mengetahui risiko patah tulang, mendiagnosis osteoporosis, dan mengevaluasi efektivitas terapi osteoporosis.

RSUD Fatimah Skrining Stunting dalam Kehamilan yang dilaksanakan pada tanggal 07, 08, dan 14 Mei 2025 bertempat di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditargetkan diikuti oleh 79 Ibu Hamil.

Skrining Stunting dalam kehamilan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendeteksi dini stunting pada ibu hamil selama masa kehamilan dengan menilai status pemenuhan gizi pada ibu hamil dan janin.

Kemudian melakukan khitanan massal yang merupakan syariat islam serta wajib dilaksanakan bagi umat muslim laki-laki. Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan yang Ke-79, dilaksanakan Khitanan Massal yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 bertempat di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan target peserta 79 Anak berusia 2 - 9 Tahun.

Kegiatan ini dibuka secara langsung Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, SpOG MARS.

Dengan diadakannya kegiatan khitanan massal ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban agama, meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, serta menanamkan rasa solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. •





PEMPROV JAWA TIMUR HAPUS BATAS USIA DALAM REKRUTMEN KERJA

Terobosan Inklusif Gubernur Khofifah Tekan Pengangguran

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali mencatatkan langkah progresif dalam dunia ketenagakerjaan.

Salah satu kebijakan terobosan yang sedang digencarkan adalah penghapusan syarat batas usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik di sektor publik maupun swasta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemprov Jatim dalam menekan angka pengangguran terbuka serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

Selama bertahun-tahun, batasan usia dalam lowongan pekerjaan telah menjadi hambatan besar bagi para pencari kerja, terutama mereka yang berusia di atas 35 tahun. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki pengalaman dan keterampilan mumpuni harus tersingkir hanya karena terbentur syarat administratif terkait usia.

Kebijakan diskriminatif semacam ini dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia kerja yang dinamis dan berbasis kompetensi.

Menjawab tantangan ini, Gubernur Khofifah menegaskan perlunya transformasi paradigma dalam proses seleksi kerja.

"Yang seharusnya menjadi indikator utama dalam perekrutan adalah kompetensi, pengalaman, profesionalisme, dan integritas, bukan semata-mata umur," tegasnya.

Komitmen ini kemudian diwujudkan secara resmi melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, pelaku dunia usaha, perusahaan swasta, serta sektor industri.

Dalam surat edaran tersebut, secara tegas disebutkan bahwa seluruh lembaga penyedia lapangan kerja dilarang menetapkan batas usia yang tidak

relevan terhadap jenis pekerjaan yang ditawarkan.

SE ini menjadi dokumen hukum yang mengikat moral dan administratif, serta menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mitra-mitranya.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk reformasi birokrasi dan sekaligus edukasi publik terhadap pentingnya prinsip non-diskriminasi di dunia kerja.

Kebijakan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan larangan atas segala bentuk perlakuan diskriminatif di tempat kerja.

Selain itu, kebijakan ini memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara anggota ILO (International Labour Or-



ganization) melalui pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 111, yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional melalui UU Nomor 21 Tahun 1999.

Konvensi ini secara eksplisit melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan usia, jenis kelamin, suku, agama, ataupun kondisi fisik.

Pemprov Jatim tidak hanya bersifat imbauan dalam penerapan kebijakan ini. Kebijakan penghapusan batas usia juga akan diterapkan secara langsung dalam seluruh proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyedia jasa pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah, Program padat karya yang didanai oleh APBD. Seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Semua proses seleksi tersebut akan diarahkan untuk mengadopsi prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan anti-diskriminasi," sambunya.

Selain isu usia, Pemprov Jatim juga menegaskan komitmennya terhadap inklusi tenaga kerja dari kalangan disabilitas.

Gubernur Khofifah menyatakan bahwa para penyandang disabilitas harus diberikan peluang yang sama selama mereka memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang sesuai.

"Upaya ini merupakan bagian dari langkah komprehensif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan menghargai keberagaman," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, kompetitif, dan manusiawi.

Menurutnya, era modern menuntut adanya sistem yang tidak lagi mengkotak-kotakkan warga berdasarkan usia atau kondisi fisik, tetapi justru mendorong pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara maksimal dan berkeadilan.

Ia juga menyebut bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ketenagakerjaan yang progresif dan inklusif.

"Dengan membuka akses kerja yang

lebih luas, termasuk bagi mereka yang selama ini termarginalkan, Provinsi Jawa Timur berharap bisa meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan," jelasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan model bagi daerah lain di Indonesia dalam merancang ke-

manusia, bukan sekadar indikator formal administratif.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan alasan Khofifah menghapus syarat usia setelah melihat ada fenomena diskriminasi usia pada calon pekerja. Ada perlakuan tidak adil atau setara terhadap pelamar berdasarkan usia.

"Ada semacam diskriminasi usia



bijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada keadilan sosial.

Tidak hanya mengurangi pengangguran, kebijakan ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun peradaban kerja yang lebih manusiawi, sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Jawa Timur optimis dapat menjadi pionir dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kualitas sumber daya

bagi masyarakat dalam hal penyediaan lowongan pekerjaan. Karenanya Pemprov Jatim perlu mengeluarkan SE yang saat ini sedang berproses," kata Adhy, Senin lalu 5 Mei 2025.

Hal tersebut, kata Adhy, juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, dan pelaksanaan non-diskriminasi di Jatim.

Menurutnya, banyak pencari kerja usia produktif di atas 35 tahun yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. ●

NILAI INVESTASI MASUK SUMUT DITARGET RP100 TRILIUN PER TAHUN

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun.

Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin 5 Mei 2025.

"Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-

lainnya," kata Bobby.

Investasi adalah salah satu yang hal yang menjadi sorotan Bobby Nasution pada Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut.

Selain investasi, Ia juga menyoroti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang tidak hanya bergantung dengan APBD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab/Pemko bisa berkolaborasi dengan membuat BUMD bersama di beberapa sektor yang terkait dengan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Langkat, dengan migas atau di Mandailingnatal, dengan tambang emas.

"Kita buat BUMD nya (bersama) kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi dividen, PAD pun

naik," kata Bobby.

Tidak hanya itu, Ia juga mengusulkan ide tentang penggabungan BUMD provinsi dengan kabupaten/kota. Salah satu BUMD yang bisa digabungkan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dengan penggabungan PDAM, permasalahan kekurangan air di beberapa daerah bisa cepat diselesaikan.

"Kita punya PDAM, kabupaten juga punya, kalau boleh saran BUMD ini disatukan asetnya, sehingga (aset) punya valuasi yang besar dan bisa mendapat pembiayaan yang besar, jadi bisa kita intervensi langsung seperti di beberapa daerah yang kekurangan air bisa langsung dieksekusi dengan cepat," kata Bobby.

Pada pembukaan Musrenbang tersebut, Bobby Nasution juga meny-



ampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 - 2029.

Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 - 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Sementara, Bupati Sergai, H Darma Wijaya menyebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyatakan dukungan penuh terhadap target investasi Rp100 triliun per tahun yang dicanangkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Konsep kolaborasi investasi yang digagas Pak Gubernur sangat relevan



dengan potensi unggulan dan visi pembangunan Sergai. Kami siap mendukung melalui penguatan sektor strategis, inovasi peningkatan PAD, serta pengelolaan BUMD bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini.

Menurutnya, peningkatan investasi akan memperkuat struktur ekonomi daerah dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

la juga menilai langkah penggabungan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM, akan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar, terutama kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah yang masih kekurangan.

"Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis berbagai target pembangunan daerah dapat tercapai, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga perbaikan kualitas lingkungan hidup," tambahnya. •



PROGRAM BARAK MILITER UNTUK SISWA BERMASALAH: SOLUSI PENDIDIKAN ATAU BENTUK MILITERISASI ANAK?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kembali memantik kontroversi dalam dunia pendidikan nasional lewat kebijakan anyar siswa “nakal” akan dibina dalam barak militer bersama TNI-Polri.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari program pembentukan karakter remaja, dengan pendekatan disipliner ketat yang sudah mulai diterapkan di wilayah Purwakarta dan Bandung, masing-masing menampung 30 siswa.

Menurut Dedi, program ini menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA yang dianggap melakukan pelanggaran berat serta berasal dari keluarga dengan keterbatasan pengasuhan.

“Kami hanya menerima siswa yang diserahkan langsung oleh orang tua dengan surat persetujuan. Tanpa itu, tidak akan kami terima,” jelasnya dalam konferensi pers pekan lalu.

Program ini disebut dengan Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan dan sudah di mulai

mendaftarkan anak-anaknya secara sukarela karena melihat dampak baik dari program ini,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan bahwa peserta berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, sebagai bagian dari langkah preventif terhadap kenakalan remaja.

Dalam pelaksanaannya, siswa mendapat materi tambahan dari berbagai unsur, termasuk TNI, sebagai bentuk pembinaan karakter secara menyeluruh yang mencakup aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan bela negara.

Tak tanggung-tanggung Dedi Mulyadi menyebut pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk mendukung program pembinaan anak-anak bermasalah melalui pelatihan disiplin di barak militer.

“Anggaran ini sifatnya cadangan.

Pemakaiannya ter-

gantung kebutuhan di lapangan, terutama jika terjadi lonjakan jumlah anak yang perlu ditangani. Nanti akan dihitung per anak, berapa biaya hariannya,” ujar Dedi.

Anggaran tersebut mencakup biaya perlengkapan seperti seragam, konsumsi harian, hingga honor para pelatih di barak militer. Program ini telah berjalan dan ratusan siswa telah mengikuti pelatihan yang bertujuan menanamkan

Kamis, 1 Mei 2025. Dedi menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan perilaku para pelajar.

“Respons orang tua sangat positif. Bahkan, banyak yang mulai



kedisiplinan dan tanggung jawab.

Untuk tingkat SMP, para siswa ditempatkan di barak militer Resimen 1 Sthira Yudha/Kostrad di Purwakarta. Sementara itu, siswa SMA mengikuti pelatihan di barak milik Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menyatakan tidak permasalahan program tersebut selama tidak mengandung unsur kekerasan fisik terhadap peserta.



"Kalau siswa dicubit atau dipukul, itu masuk kategori corporal punishment. Metode seperti itu sudah tidak relevan di era sekarang," kata Pigai di Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Pigai, hukuman fisik bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ia menegaskan bahwa program di Jawa Barat tersebut sejauh ini tidak menunjukkan indikasi pelanggaran hak

asasi.

"Tujuannya jelas membentuk disiplin, karakter, dan mental yang kuat. Kalau tidak ada kekerasan, maka tidak ada pelanggaran HAM. Kami mendukung," tegas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Program ini masih akan terus berlangsung dan terbuka kemungkinan untuk diperluas jika evaluasi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pembentukan karakter pelajar di Jawa Barat.

Militerisasi Anak di Balik Nama "Pendidikan Karakter"?

Program ini langsung memunculkan pertanyaan etis dan legal: apakah disiplin ala militer cocok diterapkan pada anak-anak? Apakah tindakan ini merupakan pembinaan atau bentuk pelanggaran hak anak?

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menolak tegas

program ini. Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi, menilai pendekatan semacam ini gagal memahami akar persoalan kenakalan remaja.

"Permasalahan anak bukan bisa diselesaikan dengan barak dan baris-berbaris. Yang dibutuhkan adalah pendekatan psikologis, konseling, dan perbaikan sistem pendidikan," ujarnya.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa penguatan peran guru BK (Bimbingan Konseling) serta pendampingan berbasis psikologi lebih efektif daripada menyisipkan anak ke lingkungan militer.

"Aturan pendidikan nasional sudah mengatur mekanisme pembinaan anak bermasalah. Solusinya bukan militerisasi, tapi intervensi yang empatik dan sesuai hak anak," tegasnya.

Meski Gubernur Dedi bersikukuh bahwa ini adalah langkah alternatif untuk menekan kenakalan remaja, banyak pihak mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan disebut sedang mengkaji legalitas dan dampak program ini secara menyeluruh.

Di tengah tuntutan dunia untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif dan berbasis pemulihan, kebijakan semacam ini justru mengingatkan publik pada pendekatan otoriter yang mulai ditinggalkan oleh banyak negara. ●





PRO DAN KONTRA PROGRAM DEDI MULYADI PEMBINAAN MILITER BAGI SISWA BERMASALAH

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah melalui pelatihan ala militer.

Program ini ditujukan kepada siswa yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, bergabung dengan geng motor, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Selama enam bulan, siswa yang teridentifikasi akan menjalani pembinaan karakter di barak militer, tanpa mengikuti sekolah formal. Mereka akan dijemput langsung oleh anggota TNI dari rumah masing-masing," kata Dedi.

Dedi menyebut, banyak orang tua sudah menyerah dalam membina anak-anak mereka. Maka, pendekatan berbasis disiplin militer dianggap perlu

sebagai solusi untuk mencegah keterjeratan lebih dalam pada perilaku menyimpang.

"Anak-anak yang sudah sulit dibina oleh keluarganya akan kita wajib militerkan. Tapi, mereka tetap akan menerima pendidikan formal agar tidak tertinggal dari sisi akademik," tegasnya.

Kebijakan ini menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyatakan, keprihatinannya terhadap potensi dampak sosial kebijakan tersebut.

"Perlu dipastikan apakah masyarakat siap menerima anak-anak ini kembali dari barak. Jangan sampai malah muncul geng baru di lingkungan sosial," ujar Iman, belum lama ini.

Menurut data P2G, populasi remaja di Jawa Barat mencapai 8,1 juta jiwa atau sekitar 18 persen dari total penduduk, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Bandung. Iman menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan riset sebelum kebijakan seperti ini diterapkan.

"Pak Gubernur perlu memahami terlebih dahulu bentuk kenakalan remaja seperti apa yang marak terjadi. Tidak semua anak bermasalah layak masuk barak. Ada perbedaan antara pendidikan militer dan pendidikan karakter yang diatur dalam Perpres No. 87 Tahun 2017," jelas Iman.

Ia juga menyoroti pentingnya indikator yang jelas dalam menetapkan kriteria "anak nakal" agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi.

Iman menyarankan solusi lain yang lebih edukatif, seperti membangun sekolah militer khusus dengan kurikulum jelas dan dibiayai penuh oleh pemerintah provinsi.

"Jika memang ingin disiplin militer, kenapa tidak buat sekolah berasrama khusus dengan pendekatan pedagogis? Ini lebih bertanggung jawab dibanding sekadar mengirim anak ke barak," usulnya.

Ia juga menekankan perlunya kerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani titik-titik rawan tawuran di daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu

Hadrian Irfani, menyatakan bahwa meski pelatihan militer dapat membentuk disiplin, kebijakan ini tidak boleh melanggar hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan formal yang menyeluruh.

"Fokus utama pendidikan adalah pengembangan akademik dan keterampilan hidup, bukan pelatihan fisik semata," ujar Lalu.

Lalu mengingatkan bahwa nilai-nilai bela negara sudah tertanam dalam kurikulum nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), serta program bela negara sukarela yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan berdasarkan Permenhan No. 8 Tahun 2022.

"Konsep bela negara harus dilaksanakan sesuai konteks pendidikan nasional, bukan dengan pendekatan militeristik yang bisa menimbulkan trauma atau stigmatisasi," jelasnya.

Ia menegaskan, pendidikan karakter, nasionalisme, dan kesiapan mental lebih baik diintegrasikan dalam kurikulum yang kuat dan berbasis kompetensi abad ke-21.

Sementara, TNI Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan bahwa program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melanggar hak-hak anak.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilakukan atas persetujuan orang tua dan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, kepolisian, hingga Dinas Kesehatan.

Ia juga memastikan bahwa para siswa tetap mengikuti ujian sekolah selama menjalani program tersebut.

"Tidak ada hak anak yang dilanggar. Semua kegiatan berlangsung dengan restu orang tua, dan pelaksanaannya pun turut diawasi oleh instansi terkait," kata Wahyu, Senin 5 Mei 2025.

Wahyu menegaskan bahwa pembinaan ini bukan bentuk hukuman, melainkan upaya penanaman nilai karakter dan kepribadian, jauh dari pendekatan militeristik. Ia membandingkan metode tersebut dengan berbagai program serupa yang juga dilakukan lembaga pendidikan lain.

"Pendekatannya bukan militer, mel-

ainkan pembentukan karakter dan pembinaan mental. Kami hanya bertindak sebagai fasilitator untuk membantu Pemprov Jabar dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh," jelasnya.

Meski menerima kritik, TNI AD menghormati keberagaman pandangan dan membuka diri terhadap evaluasi. Wahyu menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan masukan dari publik kepada Pemprov Jawa Barat sebagai bagian dari penyempurnaan program.

"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Itu akan menjadi bahan evaluasi, termasuk untuk disampaikan kepada Pemprov Jabar agar program ini bisa lebih baik ke depannya," pungkas Wahyu.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan program tersebut selama tidak mengandung unsur kekerasan

fisik terhadap peserta.

"Kalau siswa dicubit atau dipukul, itu masuk kategori corporal punishment. Metode seperti itu sudah tidak relevan di era sekarang," kata Pigai di Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Pigai, hukuman fisik bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ia menegaskan bahwa program di Jawa Barat tersebut sejauh ini tidak menunjukkan indikasi pelanggaran hak asasi.

"Tujuannya jelas membentuk disiplin, karakter, dan mental yang kuat. Kalau tidak ada kekerasan, maka tidak ada pelanggaran HAM. Kami mendukung," tegas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Program ini masih akan terus berlangsung dan terbuka kemungkinan untuk diperluas jika evaluasi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pembentukan karakter pelajar di Jawa Barat. ●



ATURAN KETAT PEMPROV DKI JAKARTA WAJIB TRANSPORTASI UMUM UNTUK ASN SETIAP RABU

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025, dan mulai berlaku Rabu, 30 April 2025.

kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dan meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan

ASN dapat menggunakan berbagai moda transportasi publik yang tersedia, termasuk, TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line Jabodetabek, Kereta bandara (Railink), Bus dan angkot regular, Kapal penyeberangan dan Kendaraan antar-jemput karyawan

Kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang memiliki kondisi khusus, yaitu pegawai dengan kondisi sakit, ibu hamil. Penyandang disabilitas dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus.

instansi dan petugas terkait untuk menolak ASN yang masih datang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Jika tetap datang, mereka tidak boleh parkir, harus diarahkan keluar, dan dianggap tidak masuk kerja,” ujar Pramono usai meresmikan Rumah Susun Sewa Jagakarsa di Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025.

Pramono menyatakan kebijakan ini telah berjalan efektif. Salah satu contoh disebutkan terjadi di wilayah Jakarta Selatan, di mana seorang ASN yang melanggar aturan langsung ditolak masuk.

“Kita patut apresiasi ketegasan petu-



“Setiap hari Rabu kami akan ‘setengah memaksa’ semua ASN untuk naik angkutan umum. Oleh karena itu, kendaraan dinas tidak akan kami sediakan pada hari tersebut,” ujar Pramono saat meninjau Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu 24 April 2025.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong budaya penggunaan transportasi publik. Mengurangi tingkat

Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan wajib penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diberlakukan secara ketat dan terus diawasi.

ASN yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi tidak diperbolehkan parkir di lingkungan kantor, bahkan dianggap tidak hadir bekerja.

“Saya sudah instruksikan seluruh

gas dan kesadaran masyarakat. ASN yang tetap membawa kendaraan pribadi langsung ditolak,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tingkat kepatuhan ASN terhadap aturan ini terus meningkat.

“Minggu lalu tingkat kepatuhan mencapai 96 persen. Saat ini saya masih menunggu laporan terbaru,

dan saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perhubungan untuk menghimpun data dari seluruh OPD,” jelasnya.

Namun, kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi ASN dengan kondisi tertentu, seperti ibu hamil.

“Untuk pegawai yang sedang hamil, tentu diberikan kelonggaran. Ini sudah kami atur dalam kebijakan,” ujar Pramono.

Kebijakan penggunaan transportasi umum ini mulai diberlakukan sejak Rabu, 30 April 2025, dan berlaku bagi seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta, termasuk wali kota, kepala dinas, lurah, dan camat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Pramono pada 23 April 2025.

Meskipun tidak disertai sanksi administratif tertulis, pelanggar tetap mendapatkan konsekuensi berupa larangan parkir dan pencatatan sebagai tidak hadir kerja. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi kemacetan serta polusi di Ibu Kota.

Sementara, Pemerintah Kota Jakarta Timur semakin gencar mendorong peningkatan layanan transportasi publik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan mengupayakan penambahan jumlah dan armada JakLingko, terutama di wilayah perbatasan Jakarta yang selama ini masih minim akses angkutan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, mengungkapkan pentingnya kehadiran JakLingko di kawasan perbatasan seperti Pondok Gede. Ia menyampaikan bahwa masih banyak titik yang belum terlayani secara optimal oleh moda transportasi ini.

“Saya tinggal di Pondok Gede, yang merupakan wilayah perbatasan, dan di sana belum ada layanan JakLingko. Padahal ini penting untuk memudahkan mobilitas warga,” ujar Iin saat ditemui di Halte Transjakarta Cawang Central, Selasa 7 Mei 2025.

Menurutnya, penambahan angkutan kecil seperti JakLingko akan sangat membantu masyarakat untuk menjangkau halte-halte Transjakarta maupun moda transportasi lainnya

dengan lebih efisien dan nyaman.

“Kalau tersedia JakLingko, saya pribadi akan lebih nyaman naik angkutan umum. Waktu tempuh juga bisa lebih efisien, apalagi kalau kita sudah memperhitungkan keberangkatan di pagi hari,” tambah Iin.

Dia juga menekankan bahwa kebutuhan akan JakLingko bukan hanya dirasakan oleh ASN, tetapi juga oleh pekerja swasta yang berdomisili di luar Jakarta namun bekerja di wilayah ibu kota.



“Banyak ASN dan pekerja dari wilayah seperti Pondok Gede dan Cileungsi yang bekerja di Jakarta. Mereka perlu angkutan pengumpan yang bisa mengantar ke titik-titik utama transportasi massal,” jelasnya.

Dalam pengamatannya selama dua minggu terakhir menggunakan transportasi umum, Iin mencatat bahwa waktu keberangkatan memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan

perjalanan.

Ia menyebut bahwa pukul 06.30 WIB merupakan waktu yang relatif lenggang untuk naik Transjakarta, dibandingkan dengan pukul 06.00 WIB yang biasanya lebih padat.

Sebagai catatan, wilayah Jakarta Timur berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki kepadatan penduduk tinggi serta menjadi

kawasan hunian dan bisnis yang aktif, sehingga akses transportasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dengan memperluas jangkauan JakLingko, Pemkot Jakarta Timur berharap dapat meningkatkan efisiensi perjalanan harian warga serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. ●

TAHUN DEPAN KALTIM SWASEMBADA PANGAN

Kalimantan Timur siap bersinergi dan berakselerasi menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kaltim sangat antusias menyambut program swasembada pangan ini dengan kesiapan untuk bersinergi dan berakselerasi dengan pemerintahan pusat," kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, pada Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Optimalisasi Lahan Bersama Menteri Pertanian di Markas Kodam VI Mulawarman, Kamis, 8 Mei 2025.

Rudy menjelaskan Kaltim memiliki luas tanah 127.000 kilometer persegi yang sebagian untuk tambang dan sawit.

"Di luar tambang dan sawit, masih ada ratusan ribu hektare lahan kosong yang

datangkan 30-50 persen pangan dari wilayah lain, khususnya dari Sulawesi dan Jawa.

"Jadi, sudah tepat dan pas sekali Bapak Mentan datang ke Kaltim," kata Harum, sapaannya.

Adapun beberapa komoditi yang masih harus didatangkan dari daerah lain di antaranya beras, daging, ayam, telur, sayur dan buah-buahan.

"Kami masih mengandalkan impor. Kalau Pak Mentan sudah datang ke Kaltim, kami jadi optimis Kaltim ke depan sudah tidak perlu impor lagi," kata Harum lagi.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan Kaltim dapat mencapai swasembada pangan paling lambat pada 2026. Target tersebut diyakini realistis dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur pertanian secara maksimal.

"Insya Allah kita target paling lambat tahun depan. Kalimantan Timur sudah

patan produksi pangan di Kaltim, antara lain dengan mempercepat pembukaan dan pencetakan lahan sawah baru, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta perbaikan saluran irigasi.

"Langkah pertama adalah cetak sawah kita percepat. Kemudian pupuk harus cukup, dan irigasi harus diperbaiki," katanya.

Amran optimistis, swasembada pangan di Bumi Mulawarman dapat dicapai sesuai jadwal dengan strategi yang terukur dan dukungan penuh dari semua pihak.

Saat ini, kebutuhan konsumsi beras di Kaltim mencapai 450 ribu ton per tahun. Tapi, produksi beras di wilayah tersebut hanya mampu memenuhi 200 ribu ton.

Dia menyebut akibat defisit sebesar 250 ton di Kaltim, sehingga Benua Etam masih ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Amran juga menekankan perluasan lahan tanam melalui optimalisasi lahan tidur atau tidak produktif. Menurutnya, Kaltim memiliki potensi besar dalam hal ketersediaan lahan yang masih belum tergarap secara maksimal.

"Kami juga akan mencari lahan tidak produktif untuk mencetak sawah," katanya.

Selain memperluas lahan, peningkatan produksi juga akan dilakukan dengan mengadopsi teknologi tinggi di sektor pertanian. Penggunaan varietas unggul, mekanisasi pertanian, dan sistem irigasi modern dinilai mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

"Kami juga akan menggunakan teknologi tinggi seperti pesawat nir-awak untuk menabur benih," ujarnya.

Amran juga menyinggung keberhasilan sektor pertanian nasional yang justru mencetak rekor produksi tertinggi pada saat terjadi kondisi iklim ekstrem tahun lalu. Tantangan cuaca justru menjadi motivasi untuk berinovasi dan memperkuat daya tahan petani.

"Dengan iklim yang ekstrem justru membuat kita kuat dan cerdas. Produksinya melompat," tuturnya.

Bahkan, kualitas beras yang dihasilkan pada masa itu juga mengalami peningkatan, meski di tengah tekanan cuaca



siap dibuka untuk sektor pertanian," ujar politisi Partai Golkar itu.

Menurut Rudy, program swasembada pangan untuk Kaltim merupakan program yang tepat sasaran. Sebab, selain lahan yang luas, hingga saat ini Kaltim masih memiliki ketergantungan men-

tidak lagi membeli beras dari tempat lain," kata Amran.

Untuk mendukung pencapaian itu, Amran menyampaikan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Anggaran itu difokuskan pada berbagai upaya perce-

yang tidak bersahabat.

Amran meyakini Kaltim mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di bawah kepemimpinan kepala daerah yang memiliki visi pertanian yang kuat.

Lewat upaya terkoordinasi, Kaltim diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri, tetapi juga menjadi lumbung pangan baru di kawasan timur Indonesia.

Amran juga meminta sektor pertanian bukan hanya menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, melainkan juga sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Apalagi, kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 28,5 persen dari total angkatan kerja nasional.

"Sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar di negeri ini. Karena itu, penguatan sektor itu adalah penguatan langsung terhadap rakyat," kata Amran.

Dia menyampaikan, sektor pertanian tidak hanya penting dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga berfungsi sebagai penyokong keberlanjutan sosial melalui pembukaan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia.

Mentan menyoroti regenerasi petani serta mendorong keikutsertaan pemuda dalam program brigade pangan sebagai solusi jangka panjang.

"Pertanian adalah sektor masa depan. Saya ajak generasi muda Kalimantan Timur ikut mengelola agribisnis secara modern, terstruktur, dan menguntungkan," ujarnya.

Amran juga menegaskan peranan penyuluh pertanian di lapangan karena penyuluh merupakan ujung tombak pendamping petani dan pelaksana berbagai program strategis.

"Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian. Kami akan alihkan status mereka dari daerah ke pusat, agar lebih sinergis," ujarnya.

Selama masa transisi, Amran meminta para penyuluh tetap aktif mengawal program Optimalisasi Lahan (OPLAH), Luas Tambah Tanam (LTT), cetak sawah, serap gabah, dan Brigade Pangan.

Kaltim, menurutnya, memiliki posisi strategis dalam peta pangan nasional. Dengan luas lahan yang masih potensial

dan keberadaan IKN, Kaltim diharapkan menjadi penggerak swasembada di kawasan timur Indonesia.

"Kami targetkan Kalimantan Timur jadi lumbung pangan regional. Bahkan, bisa jadi provinsi penyuplai pangan ke daerah lain, dan juga ekspor ke negara tetangga," tuturnya.

Di Balikpapan, mentan juga menyampaikan perkembangan sektor pertanian nasional yang mencatat pertumbuhan signifikan pada triwulan

pertanian (alsintan).

"Ratusan unit alsintan telah disalurkan ke daerah-daerah termasuk Kalimantan Timur. Ada traktor tanam padi, pompa air, hingga traktor roda empat dan dua. Semua ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas," tuturnya.

Selain produksi, Amran menyebutkan serapan beras nasional juga mencatat sejarah. Dalam empat bulan pertama 2025, serapan mencapai 1,7 juta ton semuanya berasal dari hasil panen dalam



pertama 2025.

"BPS mencatat pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,52 persen, tertinggi dibanding sektor lainnya. Produksi padi naik 51,45 persen dan jagung naik 39,02 persen dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Pertumbuhan itu didukung oleh berbagai strategi nasional seperti program intensifikasi melalui OPLAH, ekstensifikasi dengan pencetakan sawah, serta modernisasi pertanian berbasis alat mesin

negeri tanpa impor.

Dia mengutip laporan Rice Outlook April 2025 dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) bahwa Indonesia menjadi produsen beras terbesar se-ASEAN, mengungguli Vietnam dan Thailand.

"Diproyeksikan produksi beras kita mencapai 34,6 juta ton tahun ini, meningkat 600 ribu ton dari perkiraan sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa sektor ini terus tumbuh tangguh," katanya. •

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran **45.000 WARGA MUBA DILINDUNGI BPJS KETENAGAKERJAAN**

Bupati HM Toha bersama Wakil Bupati Rohman berkomitmen untuk mengangkat derajat masyarakat dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Kabupaten Muba. Dengan tekad dan semangat yang kuat, mereka yakin bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan maju lebih cepat akan terwujud.

Palembang Di Musi Banyuasin, program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai diterapkan untuk melindungi pekerja rentan. Dengan inisiatif ini, sebanyak 45.000 jiwa akan mendapatkan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini merupakan bagian dari Pake Kelambu yakni Perlindungan Ketenagakerjaan, Keluarga Aman Terbantu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama pekerja rentan.

Untuk mewujudkan hal itu Pemkab Muba dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama dan rapat koordinasi pada 28 April 2025 lalu.

Kepala Dinas Sosial Muba, Ardiansyah, menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 54 Tahun 2023. Manfaat yang akan diterima oleh peserta program meliputi:

- * Santunan kematian akibat kecelakaan kerja: Rp 244 juta

- * Santunan kematian normal: Rp 40 juta
- * Biaya pemakaman: Rp 10 juta
- * Beasiswa untuk 2 anak (TK hingga perguruan tinggi): Maksimal Rp 174 juta
- * Santunan cacat tetap: Rp 56 juta
- * Perawatan medis: Tanpa batas biaya

Dari hasil verifikasi, penerima manfaat dipilih dari kategori P3KE yakni Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terdiri dari Desil 1: 12.451 jiwa, Desil 2: 24.119 jiwa, Desil 3: 8.430 jiwa

Bupati Musi Banyuasin HM Toha dan Wakil Bupati, Kyai Rohman, menegaskan-



kan bahwa program ini adalah langkah nyata pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Dia berharap semua perusahaan di Musi Banyuasin dapat berkontribusi dalam program ini untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

"Perlindungan terhadap pekerja rentan adalah fondasi penting dalam membangun keluarga yang kuat dan sejahtera," ujarnya.

Mereka berharap program ini dapat berkolaborasi bersama seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin kedepannya terus memfasilitasi seluruh pekerja yang bekerja di lingkungan perusahaan masing-masing khususnya pekerja yang rentan



Perlindungan terhadap pekerja rentan adalah fondasi penting dalam membangun keluarga yang kuat dan sejahtera.

atau pekerja non upah.

Sehingga dengan kolaborasi bersama kita dapat menekan pertumbuhan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Musi Banyuasin dengan harapan bahwa kemiskinan di Muba dapat turun 1 Digit, dengan rasa optimis dan sinergi bersama seluruh stakeholder terkait.

"Saya yakin dapat tercapai, Komitmen ini kita laksanakan bersama Bupati Musi Banyuasin HM. Toha karena merupakan bagian visi misi kami berdua menurunkan angka kemiskinan di Musi Banyuasin menuju Muba Maju Lebih Cepat," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel, Muhyidin, menekankan pentingnya mencapai universal coverage untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan program ini, Pemkab Musi Banyuasin diharapkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan, dengan partisipasi yang meningkat hingga 58.24% pada tahun 2025.

Dengan adanya program Pake Kelambu, diharapkan seluruh masyarakat Muba dapat mengawasi dan mendukung keberlangsungan program perlindungan sosial ini demi kesejahteraan bersama.

"Hari ini kita saksikan bersama telah tercover 45.000 jiwa warga Masyarakat Musi Banyuasin yang rentan telah tercover BPJS, melebihi target kami. Kami mengapresiasi komitmen Pemkab Musi Banyuasin dibawah komando Bupati

Dimana saat ini sebanyak 34.887 warga Muba kini tercover dalam program perlindungan sosial kematian. Masing-masing menerima santunan sebesar Rp 3.000.000 per jiwa. Meski tampak kecil namun memiliki makna besar dalam memberikan dukungan kepada mereka yang berduka.

Bupati Muba Toha Rohman menegaskan bahwa program asuransi kematian ini lebih dari sekadar bantuan fi-



Musi Banyuasin HM Toha dan Wakil Bupati Kyai Rohman yang telah melindungi pekerja rentan di daerahnya tercover BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya

34.887 Warga Muba Tercover Asuransi Kematian

Dalam sebuah langkah nyata menuju kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat komitmennya dalam pengentasan kemiskinan menuju kemakmuran. Di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman, warga Muba tercover dalam berbagai perlindungan sosial.

nansial dan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap warganya dan upaya berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kami ingin program ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Mari bersama wujudkan Muba yang lebih maju dan sejahtera, dengan target menekan angka kemiskinan hingga 1 digit ungkap Bupati.

Bupati Toha berharap berbagai santunan sebagai bentuk komitmen Pemkab Muba untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, memastikan bahwa tidak ada warga yang terabaikan dalam perlindungan sosial. •ADV

Terobosan di Bidang Pendidikan

ANAK SEKOLAH DI MUBA DAPAT SERAGAM GRATIS

Semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pembab Muba) untuk terus memacu peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Bumi Serasan Sekate.

Bupati Muba, HM Toha dan Wabup Rohman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu ber-

tiga Memorandum of Understanding (MoU) penting, yaitu:

MoU dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Perjanjian kerjasama dengan Unsri dalam penyelenggaraan kelas kerjasama program Magister Pendidikan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muba, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik.

MoU dengan PT Digital Gasing Edukasi dalam implementasi program peningkatan kualitas pendidikan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kemudian ada juga bantuan bea-

ma dengan nilai pendidikan hingga Rp 63,3 juta.

9.534 Anak Sekolah Dapat Seragam Gratis

Kebahagiaan dan semangat pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin semakin lengkap dengan pemberian bantuan berupa tas dan seragam sekolah gratis kepada 9.534 anak sekolah untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan SMP di seluruh Kabupaten Muba.

Bantuan ini diharapkan dapat meredakan beban orang tua dan memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar sekaligus menjadi terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Ke-



saing di era global.

Sebagai wujud komitmen nyata, Pemkab Muba melakukan langkah strategis dengan menandatangani

siswa pendidikan hingga S3. Salah satu penerima bantuan program S3 Berprestasi tersebut adalah Gerry Uta-

budayaan Kabupaten Muba, Dr H. Iskandar Syahrianto, menambahkan bahwa penandatanganan MoU dan

pemberian bantuan beasiswa maupun seragam gratis merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Muba dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Kebijakan yang dilakukan Bupati HM Toha dan Wabup Rohman ini juga tentunya dapat menurunkan beban orangtua siswa dalam bidang pendidikan.

“Tujuannya semua ini untuk mewujudkan visi dan Misi Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Kyai Rohman,” ungkapnya.

Komitmen Wujudkan Muba Maju Lebih Cepat

Bupati Muba HM Toha bersama Wabup Rohman sendiri telah menegaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Muba telah menetapkan lima prioritas daerah, 15 program prioritas, dan 14 proyek strategis yang akan menjadi fokus pembangunan tahun 2026.

Dalam upaya mewujudkan visi “Muba Maju Lebih Cepat,” berbagai program unggulan terus digulirkan seperti Program Keluarga Maju yang dirancang untuk memberdayakan keluarga kurang mampu, dan Program BASANAK (Bantuan Sayang Anak) sebagai langkah konkret dalam penanganan stunting, seragam gratis untuk anak sekolah, perlindungan bagi pekerja rentan serta asuransi jiwa..

Bupati Toha menegaskan terhadap komitmen Pemkab Muba dalam pengentasan kemiskinan, dengan target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit, yaitu 9,93%, serta memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sejalan dengan target nasional dan provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,270. Untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Pemkab Muba juga fokus pada pengembangan pendidikan melalui program unggulan Sekolah Gratis, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis untuk meringankan beban orang tua siswa.

“Semoga apa yang kita rencanakan bersama ini dapat terwujud dan mem-

bawa kemajuan bagi Kabupaten Musi Banyuasin,” pungkas Bupati Toha.

Di sisi lain masyarakat Muba juga sangat antusias terhadap program-program pro rakyat yang akan segera ditindaklanjuti Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman.

Tagline “Muba Maju Lebih Cepat” dinilai bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membawa perubahan yang positif

kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.

3. Pendidikan Berkualitas. Program beasiswa dan pelatihan untuk guru akan diimplementasikan untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas dan siap bersaing.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Dukungan terhadap UMKM dan pengembangan sektor pertanian untuk menciptakan lapangan kerja



bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dimana program pembangunan yang menjadi fokus Bupati HM Toha dan Wabup Rohman adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan menjadi prioritas utama untuk mendukung mobilitas warga dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai layanan.
2. Pelayanan Kesehatan yang Optimal. Memperkuat fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan medis untuk memastikan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Keterlibatan Masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai kunci sukses, dengan ruang dialog untuk mendengar aspirasi warga.

Untuk itu Bupati H M Toha dan Wakil Bupati Rohman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam mewujudkan visi ini. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, mereka percaya bahwa Muba dapat melangkah lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik. ●



NIKMATNYA MIE ONGKLOK KULINER KHAS WONOSOBO

Tidak hanya dikenal dengan wisata memikat dengan keindahan alamnya, Wonosobo Jawa Tengah juga dikenal dengan ragam kuliner khas mengugah selera.

Salah satu sajian yang paling ikonik dan menjadi daya tarik wisata kuliner Wonosobo adalah Mie Ongklok.

Nama "ongklok" berasal dari alat atau cara memasak mie ini, yaitu menggunakan "ongklok" semacam saringan bambu kecil yang digunakan untuk

mencelup dan merebus mie serta sayuran di air panas. Gerakan mencelupkan ini disebut "di-ongklok".

Mie Ongklok berbeda dari mie pada umumnya karena memiliki kuah yang sangat khas dan unik. Dengan bahan utama mie kuning basah, kol (kubis), dan daun kucai.

Kuah kentalnya terbuat dari campuran kaldu, tepung kanji, ebi (udang kering), bawang putih, dan rempah-rempah khas. Kuah ini kental dan lengket, mirip seperti kuah loh mie.

Mie Ongklok juga kadang disajikan dengan tambahan bumbu kacang di atasnya. Biasanya disajikan dengan sate sapi, tempe kemul (tempe goreng tepung khas Wonosobo), dan kerupuk.

Bagi pencinta makanan tradisional, menjelajahi tempat makan Mie Ongklok di Wonosobo adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan.

Setiap kedai memiliki racikan rahasia dan cita rasa unik yang membuat setiap suapan terasa istimewa.

Cita rasa gurih-manis khas Jawa Tengah terasa kental dalam semangkuk Mie Ongklok, menjadikannya pilihan sempurna bagi wisatawan yang ingin mencicipi warisan kuliner otentik daerah pegunungan ini.

Di tahun 2025, popularitas Mie Ongklok terus meroket, tidak hanya di kalangan wisatawan lokal, tapi juga menarik perhatian para food vlogger dan pecinta kuliner dari berbagai daerah.

Beberapa tempat makan Mie Ongk-





lok kini menjadi rujukan utama berkat konsistensi rasa, pelayanan yang ramah, dan suasana khas yang menggambarkan keramahan warga Wonosobo.

Kuliner Mie Ongklok Terpopuler di Wonosobo 2025

Berikut, lima lokasi Mie Ongklok terpopuler di Wonosobo tahun 2025 yang wajib kamu coba saat berkunjung.

1. Mie Ongklok Longkrang

Salah satu warung legendaris di Wonosobo yang tak pernah sepi pengunjung. Mie Ongklok di sini memiliki kuah kental dan aroma ebi yang kuat. Tekstur miennya kenyal, disajikan dengan sate sapi yang empuk dan tempe kemul hangat.

Mie Ongklok Longkrang ini berada di Jalan Pasukan Ronggolawe No. 14, Longkrang, Wonosobo

2. Mie Ongklok & Sate Pak Muhadi

Rasa khas Mie Ongklok di tempat ini berpadu sempurna dengan sate sapi yang dibakar dengan bumbu kacang legit. Lokasinya strategis di pusat kota dan mudah dijangkau wisatawan.

Mie Ongklok & Sate Pak Muhadi ini beralamat di Jalan T Jogonegoro / Jl. A. Yani No. 1, Wonosobo

3. Mie Ongklok Bu Umi

Warung sederhana tapi penuh rasa.

Kuah mie ongkloknya tidak terlalu kental, tetapi kaya rempah, cocok untuk kamu yang suka rasa ringan dan segar. Ditambah sate dan tempe goreng yang gurih.

Alamat Mie Ongklok Bu Umi ini ada di Jalan Masjid No. 11, RT.01 RW.14, Kaurman Utara, Wonosobo

4. Mie Ongklok Pak Tugi

Meski lokasinya berada di perbatasan Wonosobo-Banjarnegara, kedai ini punya banyak pelanggan setia. Miennya dibuat sendiri dan disajikan dengan potongan kol segar dan sate sapi yang khas.

Mie Ongklok Pak Tugi ini berada di Jalan Raya Semampir, Banjarnegara (Seberang MTsN 1 Banjarnegara)

5. Mie Ongklok Pak Yadi

Berlokasi dekat Hotel Parama, tempat ini cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati Mie Ongklok setelah jalan-jalan di pusat kota. Kuahnya kental, gurih, dan kaya rasa bawang.

Alamat Mie Ongklok Pak Yadi ini berada di Jalan Ahmad Yani, dekat Hotel Parama, Wonosobo

Mencicipi Mie Ongklok di berbagai sudut kota Wonosobo bukan sekadar makan, tapi juga menyelami budaya lokal yang hangat dan penuh cita rasa.

Jika kamu sedang merencanakan perjalanan ke Wonosobo, pastikan salah satu dari lima tempat makan di atas masuk dalam daftar kunjunganmu. ●



LIBURAN ANTIMAINSTREAM KE KAWAH SIKIDANG DIENG WONOSOBO

Kawah Sikidang di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, merupakan salah satu destinasi wisata alam paling menarik di Indonesia.

Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, kawah ini mudah diakses dan hanya berjarak sekitar 2,6 km dari pusat kawasan

Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan Dataran Tinggi Dieng bertahun-tahun lalu dan berada di tanah yang datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara.

Secara geologis, Kawah Sikidang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dari letusan gunung berapi purba di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kawah ini merupakan bagian dari kaldera besar yang terbentuk ribuan tahun lalu akibat

Sampai saat kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap empat tahun sekali membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu bau asap cukup menyengat dan disarankan untuk menggunakan masker.

Keunikan utama Kawah Sikidang terletak pada sifatnya yang “melompat-lompat” atau berpindah tempat dalam area seluas sekitar 4 hektare.



wisata Dieng. Kawah ini menawarkan kombinasi unik antara fenomena geologi aktif dan kisah legenda yang menarik, menjadikannya tujuan favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

letusan Gunung Prahua Tua.

Fenomena geotermal seperti semburan gas, lumpur panas, dan uap belerang masih aktif hingga kini, menciptakan lanskap yang dramatis dan menarik untuk diamati.

Fenomena ini terjadi karena aktivitas geotermal di bawah permukaan yang menyebabkan titik-titik semburan berpindah lokasi setiap beberapa tahun sekali.

Nama “Sikidang” berasal dari kata

"kidang" dalam bahasa Jawa, yang berarti kijang. Menurut legenda setempat, Kawah Sikidang terkait dengan kisah Pangeran Kidang Garungan, seorang pangeran yang memiliki tubuh manusia namun berkepala kijang.

Ia melamar seorang putri cantik bernama Shinta Dewi. Namun, sang putri menolak dengan syarat agar pangeran menggali sumur dalam semalam. Saat pangeran tengah menggali, sang putri dan pengawalnya menimbun lubang tersebut, mengubur pangeran hidup-hidup.

Dari tempat itulah muncul kawah yang mendidih, yang kini dikenal sebagai Kawah Sikidang.

Daya Tarik Utama Kawah Sikidang Fenomena Kawah "Melompat"

Nama "Sikidang" berasal dari kata

dan lumpur berpindah-pindah.

Akses Mudah dan Lanskap Unik

Berbeda dengan kebanyakan kawah yang berada di puncak gunung, Kawah Sikidang terletak di area datar, memungkinkan pengunjung untuk melihat langsung aktivitas vulkanik seperti semburan gas dan lumpur panas dari jarak dekat.

Jembatan Kayu

Pengunjung dapat menyusuri jembatan kayu sepanjang 1.150 meter yang mengelilingi kawah, memberikan sudut pandang yang aman dan menarik untuk menikmati pemandangan serta berfoto.

Aktivitas Wisata Menarik

Merebus Telur di Air Panas: Pengun-

Berfoto dengan Latar Belakang Eksotis: Lanskap kawah dengan asap putih dan lumpur meletup menjadi latar yang menarik untuk fotografi.

Paket Wisata Terpadu

Tiket masuk ke Kawah Sikidang biasanya sudah termasuk akses ke kompleks Candi Arjuna dan Candi Bima, menawarkan pengalaman wisata yang lebih lengkap dalam satu kunjungan.

Harga tiket masuknya berkisar antara Rp20,000 hingga Rp30,000 yang bisa berubah sesuai musim liburan.

Tips Aman berkunjung ke Kawah Sikidang:

- Gunakan masker atau penutup hidung dan mulut karena aroma belerang di lokasi ini cukup kuat.
- Pengunjung disarankan untuk



"kidang" (kijang dalam bahasa Jawa), menggambarkan perilaku kawah yang seolah-olah "melompat" atau berpindah lokasi setiap beberapa tahun.

Fenomena ini terjadi karena aktivitas geotermal di bawah permukaan tanah yang menyebabkan titik keluarnya gas

pengunjung dapat merebus telur di kolam air panas alami, sebuah pengalaman unik yang menjadi daya tarik tersendiri.

Wisata Kuliner: Di sekitar kawah terdapat warung-warung yang menawarkan makanan khas Dieng seperti tempe kemul dan mie ongklok.

berhati-hati karena area di lokasi cukup licin dan berbahaya.

Jika kamu berencana ke Dieng, Kawah Sikidang wajib masuk dalam itinerary karena menawarkan keindahan alam yang langka dan pengalaman geowisata yang mendalam. •



MAFIA SEPAKBOLA, MASIH ADA TAPI SULIT DIBUKTIKAN

Menjelang berakhirnya BRI Liga 1 Indonesia, situasi dunia sepakbola Indonesia terasa memanas. Ada berbagai tudingan yang disampaikan terutama soal permainan dari mafia sepakbola di Liga Indonesia. Mereka meyakini praktik permainan kotor itu masih ada meski agak sulit dibuktikan.

PSSI sendiri meminta bukti nyata kalau tudingan adanya mafia di sepakbola Indonesia. Namun hingga kini semua itu masih dugaan meski bagi sebagian pemain di Liga Indonesia sangat merasakan keberadaannya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap kritik yang sempat dilontarkan bek legiun asing PSM Makassar, Yuran Fernandes, terkait kualitas sepak bola nasional.

Bahkan orang nomor 1 di PSSI itu juga geram mengeluarkan pernyataan sambil sarankan agar sang pemain hengkang dari Liga Indonesia jika memang sudah tak nyaman.

Sebelumnya, Yuran Fernandes memang sempat menulis unggahan panas di instastory nya yang memancing reaksi publik di tanah air.

Ungkapan tersebut, diakuinya sebagai kekecewaannya terhadap golnya yang dianulir Wasit Nendi Rohaendi saat melawan PSS pada 3 Mei lalu.

"Sepakbola di Indonesia hanya candaan ... Makanya level dan korupsinya akan tetap sama"

"Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia, Jika Anda ingin Bermain Sepakbola Serius, menjauhlah dari Indonesia."

Yuran kemudian malah menghapus unggahannya tersebut dan mengklarifikasi dan meminta maaf dengan postingan tersebut pada Senin (5/5).

"Ungkapan tersebut sama

sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara,"

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk tidak menyalahkan unggahan saya ke dalam konteks yang lebih luas,"

Beri Teguran dan Sanksi

PT Liga Indonesia Baru (LIB) memberikan teguran resmi kepada Klub PSM Makassar atas perilaku pemainnya, Yuran Fernandes, yang dinilai menjelekkan PSSI, LIB, serta citra sepak bola nasional.

Unggahan Yuran tersebut dianggap mengandung tuduhan serius tanpa dasar yang dapat berimplikasi hukum serta bertentangan dengan nilai-nilai

dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional.

Terutama dalam masa transformasi dan pertumbuhan positif saat ini.

"Ya, sikap tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen semua pihak yang tercantum dalam Participating Team Agreement (PTA), Regulasi Liga 1 2024-2025, dan Kode Disiplin PSSI 2023," tulis PT LIB dalam laman resminya.

Dalam surat bernomor 695/LIB-COR/V/2025 yang dikirimkan kepada manajemen PSM Makassar, PT LIB meminta agar Yuran Fernandes segera melakukan klarifikasi.

"LIB juga akan meneruskan laporan pelanggaran ini kepada Komite Disiplin PSSI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tulisnya lagi.

LIB menegaskan bahwa seluruh elemen klub, termasuk manajemen, pemain, dan ofisial, wajib menjunjung tinggi etika profesional.

"Mematuhi regulasi kompetisi Liga 1 2024-2025, serta memelihara integritas demi menjaga kualitas kompetisi nasional," tulisnya.

Tidak itu saja, Ketum PSSI, Erick Thohir juga sempat melontarkan rasa geramnya.

"Tapi kalau dia menyesali, ya jangan main di Indonesia. Main saja di luar negeri. Jangan cari makan di sini, berkarier di sini, jelek-jelekin Liga Indonesia,"

"Kecuali kalau dia ada bukti. Kalau ada bukti dia bilang, oh wasit dibayar, pemain ini dibayar, ini dibayar, kami tangkap,"

"Tetapi saya meminta liga (LIB) juga bertindak keras





kepada liga dan pemainnya atau saya tindak liganya," tegasnya.

Meski sudah mengklarifikasi, proses hukum tetap berjalan. Yuran harus mengikuti sidang Komdis PSSI.

Dari hasil sidang Komdis PSSI tersebut, bek PSM, Yuran Fernandes dikenakan sanksi berupa larangan bermain sepakbola selama 12 bulan, diwajibkan membayar denda Rp. 25 juta.

Bek asal Tanjung Verde ini dianggap melanggar Pasal 59 Ayat 2 Kode Disiplin PSSI 2023.

Sanksi diberikan kepada Yuran Fernandes buntut kritiknya terhadap sepak bola Indonesia melalui Instagram Storynya @yur4nfernandes pada Sabtu (3/5/2025). •

DRAWING LIGA 4 YANG MENCURIGAKAN

Beberapa waktu lalu dunia sepakbola Tanah Air sempat diwarnai drama panas. Drawing Liga 4 jadi sorotan usai muncul dugaan kecurangan saat Dessy Arfianto membuka bola undian di bawah meja bikin publik curiga, netizen langsung bereaksi!

Drawing Liga 4 sempat menuai curiga dan emosi yakni Dessy Arfianto selaku pihak yang mengambil bola di drawing Liga 4 yang terlihat settingan meminta maaf kepada PSSI yang dinilai tidak profesional dan kurang transparan. Kejadian ini dinilai merusak semangat fair play dan kepercayaan terhadap kompetisi sepak bola nasional.

Asprov PSSI Jawa Timur turut menanggapi polemik drawing Liga 4 tersebut. Ketua Asprov, Ahmad Riyadh, mengonfirmasi adanya permintaan maaf dari Dessy Arfianto.

"Pihak Asprov PSSI Jatim sudah mengonfirmasi bahwa tidak ada maksud apapun dari saudara Dessy Arfianto selaku Deputi Sekjen PSSI dan ketua Asprov PSSI DIY, dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Jadi memang ada gangguan kesehatan dan keterbatasan pada tangannya dan tidak bisa berkegiatan di atas meja". ujar Ahmad Riyadh.

"Dan kami juga mengapresiasi langkah Pak Erick Thohir yang meminta mengulang proses drawing Liga 4 terse-

but," imbuh Ahmad Riyadh.

Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, geram atas kejadian tersebut dan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kompetisi Liga 4, termasuk proses undian yang sempat menuai kontroversi.

culnya nama-nama tim seperti Persewangi Banyuwangi, Papua Tengah, Jawa Timur 4, dan Jawa Barat 2.

Kecurigaan memuncak ketika salah satu kertas undian terlihat berbeda, diduga bukan berasal dari bola undian yang seharusnya.



"PSSI mengevaluasi total, tidak hanya proses drawing-nya, tetapi juga keseluruhan sistem kompetisinya," tegas Erick.

Kegaduhan ini bermula saat pengundian babak 64 besar Liga 4 yang digelar Kamis lalu dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube PSSI TV.

Khususnya pada saat pengisian Grup N, publik dibuat curiga dengan mun-

Erick Thohir, menjelaskan akan ada hukuman kepada panpel drawing Liga 4 yang menuai kontroversial. Ia ingin hal-hal serupa tak kembali terjadi di kemudian hari.

"Kami sudah rapat Exco. Kami mereview total, tidak hanya drawingnya, tapi juga sistem kompetisinya. Ini yang kami lakukan," kata Erick Thohir di Jakarta. •

KINERJA WASIT JADI SOROTAN

Meski hingga kini belum bisa dibuktikan secara nyata adanya mafia di sepakbola Indonesia, penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade mengaku tahu 2 sosok mafia itu sehingga ia meminta Ketum PSSI Erick Thohir untuk menyingkirkannya.

"Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola di Indonesia," kata Andre Rosiade dilansir dari instagram pribadinya
"Untuk itu mari dimulai dengan meny-

ini juga meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mengawasi wasit di akhir musim BRI Liga 1 2024/2025.

"Pak Erick Thohir tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi," ujar Andre dilansir dari akun Instagram pribadinya.

"Jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan," katanya menambahkan.

"Berantas mafia sepak bola. Jangan sampai kalah sama mafia," imbuah Andre.

Lapor Adanya Kecurangan

Sebelumnya Andre Rosiade, dan jajaran manajemen Kabau Sirah datang langsung ke Kantor PT Liga Indonesia Baru (LIB), Sudirman, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan sebuah laporan perihal adanya kecurangan dari wasit saat memimpin laga melawan PSIS Semarang.

Liga 1 2024/2025 di Stadion H Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, Kamis (17/4/2025).

Dalam laga itu, Semen Padang menang dengan skor 3-2 atas PSIS. Tiga gol Semen Padang dicetak oleh Firman Juliansyah, Muhammad Ridwan, dan Tin Martic.

Sedangkan dua gol PSIS dilesatkan oleh Septian David Maulana dan Sudi Abdallah.

Nah, Andre Rosiade kesal karena wasit menganulir dua gol Semen Padang ke gawang PSIS. Dua gol yang dianulir itu dilesatkan oleh Bruno Gomes dan Cornelius Stewart.

"Kami sudah kirim email ke Komite Wasit PSSI dan hadir langsung ke kantor PT LIB soal ketidakpuasan kami atas kepemimpinan wasit saat laga Semen Padang melawan PSIS Semarang."

"Ada dua gol kami yang dianulir wasit," kata Andre Rosiade kepada awak media

"Kami meneliti gol pertama yang dinyatakan offside oleh wasit. Dari pihak kami bahwa ada momen satu sisi garis putih lapangan yang seharusnya lurus tapi sengaja dimiringkan."

"Terlihat seperti dipaksa dan memaksakan bahwa pemain kami offside," kata Andre Rosiade.

"Gol kedua juga dianulir padahal posisi wasit itu melihat secara langsung dan menyatakan play-on. Tapi tiba-tiba setelah terjadi gol, wasit melakukan cek VAR dan menilai adanya pelanggaran," kata Andre Rosiade.

Meski mendapatkan tiga poin, Andre Rosiade harus tetap melaporkan ini kepada PSSI dan PT LIB.

"Kami tentu saja harus mengadukan ketidakpuasan ini kepada PT LIB selaku orang tua asuh klub-klub Liga 1 agar bisa dievaluasi dan diproses," kata Andre Rosiade.

Andre Rosiade padahal sudah sangat memuji kehadiran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI.

Namun, ia sangat tidak suka dengan adanya orang-orang yang mau memperkeruh suasana, terutama di Liga 1



ingkirkan 2 orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P. Hampir semua elit PSSI tahu ini. Ditunggu aksi bersih-bersihnya pak Erick Thohir," tulisnya..

Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade

Kata Andre Rosiade, wasit tersebut berusaha keras agar Semen Padang tidak mendapatkan tiga poin dalam pertandingan tersebut.

Perlu diketahui, Semen Padang menjamu PSIS pada pekan ke-29

ERICK THOHIR : KALAU ADA BUKTIKAN SAJA

Apa yang disampaikan Andre Rosiade ini mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Dia menjawab tuduhan dari penasihat Semen Padang, Andre Rosiade terkait unggahan Andre di akun Instagram pribadinya.

Erick Thohir meminta Andre untuk membuktikan tudingannya. Apalagi, Semen Padang juga baru menang tiga kali berturut-turut di BRI Liga 1 2024/2025.

"Begini, kalau emang ada, buktikan. Kan kita nggak boleh saling menuduh. Saya lihat perjuangan dari tim-tim itu kan masih bersaing sampai hari ini," ujar Erick

Thohir kepada wartawan.

"Dan saya lihat, saya senang juga ketika Semen Padang menang tiga kali. Artinya, kan mereka juga berusaha main. Saya yakin kan Pak Andre juga enggak nyogok, orang dia menang timnya," katanya menambahkan.

"Jadi, hal-hal seperti ini ya, saya rasa ini era demokrasi, lumrah, terbuka kritik dan saran, dan saya rasa LIB juga menerima kritikan itu," ucap Erick Thohir.

"Dan yang penting tadi kita yang penting terus mendorong sepak bola ini lebih sehat," lanjut Erick Thohir.

"Untuk tim-tim yang sedang di tangga-tangga degradasi, ya harus berjuang satu dengan lainnya. Tidak mudah, saya tahu," kata Erick Thohir

"Saya akan pastikan, kalau ada hal-hal yang diisukan match fixing, selama ada black and white-nya, selama ada buktinya, ya pasti akan ada kami tindak. Cuma kalau hanya asumsi-asumsi, ya sulit."

"Tapi kami, saya sendiri sudah membuktikan tidak ada campur tangan yang seperti itu," tambah Erick Thohir.



2024/2025.

"Liga 1 musim ini jauh lebih baik dari pada musim-musim sebelumnya tapi memang belum sempurna."

"Harapan kami dari kejadian ini bisa lebih baik lagi dan disempurnakan oleh PT LIB. Jadi kami berharap ada evaluasi kepada wasitnya," tutup mertua Pratama Arhan itu.

Isu Tim Degradasi

Penasihat tim Semen Padang, Andre Rosiade juga mengungkapkan soal persaingan lolos degradasi di antara tim-tim Liga 1 musim ini. Menurutnya, ada isu tim-tim yang terdegradasi sudah diatur.

"Ada isu yang berkembang bahwa ada klub-klub yang diatur akan terdegradasi. Misalnya, contoh, ini isu ya, bisa benar, bisa salah. Misalnya PSIS bisa terdegradasi karena ada Persijap Jepara [promosi Liga 1 musim depan], mereka sesama Jawa Tengah," ucap Andre usai pertemuan dengan PT LIB.

"Ada isu PSS akan degradasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yog-

jakarta (promosi). Lalu, nanti Semen Padang bisa degradasi karena ada penggantinya dari Sumatera, yaitu Bhayangkara FC yang akan home base di Lampung. Seperti itu isu yang berkembang," lanjutnya.

Kendati demikian, Andre Rosiade berharap isu tersebut tidak benar adanya.

la ingin PT LIB dan PSSI menyiapkan perangkat pertandingan dengan baik, sehingga laga bisa berjalan adil.

"Untuk itu, kita jangan terjebak dengan sebuah isu. Caranya, PT LIB menyiapkan perangkat pertandingan yang fair. Sehingga, hasilnya bisa diterima dengan lapang dada," ucap Andre. ●





PASAR KERJA NASIONAL TIDAK BAIK-BAIK SAJA

Tingkat pengangguran diperkirakan naik mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sejak 2023 hingga awal 2025 juga cenderung meningkat dibandingkan masa sebelum pandemi, menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Sebelum pandemi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT menunjukkan tren menurun secara bertahap, dari 5,50 persen pada Februari 2016 menjadi 5,33 persen pada 2017, 5,13 persen pada 2018, dan 5,01 persen pada 2019. Pada Februari 2020, TPT turun menjadi 4,94 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 6,93 juta orang.

Namun, Covid-19 yang melanda dunia pada 2020 membawa dampak besar terhadap pasar tenaga kerja. TPT melonjak tajam pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen, dengan jumlah penganggur meningkat drastis menjadi 8,75 juta orang.

Setelah itu, kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap. Pada Februari 2022, TPT menurun menjadi 5,83 persen dengan

8,40 juta penganggur, lalu turun lagi menjadi 5,45 persen pada 2023 (7,99 juta orang menganggur), dan 4,82 persen pada 2024 (7,20 juta orang menganggur).

Data terkini, per Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen meskipun jumlah penganggur sedikit meningkat menjadi 7,28 juta orang. BPS menyatakan, pada periode ini, TPT penduduk kelompok umur 15-24 tahun merupakan yang tertinggi, mencapai 16,16 persen. Sementara TPT penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah, yaitu 1,67 persen.

Kondisi TPT menurut kelompok umur seperti itu memiliki pola yang sama sejak Februari 2023. Dibandingkan Februari 2024, hanya kelompok umur 60 tahun ke atas yang mengalami kenaikan TPT, yaitu 0,53 persen.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada

2025 akan mencapai 5 persen. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang sebesar 4,9 persen.

IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik ke depannya. Pada 2026, misalnya, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 persen.

Situasi itu sejalan dengan jumlah pekerja yang mengalami PHK. Berdasarkan paparan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin, 5 Mei 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK sejak 2023 hingga Januari-April 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi, terutama jika ditarik hingga ke 2016.

Pada 2016, jumlah pekerja yang terkena PHK sesuai data yang dihimpun Kemenaker dari berbagai dinas ketenagakerjaan mencapai 33.609 orang. Setelah itu, jumlahnya turun menjadi 32.246 orang pada 2017, kemudian 27.687 orang pada 2018, dan 18.911 orang pada 2019.

Saat pandemi Covid-19 pada 2020, angka PHK melonjak menjadi 386.877 orang. Jumlahnya turun menjadi 127.085 orang pada 2021 dan kembali turun menjadi 25.114 orang pada 2022. Selanjutnya, pada 2023, angkanya meningkat menjadi 64.855 orang, lalu 77.965 orang pada 2024. Adapun pada periode Januari-23 April 2025, total pekerja yang terkena PHK tercatat mencapai 24.036 orang.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, berpendapat, ada tiga faktor yang memengaruhi dua situasi tersebut. Faktor pertama, perekonomian dunia dan dalam negeri sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan sejak 2019 karena dipicu pelemahan ekonomi beberapa negara maju.

Faktor kedua ialah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dalam negeri berantakan. Dampak paling terasa dialami industri menengah kecil. Bob menyebut, banyak di antara mereka tidak bisa bertahan. Konsekuensinya, ada pergeseran angkatan kerja ke sektor pertanian.

Faktor ketiga ialah perkembangan politik ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina sejak 2022 diikuti perang da-

gang Amerika Serikat (AS)-China.

Ketiga faktor tersebut, menurut Bob, dirasakan di seluruh dunia. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana.

"Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam," kata Bob di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

pengamatannya, ada perusahaan yang melakukan PHK diam-diam. Ada pula yang sudah mengurangi karyawan dan melapor ke dinas tenaga kerja, tetapi data pekerja yang dilaporkan tidak sesuai dengan realitas.

Di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya. Daya saing industri ini telah menurun. Saat pandemi, sek-



Kendati demikian, Bob menekankan masih ada faktor lain yang memicu sebuah perusahaan melakukan PHK. Misalnya, internal perusahaan melakukan transformasi dan mengalami masalah struktural manajemen berkepanjangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, meyakini, korban PHK yang sesungguhnya lebih besar dibandingkan yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja. Berdasarkan

tor tersebut mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tidak ada order. Produktivitas turun sampai 80 persen.

Ketika pandemi usai, sejumlah pelaku industri TPT tidak mampu memulihkan diri. Mereka tidak sanggup melunasi utang. Pada saat bersamaan, order juga semakin turun seiring dengan melemahnya perekonomian di banyak negara serta dampak tensi perdagangan global.

Tiga Jurus

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut kondisi pasar tenaga kerja nasional menghadapi tantangan berat akibat ketidakpastian ekonomi. Guna menghadapinya, Kementerian Ketenagakerjaan sedikitnya menyiapkan tiga jurus.

Pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Tugas ini berada di berbagai kementerian teknis. Kemenaker akan secara aktif bersilaturahmi, berdiskusi, dan mendorong ke arah tersebut.

Salah satunya ialah Kementerian Pertanian. Mengacu ke laporan Kead-
aan Ketenagakerjaan Indonesia Feb-
ruari 2025 dari BPS, ada penambahan
hampir 900.000 pekerja di sektor per-
tanian dari Februari 2024 ke Februari
2025 ataupun dari Agustus 2024 ke
Februari 2025.

Kementerian teknis lainnya yang
diajak silaturahmi dan diskusi
ialah Kementerian Per-
industrian. Masih
mengacu ke lapo-
ran BPS yang
sama, di sektor
akomodasi dan
makan minum
masih ada
penambahan
370.000 pekerja
dari Februari
2024 ke Februari
2025 dan 210.000
pekerja dari Agustus
2024 ke Februari 2025.

Kemenaker
j u g a

sedang memetakan supaya terban-
gun sistem yang lebih baik mengenai
informasi pasar kerja, termasuk lowon-
gan pekerjaan.

"Sebenarnya, setiap perusahaan
wajib lapor ketenagakerjaan. Cuma be-
lum optimal. Nah, ini (pendataan) yang
kami kejar supaya terintegrasi dengan
platform Siap Kerja," ucap Yassierli.

Jurus kedua adalah program pelati-
han kerja yang menggabungkan
pembelajaran praktis dengan pengala-
man kerja langsung atau apprenticeship. Kompetensi dan keterampilan
yang disasar menyangkut teknologi
digital yang berguna untuk masa
depan.

Jurus ketiga ialah program kewirau-
sahaan. Sejauh ini, program akan di-
masukkan ke satuan pendidikan tinggi
sehingga angkatan kerja muda yang
telah lulus memiliki keterampilan wirau-
saha. Kemenaker akan berkolab-
orasi dengan Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi.

Ketua Bidang Ke-
tenagakerjaan Apindo,
Bob Azam, berang-
gapan, untuk men-
gatasi persoalan
tersebut, Pemerintah
Indonesia semestinya
bisa kembali menggel-
ontorkan insentif bagi
industri dan konsumsi
masyarakat, seperti saat
pandemi, pere-
konomi-

an domestik tetap bergerak karena
pemerintah memberikan sejumlah in-
sentif. Namun, seusai pandemi, karena
adanya tuntutan defisit APBN yang
harus di bawah 3 persen, insentif di-
hentikan.

"Beberapa negara masih menjalan-
kan insentif yang mereka buat saat
pandemi Covid-19 karena mengantisi-
pasi pelemahan ekonomi," ujarnya.

Usulan solusi lainnya, pemerintah
perlu membuat pendanaan khusus
untuk pelatihan keterampilan kerja.
Pemerintah Singapura, misalnya, men-
etapkan program pendanaan bagi an-
gkatan kerja berusia 40-an tahun untuk
meningkatkan keterampilan. Dana itu
langsung cair ketika kelompok pekerja
tersebut terkena PHK.

Dia juga mengusulkan pemerintah
melakukan pemfokusan ulang ter-
hadap perekonomian domestik. Mis-
alnya, program Kartu Prakerja yang
dananya besar sebaiknya diarahkan
kembali untuk pelatihan kerja seutuhn-
ya.

"Program pembangunan yang
sifatnya tidak urgen bisa ditunda
untuk pembangunan sumber daya
manusia. Kebijakan menambah pe-
masuk pajak itu kontradiktif di
tengah pelemahan ekonomi seperti
sekarang," kata Bob.

Presiden KSPN, Ristadi, menambah-
kan, di tengah situasi isu pengangu-
ran dan PHK meningkat, cara pandang
pemerintah semestinya mengutama-
kan penyerapan tenaga kerja dalam
negeri.

Pemerintah bisa mulai dengan men-
gupayakan langkah penyelamatan
industri TPT berorientasi pasar domes-
tik serta industri TPT yang berjualan di
pasar luar negeri tetapi kalah saing.

Pekerja Informal Dominan

Porsi pekerja informal di Indo-
nesia menunjukkan tren pertum-
bahan yang fluktuatif selama
periode Februari 2016 hingga
Februari 2025. Kendati demiki-
an, pekerja informal tetap
mendominasi struk-
tur ketenagakerjaan
dibanding formal.

Berdasarkan data
BPS, sebelum pan-

demografi Covid-19, yakni pada Februari 2016, porsi pekerja informal mencakup 58,28 persen dari total penduduk bekerja. Angka ini naik tipis menjadi 58,35 persen pada Februari 2017. Kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 58,22 persen pada 2018, lalu 57,27 persen pada 2019, dan mencapai titik terendah pada 2020 dengan 56,64 persen.

Namun, pada Februari 2021, terjadi lonjakan signifikan porsi pekerja informal menjadi 59,62 persen yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 menjadi 59,97 persen dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 60,12 persen.

Setelah itu, porsi pekerja informal kembali menurun menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Kemudian, porsinya naik tipis pada Februari 2025 menjadi 59,40 persen.

Kenaikan porsi pekerja informal pada Februari 2025 dibanding Februari 2024, secara khusus, didorong oleh meningkatnya jumlah pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,95 juta orang), pekerja dengan status berusaha sendiri (0,88 juta orang), dan pekerja bebas di non-pertanian (0,54 juta orang).

"Kondisi ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh perekonomian. Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang biasanya di atas 5 persen, sekarang pada triwulan I-2025 di bawah itu atau tepatnya 4,87 persen, maka akan sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang berkualitas," ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, Rabu, 7 Mei 2025.

Teguh mencoba mengelaborasi faktor yang mendukung porsi pekerja informal pada Februari 2025 mendekati angka pada Februari 2021 yang kala itu masih ada pandemi dan di atas angka sebelum pandemi Covid-19.

Jika dilihat lebih detail, terdapat penurunan porsi penduduk bekerja yang bekerja penuh waktu dari 68,07 persen pada Agustus 2024 menjadi 66,19 persen pada Februari 2025. Penurunan orang yang bekerja penuh waktu akan dibarengi dengan kenaikan orang yang bekerja paruh waktu

(dari 23,94 persen pada Agustus 2024 menjadi 25,81 persen Februari 2025) dan sedikit kenaikan di tingkat setengah pengangguran (dari 7,99 persen pada Agustus 2024 menjadi 8 persen pada Februari 2025).

Itu artinya, orang yang terkena PHK dari pekerjaan penuh waktu akan berusaha keras untuk tetap hidup dengan mengambil pekerjaan paruh waktu. Dengan kata lain, orang yang bekerja di sektor formal dan terkena PHK akan berpindah ke sektor informal supaya

ucapnya.

Mengenai latar belakang siapa yang pindah sektor informal, jika menggunakan acuan periode Agustus 2024 ke Februari 2025, Teguh menyebut banyak pekerja dari sektor industri pengolahan, konstruksi, pengangkutan dan pergudangan; serta aktivitas keuangan dan pertambangan mengalami penurunan jumlah. Selain itu, apabila dilihat dari data Februari 2024 ke Februari 2025, jumlah pekerja sektor jasa pemerintahan juga mengalami penu-



bisa bertahan hidup.

Data BPS menunjukkan, orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan 1,02 juta dari Februari 2024 ke Februari 2025, tetapi menurun signifikan sebesar 2,07 juta dari Agustus 2024 ke Februari 2025.

"Maka, kalau dibaca dengan periode Agustus 2024 ke Februari 2025, terjadi peningkatan porsi pekerja informal dari 57,95 persen menjadi 59,40 persen,"

runan.

Efisiensi yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah pekerja pada sektor jasa pemerintahan. Industri pengolahan sedang tertekan karena gejolak pasar global dan penurunan daya beli masyarakat. Adapun penurunan pekerja pada sektor konstruksi disebabkan dunia swasta masih wait and see kebijakan Presiden Prabowo Subianto. •

DANANTARA DAN ANJLOKNYA PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun ini bisa tidak mencapai target karena dividen dari 65 BUMN sebagian akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Gerindra, menyatakan dividen BUMN untuk 2025 sebesar Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. Sementara, sisanya Rp200 triliun untuk investasi melalui Danantara.

Tahun ini, dividen BUMN yang disetor ke negara ditarget mencapai Rp 90 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 85,5 triliun.

Dividen BUMN selama ini merupakan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang langsung masuk ke PNBPN dalam APBN. Dengan adanya Danantara nanti, dividen tersebut akan dikelola oleh badan investasi yang diresmikan

menjadi bagian dari Danantara Indonesia. Menurut Rosan, konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Konsolidasi juga merupakan amanat langsung dari penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Rosan, seluruh perencanaan ini telah melalui tahap konsolidasi secara bertahap. Terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

"Mengenai aset bisnis model innovation, nilainya kini telah mencapai USD982 miliar dan angka ini meningkat dari sebelumnya yang berkisar USD95-100 miliar," katanya.

Seiring pengalihan pengelolaan dividen BUMN ke Danantara, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada kuartal I 2025 sebesar Rp115,9 triliun, anjlok 26,04 persen dibandingkan tahun lalu Rp156,70 triliun.

"PNBP ini sampai dengan Maret 2025 telah mencapai Rp115,9 triliun yang artinya sekitar 22,6 persen dari target PNBPN secara keseluruhan Rp513,6 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran, Suahasil Nazara, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Kamis, 8 Mei 2025.

Suahasil mencatat, komponen kekayaan negara yang dipisahkan dalam PNBPN anjlok 74,6 persen pada kuartal I 2025 menjadi Rp10,88 triliun. Angka ini baru mencapai 12,1 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp90 triliun.

Suahasil menjelaskan, penurunan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan disebabkan oleh dividen BUMN mulai dialihkan ke Danantara. "Sampai Maret 2025 tidak terdapat tambahan setoran PNBPN KND, mengingat telah ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, maka setoran dividen BUMN berpindah ke BPI Danantara," ujar Suahasil.

Pada Januari 2025, Kemenkeu hanya menerima setoran dividen interim dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)



Prabowo 24 Februari 2025.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan perusahaan pelat merah telah menyetorkan dividen ke Danantara, meski enggan menjelaskan secara rinci terkait berapa jumlah dividen yang disetorkan.

Ketua Umum PSSI ini juga ogah menjabarkan BUMN mana saja yang telah menyerahkan dividen ke Danantara. Erick mengatakan, rincian tersebut dapat ditanyakan ke pimpinan Danantara, Rosan Roeslani.

Kepala Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini tercatat 844 perusahaan induk sekaligus anak usaha BUMN yang telah

untuk tahun buku 2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Kemenkeu masih menerima banyak setoran dividen dari perbankan.

"Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, BUMN perbankan banyak membayarkan dividen interim mencapai Rp36,1 triliun yang membuat di Januari-Maret 2024 penerimaan dividen dari BUMN sudah Rp42,9 triliun," kata Suahasil.

Suahasil juga memastikan, pemerintah telah memiliki strategi untuk menambal kas APBN yang bolong karena pengalihan pengelolaan dividen BUMN.

"Kami sampaikan beberapa extra effort, itu dimaksudkan bisa memperbaiki kepatuhan," kata dia.

Strategi pertama yakni mengembangkan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (Simbara). Ia memastikan akan ada perluasan produk tambang yang ada di dalam sistem tersebut.



Kami sampaikan beberapa extra effort, itu dimaksudkan bisa memperbaiki kepatuhan.

"Kalau Simbara dilakukan untuk nikel dan bauksit, semoga terjadi peningkatan kepatuhan dan kalau meningkat ada dampaknya kepada penerimaan," kata Suahasil.

Strategi kedua, yakni menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNPB produksi batubara sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025.

Strategi ketiga, yakni dengan melakukan optimalisasi penerimaan PNPB kementerian atau lembaga. Hal tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor imigrasi dan masyarakat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian. "Jenis PNPB-nya mereka sedang melihat. Tapi estimasi penerimaannya kaliber PNPB ratusan miliar sampai Rp1-2 triliun, bukan tiba-tiba yang terlalu besar. Tapi semoga bisa tingkatkan PNPB kita ke depan," ujar

Suahasil.

Strategi keempat yaitu optimalisasi PNPB Barang Milik Negara (BMN) Minerba untuk komoditas bauksit di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini termasuk penegakan hukum di sektor lingkungan hidup untuk sektor non SDA, termasuk joint program dengan Ditjen Pajak dan Bea Cukai berkaitan dengan kepatuhan pajak, kepabeanan, dan PNPB.

"Karena banyak PNPB ini yang eksportir tambang, ini wajib bayar, kalau dia connect kita bisa analisis, ini kita sudah melakukan connecting," kata Suahasil.

Pada dasarnya, menurut dia, strategi optimalisasi PNPB akan tercakup ke dalam empat aspek. Keempatnya, yakni perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, insentif PNPB yang terukur, serta

ini?" ujar Galih.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wijanto, berharapnya agar ada revisi Undang-Undang tentang PNPB, sehingga akan membuat pemerintah lebih leluasa untuk meningkatkan PNPB.

"UU PNPB ini bila perlu kita ubah, karena dengan UU PNPB ini, keleluasaan meningkatkan PNPB kita harapkan bisa kita tingkatkan di sini," kata Wihadi.

Menurutnya, revisi UU PNPB tersebut harus segera dilaksanakan agar penerimaan dari PNPB bisa dimaksimalkan pada tahun ini.

"Ini merupakan langkah ke depan. Secepatnya karena mohon maaf dalam hal ini akan ada perubahan PNPB karena dengan adanya KND bukan lagi masuk dalam postur APBN," tuturnya.



penguatan sumber daya dan organisasi.

Revisi UU PNPB

Komisi XI DPR mempertanyakan dampak dari pengalihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Danantara terhadap keberlangsungan kas negara. "Dengan adanya Danantara, maka KND itu menjadi nol kemungkinan. Itu bagaimana desain pendapatan kita?" Kata Wakil Ketua XI DPR, Dolfie.

Anggota Komisi XI DPR, Galih Kartasasmita, juga mempertanyakan bagaimana efek dari peralihan dividen BUMN tersebut ke Danantar, khususnya dalam menutupi target yang perlu didapatkan dalam APBN 2025. "Itu nanti nutupinnya gimana itu? Apakah nanti target 2025 masih akan tercapai dengan

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig, mendorong agar PNPB bisa dioptimalkan untuk pelebaran ruang fiskal. Pasalnya, saat ini penerimaan pajak pun sedang mengalami tekanan.

"Danantara itu akan jadi salah satu sumber yang berkurang dari pendapatan negara karena itu akan dikelola jadi pendapatan yang berbeda," ucapnya.

Salah satu komponen PNPB yang juga berpotensi bermasalah ke depan adalah terkait PNPB dari Sumber Daya Alam (SDA). Padahal sektor SDA hingga saat ini menyedotkan PNPB paling banyak.

"Jadi kenapa kita enggak buat sebuah forum rapat bahas persoalan satu item, satu fokus sehingga muncul ide-ide out of the box untuk cara apa selain SDA," imbuhnya. ●

MONOPOLI DI BALIK AKUISISI GRAB-GOTO

Kabar GoTo Gojek Tokopedia akan bergabung dengan Grab kembali mencuat sejak berhembus pada 2020. Bagaimana nasib mitra pengemudi dan konsumen dengan aksi korporasi yang bisa berujung monopoli ini?

Financial Times melaporkan pembahasan hal ini intens dilakukan sejak 2018. Para pemegang saham Grab dan Gojek disebut-sebut ingin membendung kerugian yang disebabkan oleh pertarungan mahal untuk merebut pangsa pasar.

Kedua perusahaan berbagi tumpangan alias ride hailing ini memiliki dua investor yang sama yakni SoftBank dan Mitsubishi. Kini, Grab dikabarkan segera menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi GoTo Gojek Tokopedia pada kuartal II atau April – Juni, menurut laporan Reuters.

Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, mengakui adanya pembicaraan mengenai sejumlah aksi korporasi. “Dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak,” ujar Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke BEI, Kamis, 8 Mei 2025.

Ia mengatakan, direksi telah melakukan penjajakan secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian atas penawaran yang masuk.

Koesoemohadiani mengatakan, evaluasi atas penawaran tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham. Dalam melakukan evaluasi, direksi memperhatikan berbagai aspek termasuk kepentingan mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan dan karyawan.

Ia mengatakan, sampai hari ini, belum ada keputusan yang diambil manajemen terkait tawaran yang diterima dari berbagai pihak. “Belum ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi sebagaimana telah dispekulasikan di media massa,” ujar Koesoemohadiani lagi.

Ekonom menilai, pengemudi taksi online dan ojol, serta konsumen dalam jangka panjang bisa dirugikan jika kedua perusahaan ini bersatu.

Direktur Ekonomi Digital Center of

tanya.

Alasan Grab dan GoTo Gojek dikabarkan merger merujuk pada beberapa kasus konsolidasi, Nailul memerinci motif perusahaan merger, seperti memperluas skala usaha, efisiensi biaya per unit, meningkatkan valuasi, meminimalkan risiko kebangkrutan, atau menghalangi pesaing merebut pasar.

“Saya melihat ada beberapa motif yang bisa digunakan GoTo dan Grab merger. Yang paling kuat yakni menurunkan biaya per unit layanan. Ini mung-



Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyampaikan, jika konsolidasi Grab dan GoTo Gojek Tokopedia untuk efisiensi, maka akan berdampak positif terhadap konsumen, serta driver taksi online dan ojol dalam jangka pendek.

“Harga bisa lebih murah. Potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra driver pun bisa turun,” kata Nailul, Jumat, 9 Mei 2025.

Akan tetapi, dalam jangka panjang, konsumen maupun pengemudi taksi online dan ojol akan menghadapi keterbatasan pilihan layanan. “Kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. Ini merugikan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan panjang,” ka-

kin bisa dibenarkan, dengan merger, maka ada bagian yang dikurangi termasuk biaya pemasaran,” ujar Nailul.

Akan tetapi, Nailul menilai pangsa pasar GoTo Gojek Tokopedia dan Grab sudah besar. “Jadi, ada potensi sempri-tan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, jika keduanya merger untuk memperluas pangsa pasar, sehingga menghalangi pesaing untuk berkembang dengan kekuatan pasar yang dimiliki,” ujarnya.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan, kebijakan ini berpotensi merugikan pengemudi secara signifikan.

“Jika merger ini terjadi, pengemudi yang sebelumnya bisa memaksimalkan

pendapatan lewat dua aplikasi, Grab dan Gojek, akan dipaksa hanya menggunakan satu,” kata Lily, Sabtu, 10 Mei 2025.

Menurut Lily, rata-rata mitra pengemudi memiliki pendapatan harian berkisar Rp 50-100 ribu. Jumlah itu belum dikurangi berbagai biaya operasional seperti bensin, pulsa, paket data, parkir, hingga perawatan kendaraan.

Tak hanya itu, potongan besar diberlakukan oleh perusahaan platform, yang menurut Lily bisa mencapai 30-70 persen dari setiap order yang dikerjakan. Potongan ini dinilai semakin memberatkan para pengemudi yang sejak awal sudah bekerja di bawah tekanan finansial.

Ia mencontohkan dampak nyata dari merger sebelumnya, yakni Gojek dan Tokopedia yang menjadi GoTo pada 2021. Usai merger tersebut, insentif untuk layanan pengiriman GoSend Same-day mengalami penurunan drastis.

“Sebelum merger, insentif untuk lima kali pengantaran adalah Rp10 ribu. Tapi setelah merger, tinggal Rp5.000. Untuk 10 pengantaran yang dulu dibayar Rp45 ribu, kini hanya Rp20 ribu,” katanya.

Lily juga tetap mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi taksi online dan ojol misalnya, menjadikan driver sebagai karyawan. Dengan begitu, pengemudi taksi online dan ojol bisa mendapatkan upah, upah lembur, pesangon hingga Tunjangan Hari Raya alias THR.

“Selain itu, jam kerja bisa diatur delapan jam dan ada jaminan sosial,” ujar Lily.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Driver Online, Taha Syafariel, menyoroti pentingnya perubahan regulasi yang lebih berpihak pada pengemudi, dengan ada atau tidaknya penggabungan. Ia mengaku telah memantau kabar tersebut, terlebih setelah beberapa petinggi GoTo Gojek Tokopedia mengundurkan diri.

“Semoga pemerintah mau membuat regulasi yang lebih adil saat ini, dan perusahaan siap mengikuti aturan itu nantinya,” ujar Taha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan belum menerima laporan terkait kabar Grab akan mengakuisisi GoTo Gojek pada kuartal II.

“Belum ada informasi resmi mengenai transaksi Grab dan GoTo Gojek Tokopedia tersebut,” kata Kepala Biro Humas

dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, Jumat, 9 Mei 2025.

Deswin menyampaikan belum ada pihak yang menghubungi KPPU untuk konsultasi. Oleh karena itu, KPPU belum bisa mengkaji ada tidaknya potensi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, jika Grab dan GoTo Gojek Tokopedia bergabung.

“Sebab, kami harus menilai berdasarkan penilaian atas notifikasi. Saat ini,

Grab gagal memberitahukan tentang penggabungannya dengan Uber, yang secara substansial mengurangi persaingan di Singapura.

Tahun lalu, Grab membatalkan rencana akuisisi operator taksi terbesar ketiga di Singapura, Trans-cab. CCCS mengatakan dapat mengenakan denda hingga 10 persen dari omzet bisnis perusahaan di Singapura untuk setiap tahun pelanggaran, hingga maksimum tiga tahun, jika



kami masih memantau perkembangan rumor transaksi,” katanya.

Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura (CCCS) menyampaikan pada Maret, para pihak harus mendapatkan nasihat hukum mengenai apakah usulan penggabungan tersebut mematuhi hukum persaingan di Singapura.

CCCS pada 2018 mendenda Grab dan Uber USD13 juta. Hal ini karena

perusahaan diketahui telah melanggar undang-undang persaingan.

Sumber Reuters juga menyebutkan Grab sudah menunjuk penasihat untuk menangani rencana akuisisi itu. Selain itu, perusahaan yang berbasis di Singapura ini dikabarkan sudah berdiskusi dengan sejumlah bank untuk membahas pendanaan terkait kesepakatan akuisisi. ●



MENGUJI NIAT SERIUS PRABOWO BAHAS RUU PERAMPASAN ASET

Setelah enam bulan menjabat dan berulang kali menyampaikan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut dia, undang-undang itu penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor.

Dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di kompleks Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Saat menyapa para buruh, Prabowo kembali menyampaikan komitmennya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi untuk menyejahterakan masyarakat. Ia menyinggung soal korupsi yang masih terjadi di lembaga pemerintah dan meminta pihak terkait untuk menghentikannya. Selain itu, ia juga membahas soal banyaknya aset negara yang dikuasai pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

"Gue lahir di Betawi, gue besar di

Betawi, gue ngerti mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali menjadi milik rakyat," ujar Prabowo.

Ia mengaku sudah mengerti modus yang digunakan oleh sejumlah pihak untuk menguasai aset negara. Bahkan, hal itu disebut sebagai salah satu penyebab banyak pihak tidak menginginkannya menjadi presiden.

Terkait dengan penarikan aset dan pemberantasan korupsi, Presiden pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset. Oleh karena itu, ia mendukung pembahasan rancangan undang-undang tersebut oleh pemerintah dan DPR.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyo-long enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tutur Prabowo.

Pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tuntutan buruh yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, membenarkan, pihaknya menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan banyak pihak yang menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Aturan itu dianggap dibutuhkan karena selama ini upaya pemberantasan korupsi tidak disertai dengan langkah pemiskinan koruptor sehingga banyak aset atau kekayaan negara yang tetap menjadi milik koruptor meski mereka dihukum pidana.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset, yakni pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir, surat presiden itu tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Bahkan, dalam setiap rapat paripurna, pimpinan DPR tidak pernah menyebutkannya sebagai bagian dari laporan surat yang telah masuk.

Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menggantung. DPR periode 2024-2029 bahkan tidak memasukkannya dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Pemerintah juga belum pernah memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset yang menggantung.

Menindaklanjuti pernyataan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, pemerintah sudah siap dan tinggal menunggu DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Selain memberi kepastian soal perampasan aset hasil korupsi, aturan itu juga penting guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Menurut Yusril, selain menggambarkan keseriusan pemerintah, pernyataan

Prabowo juga merupakan komitmen negara untuk tidak membiarkan aset hasil korupsi dinikmati koruptor.

Pada dasarnya, pemerintah sudah siap kapan saja untuk membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR. Apalagi, inisiatif aturan tersebut sudah diajukan ke DPR sejak 2023.

"Kapan aset yang diduga sebagai

dengan semangat pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Meski perampasan aset dilakukan secara tegas, implementasinya tetap harus menghormati asas keadilan, kepastian hukum, dan HAM.

Yusril menduga nasib RUU Perampasan Aset sama seperti RUU KUHP



hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," kata Yusril lewat keterangan tertulis, Jumat, 2 Mei 2025.

Selain itu, pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan beriringan

yang diajukan DPR pada era pemerintahan Joko Widodo. Kala itu, DPR merevisi dan menyempurnakan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membuka pembahasan dengan pemerintah.

Di sisi lain, RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UN-

CAC). Konvensi itu telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," ujar Yusril.

DPR Fokus RKUHAP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan, pihaknya

Selain agar sinkron, pembahasan RUU Perampasan Aset yang menunggu KUHAP baru diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pertimbangan ini juga berlaku untuk revisi UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami tidak menginginkan perampasan aset ini menjadi abuse of power. Jadi, setelah KUHAP, baru kita garap.



mendukung penuh pernyataan dari Presiden Prabowo terkait RUU Perampasan Aset. Namun, pembahasannya akan dilakukan setelah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) rampung dan berlaku.

"Kami ikuti arahan Pak Presiden. Cuma, kita perlu menunggu RKUHAP karena seluruh pidana itu intinya di KUHAP, dan di sana termasuk terkait perampasan aset. Jadi, RUU Perampasan Aset ini akan sinkron dengan KUHAP," ujarnya.

Kan, ada dua tuh, yang menunggu KUHAP ini. Undang-Undang Perampasan Aset, juga Undang-Undang Kepolisian. Jangan sampai UU ini digarap, terus nanti hasil KUHAP-nya lain, kan enggak sinkron," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berjanji bakal berkoordinasi dengan Komisi III DPR agar lebih cepat menyelesaikan RUU KUHAP.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan, pihaknya juga mendukung perce-

patan pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU ini perlu diselesaikan karena diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"RUU Perampasan Aset ini perlu sekali agar korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya dan dapat memulihkan kerugian negara sebesar-besarnya. Ini juga untuk memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya," paparnya.

Soedeson membenarkan aturan perampasan aset juga masuk dalam RKUHAP yang tengah dibahas di Komisi III. Namun, itu saja dianggap tidak cukup untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset tetap dibutuhkan.

"Nah, itu kan perlu diatur, dengan tujuan perampasan aset jangan sampai tidak memenuhi unsur rasa keadilan. Kalau di dalam KUHAP itu mengatakan yang disita barang hasil kejahatan dan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dalam RUU Perampasan Aset akan diatur lebih jauh tentang tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Jangan Sekadar Retorika

Sementara itu, sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sipil mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah nyata dalam mengegolkan RUU Perampasan Aset.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di hadapan peringatan Hari Buruh. Akan tetapi, kata-kata tersebut perlu diubah menjadi tindakan nyata.

"Namun, sekarang yang ditunggu adalah aksi nyata, tidak boleh berhenti di omon-omon. Aksi nyata karena bahkan dari era Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat presiden (surpres) dengan catatan meminta pembahasan prioritas dari DPR," katanya.

Secara tidak langsung, bola pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini berada di DPR. Namun, ibarat pertandingan sepak bola, bolanya tidak segera ditendang oleh DPR. Bahkan, permainan atau pembahasannya pun tidak segera dimulai.

Presiden perlu mengonsolidasikan partai-partai politik koalisinya agar RUU

Perampasan Aset bisa segera dibahas. Pertemuan dengan para ketua umum parpol itu bisa untuk mengarahkan fraksi-fraksi di DPR untuk membahasnya. Dengan mayoritas anggota parlemen mendukung pemerintahan, seharusnya tidak sulit untuk mempercepat pembahasan RUU itu.

Lebih jauh, apabila presiden mendorong pembahasan legislasi lewat konsolidasi parpol pendukung, maka langkah tersebut lebih efektif. Terbukti, dalam pembahasan sejumlah regulasi lain, seperti revisi UU TNI, dengan kehendak presiden, revisi itu bisa selesai dengan cepat.

Tak hanya itu, pada era Presiden Jokowi, pembahasan sejumlah RUU, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa selesai dengan cepat. Hal ini tak lepas dari dorongan presiden dan kondisi mayoritas anggota parlemen yang mendukung pemerintah.

"Apalagi konsolidasi elite sekarang sedang sangat bagus. Jadi, ketika presidennya memerintahkan, itu elite politik akan ikut dan bahkan akan takut. Menurut saya, presiden harus segera mengonsolidasikan parpol pendukungnya untuk mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR," ujar Zaenur.

Jika presiden merasa kesulitan untuk mencapai kesatuan pendapat atau konsensus di DPR, masih ada langkah lain yang bisa ditempuh. Hal itu, yakni dengan mengeluarkan perppu. Langkah penerbitan perppu bisa jadi solusi karena ia menengarai RUU Perampasan Aset dikhawatirkan bisa menjadi senjata makan tuan jika disahkan.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, berpandangan senada. Dukungan presiden terhadap RUU Perampasan Aset hanya berarti jika diikuti langkah konkret, jadi tak seka-

dar pidato populis. Dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo mayoritas di DPR, tidak ada alasan untuk menunda membahasnya.

"Banyak negara sudah mengadopsi non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai standar. Tanpa RUU ini, kerja sama pemulihan aset lintas negara lewat Mutual Legal Assistance (MLA) akan terus terbentur," kata Alvin.

Ia menambahkan, jika presiden benar-benar serius terhadap dukungan itu, fraksi pendukungnya di DPR perlu didorong untuk membuka pembahasan, melibatkan partisipasi publik yang ber-

makna, dan memastikan bahwa RUU tersebut tidak dibajak oleh kompromi politik.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengatakan, pernyataan dukungan Presiden Prabowo terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset akan menjadi baik jika hal itu direalisasikan, bukan sekadar retorika. Publik masih mengingat bahwa pada era sebelumnya, Presiden Joko Widodo, juga berulang kali menyatakan hal serupa, tetapi hingga akhir masa jabatannya, RUU Perampasan Aset tidak kunjung dibahas.

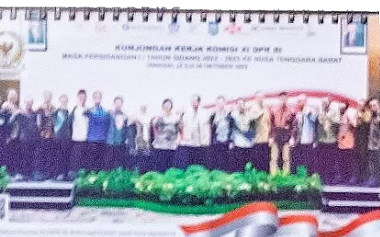
"Melempar tanggung jawab ke DPR pun dirasa tidak tepat karena untuk RUU



lain, seperti RUU TNI, pemerintah pun mampu mengoordinasikan dengan cepat, sehingga (cepat) disahkan," kata Lakso.

Selain itu, secara substansi RUU Perampasan Aset jangan sampai hanya menjadi UU yang ada secara formal, tetapi materinya banyak dikurangi dari rancangan yang ideal. Dalam RUU Perampasan Aset, salah satunya harus tetap ada mekanisme peningkatan harta kekayaan secara tidak sah.

"Presiden harus mampu menjamin bahwa secara kualitas, produk yang dihasilkan sesuai dengan cita-cita perampasan aset," ujar Lakso. • Editor: GE





SEKOLAH RAKYAT JANGAN CACAT

Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan sekolah rakyat direncanakan secara matang dan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa.

"Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang dan perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

Rabu, 30 April 2025.

Selain 53 titik awal, terdapat kemungkinan penambahan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan survei terhadap beberapa titik tambahan yang berpotensi masuk dalam program tahun ini.

Gus Ipul mengatakan, penyelenggaraan sekolah rakyat untuk keluarga miskin, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada di Desil 1.

"Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari," kata Gus Ipul.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangu-

nan sekolah rakyat di 200 titik pada tahun ini. Lokasi-lokasi tersebut berada di kabupaten, kota, atau provinsi yang memenuhi syarat seperti ketersediaan lahan, basis kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan pendukung lainnya.

"Sesuai dengan arahan Presiden untuk membangun sekolah rakyat pada tahun ini pula di 200 titik. Di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat," tegasnya.

Gus Ipul juga bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusrin Wahid, guna membantu pemerintah daerah dalam mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat.

Kemensos mengungkapkan adanya sejumlah kendala dihadapi beberapa



pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat," katanya.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

Nusron menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini. Ia menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

"Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencari lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat," kata dia.

Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, pendanaan untuk Program Sekolah Rakyat tak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga terbuka untuk dukungan dari masyarakat dan sektor swasta.

"Pasti sebagian akan berasal dari APBN. Tapi kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, tentu akan sangat membantu," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa prinsip kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan program pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk dalam inisiatif Sekolah Rakyat.

Bentuk Satgas

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membentuk Satuan Tugas (Satgas)



Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.

Pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 446/KPTS/M/2025 yang resmi berlaku sejak 11 April 2025.

"Membentuk Satuan Tugas Pem-

nasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dengan pendekatan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Satgas Sekolah Rakyat juga mensinergikan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan pelaksanaan pembangunan Sekolah

yakni Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti. Lalu, Ketua Satgas adalah Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica. Sekretaris Satgas dijabat Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis, Essy Asiah. Adapula Tim Pelaksana Dukungan Bidang.

Biaya penyelenggaraan Satgas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, serta berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada 31 Desember 2029.

Kementerian PU dalam mendukung program Sekolah Rakyat secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/ lembaga terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan dan mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi.

"Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025," kata Dody.

Dalam pelaksanaannya, penangan Sekolah Rakyat tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta.

"Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultasi," ujar Dody.

Rekrutmen Guru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan rekrutmen untuk Sekolah Rakyat yang mencakup guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, mengatakan, proses rekrutmen akan menggunakan skema aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Ke-



bangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," bunyi Kepmen tersebut.

Satgas Sekolah Rakyat bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam mengordi-

Rakyat.

Tugas berikutnya adalah memetakan, mitigasi dan menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Satgas ini akan terdiri dari Pengarah,

menterian akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain rekrutmen, Kemendikdasmen juga merancang kurikulum sekolah rakyat dengan pendekatan multi-entry multi-exit. Sistem ini memungkinkan murid untuk masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan masing-masing, tanpa harus mengikuti tahun ajaran.

"Mereka tidak harus memulai dari kelas yang sama, mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada yang mulai dari kelas 2, atau kelas 3," kata dia.

Mu'ti mengatakan, pihaknya mendesain kurikulum sekolah rakyat dengan lebih fleksibel, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan sebelumnya.

"Akan tetapi, karena semuanya itu di asrama, mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat daripada murid yang lainnya," kata Mu'ti.

Ditegaskan pula bahwa kurikulum yang diterapkan sama dengan sekolah formal.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, menyebut pemerintah akan memaksimalkan peran perguruan tinggi di setiap daerah guna membantu memastikan kesuksesan jalannya program pendidikan Sekolah Rakyat.

"Pelibatan perguruan tinggi itu pasti, nanti kami meminta pendampingan," kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan kolaborasi bersama perguruan tinggi di daerah dalam hal pelaksanaan Sekolah Rakyat bentuknya bisa beragam.

Pertama, pihaknya akan meminta perguruan tinggi menghadirkan dosen untuk mendampingi jalannya proses pendidikan di Sekolah Rakyat, khususnya jika fasilitas sekolah tersebut dekat dengan kampus.

Kedua, pihaknya akan membuka pintu luas guna menghadirkan peluang menambah pengalaman terjun langsung ke masyarakat bagi para mahasiswa.

"Nanti kami juga meminta mahasiswa supaya ikut mendampingi di situ (Sekolah Rakyat), kalau sore hari misalnya," ujar Mensos.

Kolaborasi dengan universitas ini merupakan bagian dari cermin gotong royong mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Tentu kami melihat peluang-peluang yang bagaimana bisa berjalan. Pastinya kami butuh dukungan dari kampus," kata Mensos.

Terkait tenaga pengajar dan kepala sekolah, kata dia, saat ini pemerintah sedang melakukan persiapan, termasuk mempertimbangkan beragam

tan khusus untuk guru bisa rampung dalam waktu dekat, sehingga persiapan operasional kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat cepat terlaksana.

"Sekarang guru sedang perekrutan, mudah-mudahan bulan depan selesai. Kalau untuk titik ada sekitar 53 (Sekolah Rakyat) di berbagai provinsi yang sudah siap dan sekarang sedang penambahan untuk dilakukan survei," kata Mensos.



opsi usulan yang masuk dari tingkat pemerintah daerah. Baik guru maupun kepala sekolah nantinya diupayakan yang sudah menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Insya Allah semuanya ASN, guru ini bisa PPPK penuh atau paruh waktu. Tetapi tindak lanjutnya sedang kami konsolidasikan," kata Mensos.

Dia mengharapkan proses perekrutan

Dia menambahkan, ketika periode pertama Sekolah Rakyat telah berjalan, maka pihaknya tak menutup kemungkinan keberadaan fasilitas tersebut akan mengalami penambahan.

"Ke depan, tahun 2026 mudah-mudahan sudah terbangun antara 100-200 titik sekolah baru dengan standar gedung yang telah disetujui oleh presiden," ujarnya..

STOK BERAS TERTINGGI DALAM 57 TAHUN

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim stok beras nasional saat ini mencapai 3.517.294 ton, tertinggi sejak 57 tahun terakhir, dan sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri tanpa adanya impor per awal Mei 2025.

"Stok beras tertinggi selama 57 tahun, seumur dengan saya. Ini kita bisa lihat sejak berdiri Bulog 1969 menurut informasi saya terima. Tapi yang terpenting datanya sejak 1969 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah (stok beras nasional) 3,5 juta ton," kata Amran dalam jumpa pers produksi beras nasional di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

Amran menjelaskan, cadangan beras saat ini lebih tinggi dibanding masa swasembada pangan 1984, saat penduduk hanya 100 juta lebih, sementara kini jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Kala itu, pada Mei 1984, jumlah stok beras mencapai 2.402.899 ton.

Sementara itu, bila dibandingkan periode yang sama

pada Mei 2024, jumlah stok beras secara nasional hanya mencapai 1.467.626 ton.

Dia juga menyatakan, produksi nasional meningkat tajam berkat intensifikasi lahan, pompanisasi di Pulau Jawa, dan rehabilitasi irigasi di luar Jawa yang didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, serapan gabah di tingkat petani secara harian terus berjalan maksimal di angka 50 ribu ton per hari. Dia juga optimistis stok beras nasional dapat mencapai 4 juta ton dalam waktu 15-20 hari mendatang.

Amran menegaskan, seluruh capaian itu merupakan hasil kerja keras pemerintah, kementerian teknis, dan dukungan masyarakat luas, serta menjadi bukti bahwa pertanian adalah fondasi utama kedaulatan pangan nasional.

Selain itu, ia juga mengimbau agar penyerapan gabah petani tetap memperhatikan kualitas.

"Harus jaga kualitas, pengadaan tetap jalan. Tapi jangan karena yang rusak, katakanlah 1 ton, 2 ton, ini yang mengganggu proses pengadaan beras. Itu enggak boleh. Tapi kami tekan, perhatikan kualitas. Itu mutlak," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton.

"Angka ini meningkat 1,89 juta ton atau 11,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

BPS, Pudji Ismartini, Jumat, 2 Mei 2025.

Pudji mengatakan, perkiraan

tersebut sejalan dengan produksi padi sepanjang Januari-Juni 2025, yang diprediksi mencapai 32,57 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 3,27 juta ton GKG dibanding periode Januari-Juni 2024.

Adapun tiga provinsi dengan total produksi padi GKG tertinggi pada Januari-Juni 2025 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pudji juga menyebut, pada Maret 2025, luas panen padi sebesar 1,67 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebanyak 8,93 juta ton GKG atau meningkat 2,98 juta ton dibandingkan Maret 2024.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi pada Maret 2025 diperkirakan mencapai 5,15 juta ton, meningkat 1,71 juta ton atau 49,90 persen dibandingkan produksi pada Maret 2024 yang sebanyak 3,43 juta ton.

Dia menuturkan potensi produksi beras sepanjang April-Juni 2025 diproyeksikan mencapai 10,15 juta ton, turun 1,04 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.

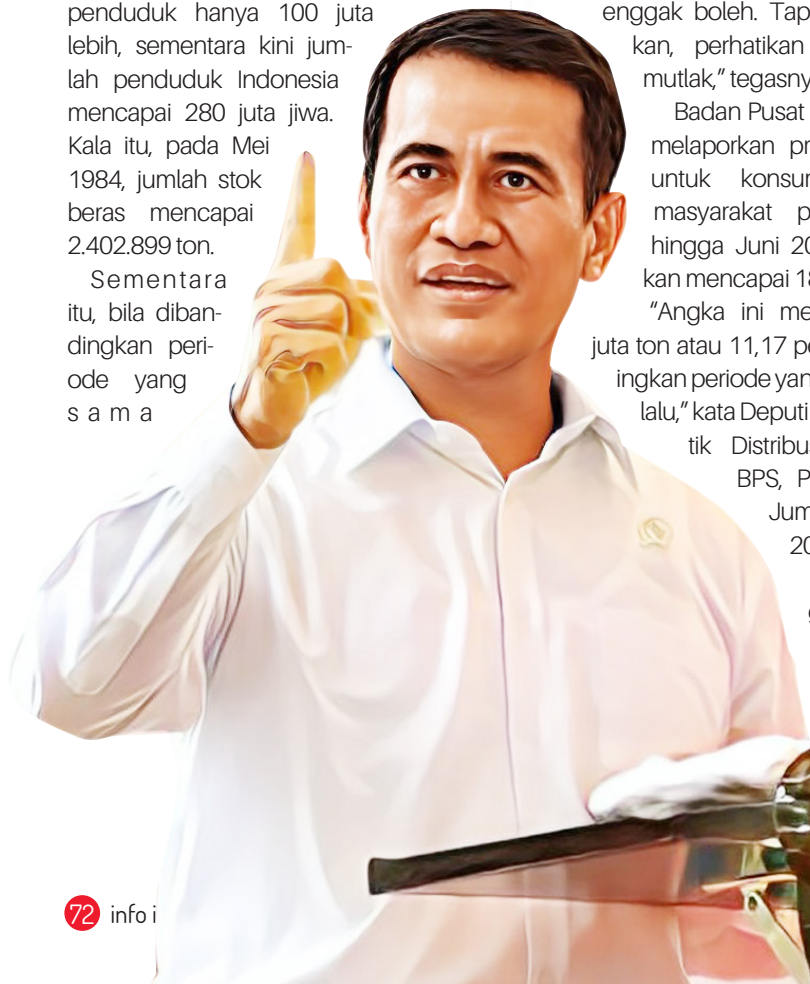
"Dengan demikian, produksi beras Januari-Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton," katanya.

Mentan sebelumnya meyakini produksi beras nasional dapat mencapai 34 juta ton tahun ini atau melampaui target nasional sebanyak 32 juta ton.

"Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada yang ditargetkan pemerintah," kata Amran, Sabtu, 26 April 2025.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada 2025 dan menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Amran mengatakan produksi dan serapan beras mengalami peningkatan signifikan di sektor pangan nasional, khususnya dalam hal keterse-



diaan stok beras yang menjadi capaian tertinggi dalam 23 tahun.

"Saat ini, stok kita hampir mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan pada malam ini sudah mencapai angka tersebut. Jika tidak ada kendala ke depan, dalam 20 hari paling lambat, stok kita akan mencapai 4 juta ton. Saat ini, stok kita adalah yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Ini adalah angka tertinggi," kata Mentan.

Amran mengatakan tingkat serapan beras Indonesia juga menunjukkan tren positif. Dalam satu bulan terakhir, serapan beras nasional mencapai 1 juta ton, sementara total serapan dari Januari hingga April 2025 telah menembus angka 1,7 juta ton.

"Biasanya, dalam 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton. Angka serapan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan di Indonesia," ujar Mentan.

Sesuai data USDA, Indonesia mencatatkan angka produksi beras yang jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Produksi beras Vietnam diprediksi mencapai 26,5 juta ton, Thailand 20,1 juta ton, Filipina 12 juta ton, Kamboja 7,37 juta ton, Laos 1,81 juta ton, dan Malaysia 1,75 juta ton.

"Sesuai dengan data dari USDA, produksi kita diprediksi mencapai 34,6 juta ton. Angka ini meningkat signifikan dari 30 juta ton, yang menunjukkan kenaikan yang luar biasa," jelas Mentan.

Tambah Gudang

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 25 ribu gudang darurat atau yang disebutnya gudang improvisasi untuk menampung produksi jagung dan beras nasional yang melimpah pada tahun ini.

Berdasarkan laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, gudang-gudang yang dikelola Perum Bulog dan pemerintah kini tidak cukup menampung produksi jagung dan beras itu.

Prabowo menjelaskan gudang darurat tersebut bersifat sementara sampai gudang yang dibangun melalui Koperasi Desa Merah Putih rampung.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang di dalamnya terdapat gudang dan ruang pendingin (cold stor-

age) ditargetkan mulai dibangun dalam tiga sampai empat bulan mendatang di 80 ribu desa.

"Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Tiap desa akan punya pendingin, cold storage,

hasil panen petani dan nelayan dapat didistribusikan ke pasar maupun offtaker, seperti Perum Bulog.

Menteri Pertanian sebelumnya menyebutkan Perum Bulog menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 1,1



panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan, tidak akan puso, tidak akan rusak karena terlambat dikirim ke pasar," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa juga diupayakan memiliki truk agar produksi

juta ton untuk menampung tingginya produksi beras nasional.

Berdasarkan proyeksinya, Amran menilai tingkat serapan beras menunjukkan tren yang positif. Total serapan beras dari Januari hingga April 2025 telah menembus angka 1,7 juta ton. ●

INDONESIA JADI UJI COBA VAKSIN TBC BILL GATES

Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, menyatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global memberantas Tuberkulosis (TBC), dengan ditunjuknya dua lokasi uji coba vaksin penyakit tersebut.

Dalam kunjungannya ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025, Bill Gates menyampaikan Indonesia menjadi lokasi uji coba vaksin TBC, selain Afrika

negara-negara maju sudah tidak lagi mengalami beban penyakit ini. Padahal, jutaan orang di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berisiko tinggi tertular dan mengalami komplikasi serius akibat TBC.

Oleh karena itu ia menilai pentingnya dukungan terhadap riset vaksin dan distribusinya secara merata. Bill Gates menyebut kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan alat kesehatan yang lebih adil dan merata, terutama bagi negara-negara yang paling terdampak.

Ia menambahkan kerja sama dengan Indonesia tidak hanya berhenti di pengujian, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif inovasi kesehatan, termasuk penguatan sistem diagnosis dan pengo-

eliminasi TBC. Salah satunya melalui dukungan Gates Foundation.

Uji klinik ini salah satunya dilaksanakan di lokus daerah Jakarta Timur. Hingga akhir 2024 vaksin tersebut telah menunjukkan efikasi sebesar 50 persen dalam uji klinik fase 2b.

Uji klinik fase 3 ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih kuat mengenai efektivitas dan keamanan vaksin, serta mendukung percepatan eliminasi TBC di Indonesia pada 2030, serta memenuhi kebutuhan global.

Presiden Prabowo Subianto pun memuji komitmen Gates Foundation mengenai pengembangan vaksin untuk penyakit TBC dan malaria.

"Kami sangat menantikan terobosan



dan India.

Vaksin TBC menjadi salah satu fokus utama Gates Foundation karena penyakit ini masih banyak menyerang negara-negara berpenghasilan rendah, sementara perhatian dan pendanaan global terhadap riset TBC sangat terbatas.

Menurut Bill Gates, rendahnya perhatian terhadap TBC disebabkan karena

batan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan jumlah pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India, dengan estimasi 1.060.000 kasus dan 134.000 kematian per tahun.

Indonesia tengah melakukan uji klinik fase 3 untuk vaksin TB M72/AS01E sebagai bagian dari upaya percepatan

dalam penanganan malaria dan TBC, yang saya rasa tidak akan terlalu lama lagi tercapai," kata Prabowo saat pertemuan dengan Bill Gates di Istana.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan, ada tiga alasan Indonesia tertarik menjadi lokasi uji klinik fase ketiga vaksin TBC yang diinisiasi Gates Foundation.

Pertama, pemerintah dapat mengeta-

hui kecocokan vaksin tersebut dengan masyarakat Indonesia. Sebab, efikasi juga ditentukan oleh faktor genetik penerima vaksin.

Kedua, Indonesia bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin TBC. Dalam uji coba ini, pengembangan vaksin TBC melibatkan ilmuwan dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia.

Terakhir, ketika menjadi lokasi uji coba, Indonesia bisa bernegosiasi agar vaksin TBC diproduksi di Indonesia. Produksi vaksin bisa dilakukan lebih cepat di Bio Farma. Mengingat, kasus tuberkulosis di Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta kasus, sehingga membutuhkan vaksin lebih cepat dalam jumlah banyak.

"Produksi vaksin minimal 10 kali lipat agar bisa memastikan orang-orang tidak tertular," kata Budi.

Adapun uji klinis fase ketiga merupakan tahap akhir untuk pengujian suatu vaksin. Sebelumnya sudah dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan, khasiat, dan manfaat dari vaksin yang dikembangkan. Pengujian antara lain sudah dilakukan pada skala laboratorium, pada hewan uji, dan pada manusia dengan jumlah terbatas.

Dari hasil uji klinis fase 2B sebelumnya, vaksin TBC M72/AS01E yang diinisiasi Gates Foundation menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tingkat perlindungan dari infeksi bakteri penyebab TBC hingga 50 persen selama tiga tahun pada orang usia dewasa. Pada uji klinis fase ketiga ini diharapkan tingkat perlindungan yang dihasilkan bisa lebih tinggi.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan, vaksin tuberkulosis yang baru dibutuhkan karena vaksin tuberkulosis yang sudah ada sebelumnya hanya efektif untuk anak-anak. Vaksin tuberkulosis BCG ditemukan pada 1921, sehingga penemuan untuk vaksin baru diperlukan.

"Vaksin BCG sebelumnya memiliki efektivitas utama hanya untuk anak-anak saja. Jadi, patut kalau sekarang dibuat vaksin baru yang jauh lebih efektif," ujarnya.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalucia, menyebutkan, Indonesia aktif melaku-

kan riset vaksin TBC di kancah global.

"Alhamdulillah, Bapak Menteri karena keaktifan beliau di dunia internasional, beliau menjadi co-chair dalam TB Vaccine Accelerator bersama Menteri Kesehatan Brazil," kata dia pada akhir Maret lalu.

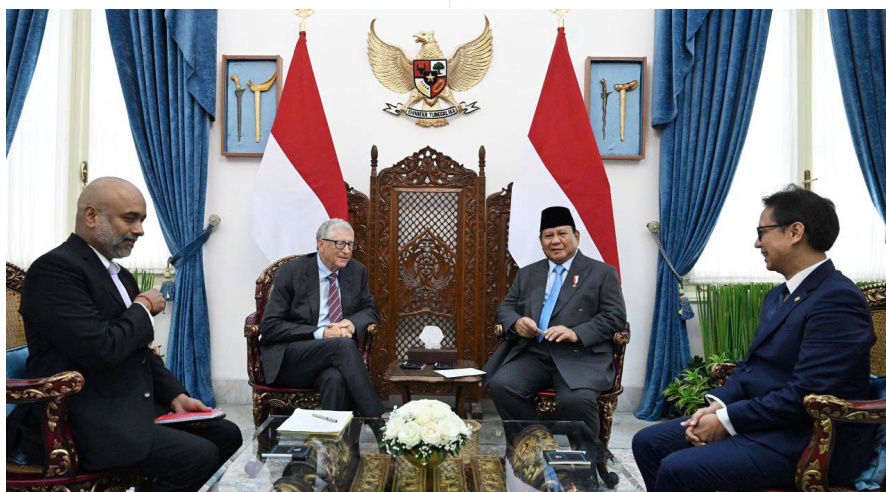
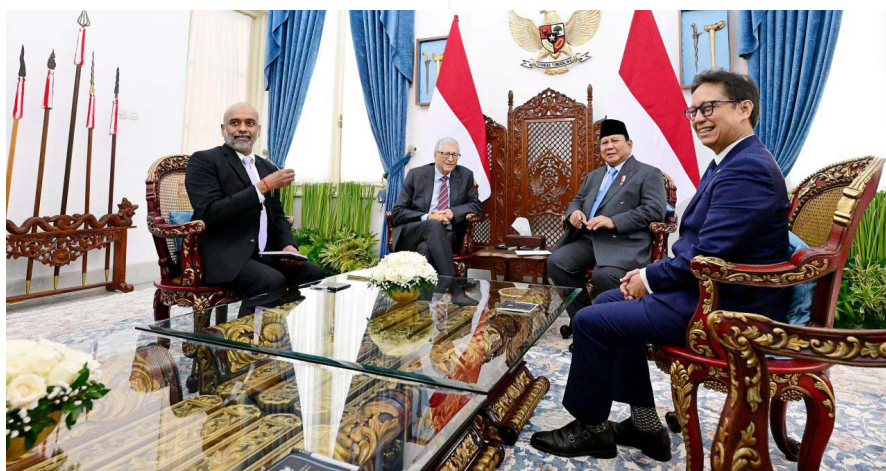
Rizka menjelaskan langkah tersebut salah satunya ditandai dengan komitmen Indonesia sejak 2023, di mana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan TB Vaccine Accelerator Council untuk memfasilitasi pengembangan dan akses yang adil terhadap

mengambil bagian dalam uji klinik ini, di mana Indonesia menargetkan 2.000 orang untuk berpartisipasi dalam uji klinik "Vaksin TB M72".

"Kita menjadi satu-satunya site uji klinik yang ada di Asia bersama dengan negara-negara lain yang juga ada yaitu di Afrika Selatan dan di Afrika," ujarnya.

Dia berharap, uji klinik dapat selesai pada 2028 dan vaksinasi dapat mulai digencarkan pada 2029 kepada khalayak umum untuk mengentaskan kasus TB dari Indonesia.

Pengentasan TB dari Indonesia men-



vaksin TB baru, serta mendorong koordinasi dalam mencapai tantangan dan pengembangan vaksin TB.

Saat ini terdapat berbagai macam kandidat vaksin TB yang sedang masuk dalam tahap uji klinik, baik di global maupun di Indonesia, di mana Indonesia menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan vaksin, dengan mengikuti program uji klinik "Vaksin TB M72".

Sebanyak 1.800 orang juga telah

jadi salah satu program pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB.

Pada tahun ini, tingkat insiden TB di Indonesia berada pada 388 per 100.000 penduduk dengan kematian 49 per 100 ribu penduduk. Angka itu diharapkan berubah menjadi 163 per 100 ribu penduduk dan tingkat kematian yang menurun hingga 75 persen pada 2025. •

SIAPKAN 20.000 RUMAH BAGI PAHLAWAN DEVISA

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Tahun ini akan disediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI.

"Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini," kata Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, saat peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis, 8 Mei 2025.

Menurut Karding, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai "pahlawan devisa" bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

"Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya," ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian PKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah

bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

"Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional," kata Karding.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke Tanah Air.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan



Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Menurut Karding, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil," ucap Karding.

Karding menyebutkan program 20.000 rumah subsidi untuk PMI akan menyasar di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI, seperti di Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah-daerah itu menjadi fokus kita (dalam program rumah untuk PMI), termasuk Banten dan Jakarta," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perumahan Kementerian PKP, Imran, memastikan, peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembayarannya sesuai peraturan yang berlaku.

"Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi," kata Imran.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan telah merumuskan penyesuaian ambang batas pendapatan bagi PMI di luar negeri demi memastikan mereka bisa mengakses fasilitas rumah bersubsidi khusus PMI.

Menurutnya, apabila tidak disesuaikan, PMI tidak bisa mendapat rumah subsidi.

"Jika dikonversi ke rupiah, pendapatan mereka bisa jadi melampaui batas maksimal syarat bisa membeli rumah subsidi," kata Amalia.

Untuk itu, pihaknya memutuskan menjadikan wilayah Jabodetabek sebagai referensi, yang angkanya di rentang Rp12-14 juta.

"Selanjutnya kami hitungkan paritas daya beli antara di Indonesia dan negara penempatan migran," ujarnya.

Untuk menyetarakan nilai Rp14 juta yang menjadi ambang batas tersebut ke ringgit Malaysia, misalnya, pihaknya mengonversikan dengan nilai konversi paritas daya beli (PPP) antara Indonesia dan Malaysia.

"Maka, didapatkan standar sebesar Rp14 juta tersebut setara dengan sekitar 3.000-an ringgit Malaysia," ucap Amalia.

BPS juga telah mengalkulasi nilai pendapatan maksimal oleh PMI di enam negara tujuan penempatan lainnya berdasarkan paritas daya beli. Hasil penghitungan tersebut akan menjadi dasar penentuan kriteria rumah subsidi bagi PMI di negara tersebut.

Amalia menyambut kerja sama yang

sebagai bank global yang hadir untuk masyarakat Indonesia di penjuru dunia. Selama ini BNI cabang luar negeri sudah cukup sering berinteraksi dengan para PMI. Hingga saat ini, tercatat 390 nasabah BNI merupakan PMI dengan jumlah nilai tabungan sekitar Rp2,3 triliun.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyebutkan, banyaknya jumlah tabungan nasabah BNI dari kalangan PMI itu patut diapresiasi.

"Jadi luar biasa PMI ini. Sehingga perlu kiranya pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada mereka. Dalam hal ini kita sediakan rumah yang nyaman dan layak untuk mereka," katanya.



intensif antara pihaknya dan Kementerian P2MI serta Kementerian PKP dan BP Tapera dalam mewujudkan rumah subsidi bagi PMI.

Apalagi, "pahlawan devisa" itu telah menyumbangkan remitansi hingga sebesar Rp253,3 triliun pada 2024. Hal ini menunjukkan peran signifikan mereka dalam menggerakkan ekonomi nasional.

"Semoga program ini dapat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pahlawan devisa kita," kata Kepala BPS.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menyampaikan nota kesepahaman tersebut merupakan sinergi bersama dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi PMI melalui Program BP Tapera dan KPR Sejahtera.

Selain itu, sebagai wujud nyata BNI

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan, melalui skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, BP Tapera dan para mitra kerja menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan para PMI dan keluarganya.

"Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri," ujar dia.

Pada peluncuran program Rumah untuk PMI di Subang itu, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI.

Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring di antaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan. ●



PEMILU DAN PILKADA SERENTAK PENYELENGGARA KEWALAHAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui desain keserentakan Pemilu dan Pilkada membuat penyelenggara kewalahan. Perlu ada evaluasi agar tahapan pemilu dan pilkada tidak berimpitan.

KPU berharap hal ini menjadi bagian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menilai, jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ada saat ini terlalu berdekatan. Akibatnya, penyelenggara kewalahan melaksanakan tahapan yang ada.

"Desain keserentakan ini membuat kami ngos-ngosan. Sengketa pemilu belum selesai, kami sudah harus lari mem-

bahas pilkada," ujar Afifuddin dalam diskusi Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Mei 2025.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, KPU membutuhkan waktu sekitar 20 bulan untuk mempersiapkan pemilihan presiden dan anggota legislatif. Begitu pemilu selesai, KPU harus menghadapi berbagai gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Dalam waktu bersamaan, KPU juga harus menyiapkan pilkada, termasuk memastikan ketersediaan anggaran di tiap-tiap daerah.

Afif pun mengusulkan agar ada jeda setidaknya selama 1,5 tahun di antara pemilu dan pilkada. Jeda tersebut penting agar beban kerja penyelenggara tidak menumpuk dan publik tidak bingung dalam membedakan proses dan aturan di antara kedua kontestasi itu. Hal ini juga perlu diikuti dengan antisipasi masa jabatan gubernur dan wakil guber-

nur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

"Tentu kalau ada jarak ini akan berhadapan dengan situasi akhir masa jabatan kepala daerah. Bagaimana ini disinkronkan dengan masa jabatan kepala daerah ataupun transisi penjabat kepala daerah," ujarnya.

Afif menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan keserentakan. Namun, ia berharap ke depan ada peninjauan serius terhadap tahapan yang padat agar sinkron dengan masa jabatan pejabat publik, termasuk potensi kekosongan jabatan atau penunjukan pejabat sementara.

Menurut Afif, hampir semua model penyelenggaraan pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Mulai dari sistem proporsional terbuka, tertutup, hingga kombinasi. Adapun desain keserentakan memunculkan sejumlah tantangan, di antaranya beban administratif dan logistik yang luar biasa besar, serta persoa-

lan hukum yang kerap muncul dalam sengketa pemilihan.

Affif juga mengkritik ketidaksiapan anggaran pilkada yang masih mengandalkan pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengusulkan anggaran pilkada bersumber dari APBN untuk menjamin kelancaran dan netralitas.

"Dari pengalaman ini, saya melihat lebih baik pilkada diselenggarakan menggunakan APBN. Kalau dibebankan pada daerah, dinamika politik daerah berat. KPU jadi berat bergerak," kata Affif.

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan, DPR belum mengambil keputusan terkait bentuk, skema, ataupun rentang waktu ideal antara pemilu dan pilkada. Saat ini, fokus DPR masih berada pada tahapan mitigasi terhadap berbagai masalah empiris yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

"Fase kita sekarang adalah diskursus mitigasi masalah. Jangan langsung lompat ke keputusan soal sistem, skema, atau jarak waktu antara pemilu dan pilkada. Mitigasi masalah-masalah yang nyata di lapangan ini saja belum tuntas," ujar Khozin.

Ia menekankan pentingnya penyusunan peta persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara dan peserta pemilu agar solusi yang diambil nantinya benar-benar menyentuh akar permasalahan. Salah satu sorotan utama DPR adalah lemahnya sistem pengawasan dan penindakan dalam proses pemilu.

Khozin juga menyoroti lemahnya norma hukum yang berlaku saat ini karena masih bersifat normatif dan multitafsir. Contohnya soal politik uang yang hingga kini tidak memiliki definisi dan batas waktu yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

"Ada tafsir beragam soal politik uang. Apakah disebut politik uang terkait jumlahnya, waktu terjadinya, atau konteksnya? Kalau dilakukan satu menit sebelum masa kampanye, ada yang menganggap boleh," kata dia.

Menurut Khozin, perumusan norma substantif yang lebih jelas dan tegas harus menjadi bagian integral dari pembenahan sistem kepilwuan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, ada penurunan temuan pelanggaran pemilu antara 2019

dan 2024. Pada 2019, terdapat 18.995 temuan kasus dan laporan 4.506 kasus. Sedangkan, pada Pemilu 2024, terdapat 1.134 temuan kasus dan laporan 3.411 kasus.

Dalam hal kasus yang dinyatakan pelanggaran pemilu juga menurun dari 18.564 pada 2019 menjadi 1.459 kasus pada 2024. Sebanyak, 2.578 kasus pada Pemilu 2019 dinyatakan bukan pelanggaran. Sementara, pada pemilu 2024, sebanyak 1.349 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

"Pelanggaran pemilu meliputi administratif, kode etik, tindak pidana, dan

Kaka mencontohkan kondisi di Indonesia pasca-Pemilu 2019, ketika media sosial memainkan peran besar dalam memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat politik partisan.

"Media sosial sudah sangat partisan, soal buzzer bagaimana mengaturnya? Sulit. Belum ada pendekatan hukum yang kuat, sementara ujaran kebencian menyebar," ucapnya.

Menurut Kaka, salah satu masalah utama adalah lemahnya perhatian legislatif terhadap dimensi digital dalam desain regulasi pemilu. Undang-undang yang berlaku tidak secara spesifik mengatur



pelanggaran perundang-undangan," katanya.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai, banyak persoalan penting dalam pemilu belum mendapat perhatian memadai dari pembuat undang-undang, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi, peran buzzer atau pendongeng, dan lemahnya penegakan hukum di era digital.

atau mengikat penyelenggara pemilu dalam penggunaan teknologi informasi.

Oleh karena itu, KIPP mendorong agar isu-isu seperti buzzer, politik digital, dan ruang kebebasan publik menjadi bagian integral dari pembahasan revisi UU Pemilu mendatang.

"Kalau tidak diantisipasi sekarang, pemilu kita ke depan akan semakin rentan, bukan hanya secara teknis, melainkan juga secara demokratis," katanya. •

PDIP BABAK BELUR

Di balik raihan suara tertinggi dan anggota DPR terbanyak hasil Pemilihan Umum 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengemukakan partainya babak belur setelah kontestasi politik itu.

Selain mengaku babak-belur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memotivasi para kadernya dengan sentilan. Saat berpidato di acara Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025, Megawati menyentil pula para kader partainya dengan pertanyaan.

Ia bertanya kepada para kader PDIP yang hadir dalam acara, apakah benar mereka babak belur atau tidak? Hingga dua kali Ketua Umum PDI itu bertanya

"Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan. Kemarin, pemilu, saya enggak pernah ngomong, tapi sekarang saya sentil lagi sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa ndak? Hah, kan enggak ngaku toh. Babak belur apa

tidak?" ungkap Megawati.

"Babak beluuur!" seru hadirin yang sebagian besar adalah kader dan anggota PDIP.

Dalam acara itu, Megawati Soekarnoputri tampak hadir bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan sang istri, Nancy Prananda. Hadir pula sejumlah elite PDIP di antaranya Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Eriko Sotarduga, Rano Karno, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus hingga Yasonna Laoly. Lalu, politisi PDIP lainnya seperti Putra Nababan, Ribka Tjiptaning, dan Kris Dayanti tampak menyambut kedatangan Megawati di lokasi.

Tokoh senior partai, yakni Ketua DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rachmat Hidayat dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu juga terlihat hadir. Begitu pula dengan Anggota DPR RI dan DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP bersama ratusan kader partai berlambang banteng moncong putih.

Sedangkan acara Trisakti Tourism Award 2025 merupakan yang ketiga kalinya. Mengusung tema Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya, Trisakti Tourism Award 2025 diikuti oleh 232 desa wisata rintisan, berkembang,

maju, dan mandiri. Ada tujuh kategori yang diperlombakan yaitu wisata kreatif, wisata sejarah, religi, kebugaran, petualang, ekowisata, dan kuliner.

Nah, dalam acara yang menghimpun banyak kader itulah Mega menyampaikan pula kekecewaannya. Antara lain lantaran beberapa kader yang diproyeksikan bakal terpilih pada Pemilu 2024 justru gagal. Sebagai Ketua Umum, Megawati mengaku bertanggung jawab atas proses penentuan calon legislatif dan menyayangkan adanya kader yang tidak bekerja maksimal di lapangan.

"Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa, yang harusnya jadi enggak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa, saya kan tahu orang-orang ini. Bener rajin, bener tidak. Hanya mau jadi, saya kan bisa. Siapa suruh jadi ketua umum? Jadi saya bisa memberi nilai. Jadi saya udah yakin bahwa ini pasti akan jadi," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Megawati mencontohkan dirinya yang rajin turun ke bawah menemui rakyat sehingga berhasil duduk tiga kali menjadi Anggota DPR di masa Orde Baru. "Nah, kenapa? Karena saya suka ke bawah. Karena apa? Seperti apa keadaannya? Ya, kurang lebih kayak yang kemarin. Tapi kan saya kok jadi terus, karena apa? Turun ke bawah.



Turun ke bawah ke mana? Ke akar rumput. Akar rumput itu siapa? Rakyat. Yang memerlukan kita,” katanya.

Menurut dia, dekat dengan rakyat adalah faktor penting yang teruji berkali-kali dalam jangka panjang sekalipun. “Lah kalau namanya anggota DPR tiga kali, berturut-turut sudah jadi seperti saya, itu bayangin zaman Pak Harto loh. Tiga kali berturut-turut saya jadinya. 15 tahun, kepotong wapres,” katanya.

Namun, Megawati tetap bersyukur masih ada pendukung setia partainya “Nah kemarin saya lihat waduh gile juga yaa. Tapi saya merasa berterima kasih bukan pada kalian. Kepada rakyat pendukung kita,” ungkapnya disambut tepuk tangan kader.

Lebih jauh, Megawati pun mengingatkan kader untuk tetap solid dan tidak ragu dalam mengikuti arah perjuangan partai. Ia menyebut masih memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah dan susunan kepengurusan partai ke depan.

“Satyam eva jayate! Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, pasti menang. Tapi kalau kaliannya melemah, ya, enggak menang,” beber Megawati.

“Kenapa? Buktinya, saya lihat, gile deh, tempat yg seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Enggak usah diomongkan, saya kan ketum, tahu saya,” imbuhnya.

Toh meski partainya babak belur di Pemilu 2024, dalam Pileg 2024 PDIP menjadi partai pemenang. Menurut dia, itu adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tetap percaya dan mendukung partai banteng moncong putih.

“Akhirnya apa? Saya berzikir, berdoa, ya Allah, tunjukkanlah bahwa kami ini benar, bahwa kami membangun partai adalah demi bangsa dan negara, bukan untuk mencari kekuatan dan uang belaka, apa buktinya? Kenapa kita tetap nomor 1? Saya tadinya mikir, turun lagi nomor dua, tapi apa? Rakyat menolong kita. Provinsi yang dihantam, dap, dap, dap, coba diperhatikan, di bawahnya ditahan, naik pada, coba lihat hasilnya. Jadi apa? Yang menolong adalah bukan kalian, tapi rakyat, sepanjang rakyat mencintai kita,” jelasnya disambut tepuk tangan kader.

“Saya yakin ketika solid bergerak tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Mengerti?” kata Megawati lagi.

“Mengerti,” jawab kader.

Nah, pidato Megawati kali ini berada

Tinggal pengukuhan Ibu Ketua Umum,” kata Djarot usai mendampingi Mega menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025.

Toh waktu pelaksanaan kongres



di tahun saat Kongres PDIP dijadwalkan. Sedangkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Kongres partainya yang akan digelar tahun ini akan mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali ketua umum.

Djarot menegaskan semua kader solid kembali mendukung Mega. “Solid.

masih belum dipastikan kapan. Soal lain terkait Kongres adalah siapa pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Harap maklum, Hasto pada Mei 2025 menjalani rangkaian sidang peradilan pidana, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari babak-belur PDIP sejauh ini. ●

KOPERASI DESA MERAH PUTIH TIDAK MUNGKIN RUGI

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum Koperasi Desa Merah Putih sebelum peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025.

"Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Baru nanti Juni, kalau bisa, persoalan badan hukum di tingkat Menteri Hukum selesai, 12 Juli mudah-mudahan seluruh desa, termasuk kelurahan, itu badan hukumnya sudah ada," harap Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, saat Dies Natalis ke-26 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Plaza

"Jadi sekarang tahapan musyawarah desa khusus untuk membuat koperasi badan hukumnya dulu. Setelah itu, baru kita bahas permodalan, gudang, jenis usaha, dan tenaga kerjanya," ujar dia.

Yandri menegaskan, jenis usaha koperasi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pertanian, sembako, LPG 3 kg, pupuk, hingga klinik desa.

"Kalau desa itu misalkan pertanian, ya pertanian yang utama. Jangan kita memaksa. Kalau potensinya cabai, ya cabai. Jangan ikan," ujar dia.

Selain itu, ia mendorong pelibatan sarjana penggerak desa dalam operasional koperasi. Ia mencontohkan rekrutmen manajer koperasi dari kalangan sarjana asal desa yang saat ini menganggur di kota.

"Kita sudah minta minimal tiga orang di setiap koperasi. Kita utamakan SDM dari desa itu sendiri. Misalnya ada sarjana dari Desa Kertasana yang nganggur,

lakukan honorarium batas bawah untuk anggota BPD secara nasional agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.

"Apakah kita akan membuat batas bawah, misalkan se-Indonesia berapa itu honor BPD. Nanti akan kita bicarakan lintas kementerian. Ini saya kira aspirasi yang sangat bagus," ujar dia.

Kementerian Desa PDT menargetkan kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serentak sebagai tahapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih rampung di akhir Mei 2025.

Yandri mengatakan musyawarah itu menjadi bagian amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa.

"Surat edaran untuk musyawarah desa khusus sudah kami terbitkan. Agendanya tunggal, yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih. Di dalamnya kami detilkan siapa peserta dan siapa yang mengundang," ujarnya.

Untuk mendukung proses pendirian koperasi, khususnya pengurusan akta notaris, Yandri juga menyebut pihaknya telah mengeluarkan surat edaran tambahan yang memperbolehkan penggunaan anggaran operasional pemerintahan desa sebesar 3 persen dari Dana Desa, termasuk untuk keperluan konsumsi saat musyawarah dan biaya notaris yang diseragamkan sebesar Rp2,5 juta per desa.

"Bagi desa yang belum memiliki dana, bisa gunakan anggaran operasional. Kalau Dana Desa-nya Rp1 miliar, berarti bisa dialokasikan Rp30 juta. Itu sudah cukup untuk biaya notaris dan keperluan musyawarah," katanya.

Yandri juga tengah mempercepat proses di lapangan dengan mengumpulkan kepala desa, BPD, pendamping desa, serta elemen masyarakat yang menjadi bagian dari Musdesus.

Ia menyebut, target musyawarah desa itu di helat di lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan tenggat waktu mencapai mufakat paling lambat akhir bulan ini.



Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu, 7 Mei 2025.

Menurut dia, pendirian Koperasi Desa Merah Putih dimulai dari musyawarah desa khusus yang menghasilkan berita acara untuk kemudian disahkan melalui notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum.

kita ajak pulang jadi manajer koperasi," jelasnya.

Dia menambahkan, peran sarjana juga akan diperluas untuk program-program ekonomi desa, seperti suplai bahan baku makan siang bergizi bagi masyarakat desa.

Selain itu, Yandri juga menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji pember-

Pihak Kemendes juga sedang melakukan inventarisasi potensi desa masing-masing, baik itu pertanian, peternakan, maupun hortikultura, agar pengajuan pembiayaan koperasi selaras dengan kekuatan ekonomi lokal.

Selain itu, potensi infrastruktur seperti bangunan eks sekolah dasar yang tidak terpakai juga akan dimanfaatkan sebagai kantor atau gudang koperasi.

"Contohnya di Jawa Tengah, banyak SD yang tidak terpakai. Itu bisa kita branding jadi gudang atau kantor koperasi, tanpa harus membangun dari awal," katanya.

Tanpa Mematikan Usaha Lain

Di sisi lain, Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, mengingatkan segenap pihak yang terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bahwa keberadaan koperasi itu bukan untuk mematikan usaha-usaha di desa.

"Jangan pernah mematikan (usaha) yang ada. Mengurangi (usaha) yang ada saja jangan, apalagi mematikan. Jadi, sekarang bentuk dulu. Cari tanah, pakai tanah negara, tanah pemerintah kita sama-sama meningkatkan ekonomi di desa," kata Ariza dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.

Ia menyampaikan bahwa skema dalam mengatasi kemungkinan kemunculan tumpang tindih antara Koperasi Desa Merah Putih dan usaha-usaha lainnya di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah dipikirkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dipastikan akan menyumbang peningkatan ekonomi Indonesia, sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, Kemendes PDT tengah serius melakukan pemantauan ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk memastikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar terealisasi.

Selain pembentukannya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan pihaknya juga berupaya memastikan kelengkapan struktur pengurus, unit usaha yang dilakukan, serta lokasi koperasi di setiap desa.

Sejalan dengan itu, pemilihan lokasi

pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus strategis agar bisa dijangkau warga secara maksimal.

Menteri Yandri mengatakan pengelolaan BUMDes tidak perlu galau terhadap rencana kehadiran koperasi desa merah putih karena dua-duanya sama penting dan tidak boleh saling meniadakan, justru harus saling mendukung.

ini tak akan rugi. Koperasi ini diklaim juga bisa menjadi instrumen mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

"Saya kan berkali-kali sudah bilang, ini bisnis enggak mungkin rugi. Tadi saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak ini monopoli semua, Pak. Coba, gas, kamu distributor satu-satunya di desa itu, rugi enggak? Pupuk bersubsidi, beras, nanti



Saat ini, Kementerian Desa PDT sedang membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai hubungan antara BUMDes dan kopdes merah putih.

"Jadi, insya Allah kehadiran koperasi desa merah putih tidak merecoki atau tidak membuat BUMDes itu terpinggirkan. Justru persaingannya sehat, ekonomi di desa itu akan semakin kuat," tegasnya.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai penyalur utama hasil produksi maupun kebutuhan esensial masyarakat, Koperasi Merah Putih diyak-

minyak goreng, masak bisnis monopoli rugi?" ujar Budi Arie di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.

Pemerintah mendesain koperasi Merah Putih sebagai penyalur utama pupuk bersubsidi, elpiji, serta sembako seperti beras dan minyak goreng. Selain itu, koperasi ini juga akan menjadi penyalur berbagai produksi masyarakat desa sesuai potensi yang ada di wilayah itu.

Kecuali ada penggelapan atau masalah moral, menurut Budi Arie, koperasi tidak bisa merugi. Selain itu, kepala desa akan sekaligus menjadi ketua pengawas koperasi. Harapannya, penyimpangan bisa dicegah. ●

GELOMBANG MUTASI PULUHAN HAKIM

Mahkamah Agung kembali merombak secara signifikan jajaran hakim dan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan umum di Tanah Air.

Sejumlah hakim di pengadilan negeri (PN) di wilayah Jakarta digeser menjadi hakim pengadilan tinggi (PT) di wilayah Indonesia bagian timur. Hal itu tertuang dalam hasil Rapat Pimpinan MA pada Jumat, 9 Mei 2025.

Secara rinci, terdapat 41 orang yang dibahas dalam mutasi oleh MA. Sebanyak 26 di antaranya merupakan pimpinan pengadilan tingkat banding, sedangkan 15 lainnya adalah hakim pengadilan tingkat pertama. Namun, empat nama di daftar itu tetap bertugas

Selain itu, hakim PN Jakarta Timur, Chitta Cahyaningtyas dan Tri Yuliani, dimutasi sebagai hakim di PT Ambon. Dari PN Jakarta Barat, Sutarno dipindahtugaskan ke PT Maluku Utara. Hakim lainnya dari PN Jakarta Barat, Esthar Oktavi dan Dinahayati Syofyan, masing-masing dimutasi ke PT Papua Barat dan PT Ambon.

Slamet Widodo, yang sebelumnya hakim di PN Jakarta Utara, kini bertugas sebagai hakim di PT Maluku Utara. Terakhir, Raden Ari Muladi dari PN Jakarta Selatan mendapat penugasan baru sebagai hakim di PT Jayapura.

Ketua MA, Sunarto, menyampaikan, keputusan mutasi dan promosi diambil dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pimpinan tingkat banding yang ditinggalkan pejabat purnabakti. Ini sekaligus upaya penyegaran personel di lingkungan badan peradilan umum.

"Dalam rapim hari ini telah diputuskan

dapat membawa semangat baru dan penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan demi terwujudnya layanan hukum yang bersih dan profesional bagi masyarakat pencari keadilan.

Gelombang kedua

Mutasi hakim besar-besaran tersebut bukan pertama kali dilakukan MA. Sebelumnya, dalam rapat pimpinan MA pada Selasa, 22 April 2025, diputuskan rotasi 61 hakim yang semula bertugas di empat PN di Jakarta dan 10 hakim di pengadilan Surabaya ke sejumlah daerah. Mereka digantikan oleh hakim-hakim yang semula bertugas di MA dan PN di daerah.

Rentetan agenda mutasi hakim ini menyusul penangkapan terhadap Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, pada 11 April 2025 dan ditahannya tiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif.

Pada 11 April 2025, Kejaksaan Agung menangkap Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, atas dugaan suap senilai Rp 60 miliar terkait dengan pengelolaan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang melibatkan tiga perusahaan besar.

Arif yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat diduga mengatur agar ketiga korporasi tersebut divonis lepas atau ontslag van alle rechtsvervolging.

Selain Arif, Kejagung juga menetapkan tiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani kasus tersebut sebagai tersangka dan menahannya. Mereka adalah Djuyamto selaku ketua majelis hakim, serta Ali Muhtarom dan Agam Syarif selaku hakim anggota.

Gelombang mutasi besar-besaran perdana itu menuai apresiasi dari Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi. Namun, dia mengingatkan, hal tersebut bukan merupakan langkah akhir, melainkan baru awal yang harus diikuti kebijakan-kebijakan lanjutan.

"Ini langkah awal, karena ini kan isu-



di tempat yang sekarang alias tidak dimutasi.

Mutasi yang cukup mencolok terjadi terhadap sejumlah hakim PN di Jakarta. Sebanyak 11 hakim PN di wilayah Jakarta dimutasi ke PT di Indonesia bagian timur.

Misalnya, Yusuf Pranowo, yang semula menjabat hakim di PN Jakarta Pusat, dimutasi sebagai hakim di PT Ambon. Dari pengadilan yang sama, hakim Buyung Dwikora dimutasi menjadi hakim PT Jayapura. Sementara itu, Suparman dan Eko Aryanto, keduanya juga dari PN Jakarta Pusat, mendapat penugasan baru sebagai hakim PT Papua Barat.

26 pimpinan tingkat banding di lingkungan peradilan umum yang terdiri dari 9 ketua pengadilan tinggi dan 17 wakil ketua pengadilan tinggi yang mendapatkan promosi atau mutasi," ujarnya lewat tayangan video.

Sunarto berharap, langkah promosi dan mutasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur badan peradilan, khususnya di peradilan umum. Ia pun tak henti mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan pengadilan untuk senantiasa menjaga integritas dan menghindari praktik pelayanan yang bersifat transaksional.

Perubahan posisi ini juga diharapkan

nya mafia. Ada jejaring, kalau dirotasi itu kan mengganggu jaringannya. Ketika sudah dirotasi, so what's next (apa selanjutnya). Next-nya adalah melakukan evaluasi terhadap integritas hakim yang dirotasi itu sendiri. Jadi, kalau sudah dirotasi, tetap dipantau apakah dia memang seperti yang diharapkan," ujar Fachrizal.

Mutasi dan rotasi jajaran hakim dan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan umum dinilai sebagai komitmen serius Mahkamah Agung dalam upaya "bersih-bersih" peradilan. Namun, itu saja tidak cukup. Langkah bersih-bersih perlu dibarengi penguatan sistem pengawasan hakim.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Muhammad Tanzil Aziezi, menilai, rotasi hakim-hakim itu merupakan respons Mahkamah Agung terhadap masalah korupsi oleh personel pengadilan belakangan ini. Oleh sebab itu, langkah cepat MA itu patut diapresiasi.

"Kami lebih melihat langkah ini sebagai langkah positif sekaligus komitmen kuat pimpinan MA dalam upaya bersih-bersih peradilan dari personel-personel dengan perilaku koruptif," kata Aziezi Sabtu, 10 Mei 2025.

Langkah responsif Mahkamah Agung dan jajaran aparat penegak hukum untuk menindak dan mengambil langkah tegas itu, menurut dia, perlu didukung. Apalagi, jika memang faktanya masih ditemukan personel pengadilan dan penegak hukum lainnya melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari tujuannya, mutasi besar-besaran jajaran hakim itu tidak hanya memutus mata rantai korupsi, tetapi juga untuk mereformasi peradilan agar semakin bersih dari perilaku koruptif.

Namun, langkah baik itu belum cukup. Langkah itu perlu dibarengi dengan langkah-langkah lain untuk menjaga dan meningkatkan integritas para hakim.

"Kami melihat bahwa kejadian-kejadian kemarin menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengawasan hakim agar kejadian serupa tidak terulang, baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Misalnya, dengan memaksimalkan whistleblower system, mystery shopper, pengaturan terkait konflik kepentingan, dan lain-lain," tambahnya.

Tanpa adanya langkah komprehensif itu, ia khawatir mutasi tersebut hanya menjadi sesuatu yang baik di awal. Pada akhirnya, belum tentu bisa menjaga integritas para hakim.

Penghilang rasa sakit

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, mengatakan, mutasi dan rotasi hakim tersebut masih sekadar penghilang rasa sakit, bukan obat mujarab untuk mengatasi masalah korupsi di tubuh lembaga peradilan.

Jika MA memang ingin menciptakan efek jera dan menjaga semangat hakim-

tidak berintegritas seharusnya tidak hanya dimutasi dan dirotasi, tetapi juga dipecat. Tindakan tegas itu harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

"Terlalu banyak orang merasakan ketidakadilan, sehingga merusak kepercayaan, menyakiti keadilan rakyat. Ini (mutasi dan rotasi) mengobati sakit saja. Yang betul harus diobati dengan terapi yang tepat supaya benar-benar sembuh," jelasnya.

Selain melibatkan KY, MA juga bisa melibatkan DPR dan masyarakat sipil untuk evaluasi menyeluruh kinerja



hakim yang berintegritas, ia meminta agar dilakukan evaluasi nasional terlebih dahulu terhadap para hakim di seluruh pengadilan di Tanah Air.

"Situasi korupsi di kehakiman sudah menunjukkan situasi darurat. Seharusnya, Presiden turun tangan untuk mengevaluasi. Bahan evaluasinya banyak, bisa berasal dari Komisi Yudisial, bisa berasal dari laporan masyarakat," kata Gayus.

Dalam evaluasi tersebut, hakim yang

hakim itu. Sebab, Gayus mengibaratkan pengadilan saat ini sudah seperti goa hantu. Para pencari keadilan sudah tidak memercayai pengadilan karena banyak fenomena yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah karena praktik koruptif hakim.

"Jika tidak diselamatkan, hukum dan peradilan ini bisa runtuh seperti yang diungkapkan oleh Sebastian Pompei, peneliti orang Indonesia yang kebetulan lahir di Belanda," ungkapnya. ●

CFD

Gunawan Effendi

Satu lagi kota di Indonesia mulai menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor (car free day, CFD): Kota Depok, Jawa Barat. Jadi, semakin banyak kota, bahkan kabupaten yang menyelenggarakan CFD. Termasuk yang di luar Jawa, meskipun mungkin jumlah kendaraan bermotor maupun penduduknya masih belum sebanyak kota atau kabupaten di pulau terpadat Indonesia itu.

Kabupaten di luar Jawa yang sudah menyelenggarakan CFD antara lain Bangka Barat, Bangka Belitung, kemudian Buol, Sulawesi Tengah, dan Sukamara, Kalimantan Tengah. Jika mengunjungi kota-kota itu, tampak bahwa jumlah kendaraan bermotor, khususnya mobil tak akan sebanyak di Kota Depok. Toh kabupaten-kabupaten itu menyelenggarakan CFD pula. Jadi, CFD bukan hanya sekadar jeda kemacetan sebagaimana kesan di kota-kota besar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Meskipun biasanya berlangsung pada Minggu setiap pekan, CFD bertujuan antara lain mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, untuk kendaraan berbahan bakar fosil minyak maupun gas, seperti bensin dan solar.

Namun, dengan berkembangnya penggunaan kendaraan listrik bertenaga baterai, emisi gas rumah kaca pun berkurang. Toh masih ada limbah baterai bekas yang perlu mendapat perlakuan khusus agar tak menambah pencemaran lingkungan.

Apapun, CFD bukan sekadar soal lingkungan. Ada dampak ekonomi dan sosial dalam CFD. Katakanlah misalnya upaya meningkatkan kesadaran untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki atau pengendara sepeda. Juga mendorong penggunaan alat transportasi lebih ramah lingkungan, seperti sepeda, atau menggunakan transportasi umum.

CFD memang memungkinkan masyarakat untuk menikmati ruang publik tanpa adanya kendaraan bermotor, sehingga lebih aman dan nyaman untuk berjalan kaki. Selain itu, CFD juga dapat menjadi ruang kegiatan olahraga dan rekreasi murah-meriah. Dampak bergandanya juga menyentuh bidang ekonomi. CFD dapat menjadi sarana bagi pedagang lokal untuk menawarkan produk mereka, sehingga dapat mendukung ekonomi lokal. Yang terakhir ini relevan dengan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat bahkan meleset dari target lima persen atau lebih sepanjang 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan I (Januari-Maret) 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, year

on year (yoy). Padahal pada triwulan sebelumnya (Oktober-Desember 2024) ekonomi tercatat tumbuh mencapai 5,02 persen yoy.

Perkembangan ini menurut BPS dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi domestik dan kinerja ekspor. Jika sudah menyentuh kinerja ekspor, maka dampak langsung dan tidak langsung kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). Malah ke depan, pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen (yoy).

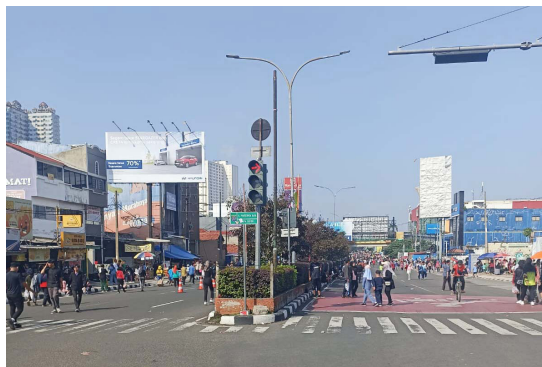
Toh kita masih berharap kegiatan ekonomi di dalam negeri masih dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan I 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Indikator lain, investasi tumbuh sebesar 2,12 persen (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tumbuh positif. Namun, belanja jajaran pemerintah ternyata berkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) sejalan dengan normalisasi belanja Pemerintah dibandingkan dengan belanja triwulan I 2024 yang tercatat tinggi untuk pelak-

sanaan Pemilu. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh positif sebesar 3,07 persen (yoy). Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama, serta ekspor jasa yang tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara.

Bank Indonesia mencatat, dari sisi Lapangan Usaha (LU), PDB triwulan I 2025 dipengaruhi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan didukung permintaan domestik pada momen Ramadan dan HBKN Idulfitri, serta peningkatan permintaan eksternal. LU Pertanian juga tumbuh didukung oleh panen raya padi dan jagung. Sementara itu, dari sisi kewilayahan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 secara tahunan tertinggi tercatat di wilayah Sulampua, diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra.

Toh data pun harus dicek silang dengan perkembangan konkret di lapangan. Nah, belakangan kita dapat melihat sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berupaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan sekadar CFD yang biasanya juga diramalkan oleh pedagang skala kecil atau usaha mikro di bidang kuliner, juga produk konveksi atau pakaian jadi, serta peralatan kebutuhan sehari-hari. ●





ORMAS DALAM BIDIKAN

Pernah menjadi sorotan dalam konteks ideologi dan politik, kini organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi isu ekonomi politik di bidang investasi dan bisnis.

Begitulah. Kunjungan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Eddy Soeparno ke China pada pertengahan April 2025 pada mulanya. Memenuhi undangan pemerintah China, kunjungan ini berlangsung pada 13-17 April 2025. Setidaknya Eddy berkunjung ke Beijing dan Shenzhen.

"Tentu kami menyambut gembira

rukan," kata Eddy, Senin, 14 April 2025.

Dalam kunjungan tersebut Eddy Soeparno dijadwalkan akan bertemu dengan antara lain Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Huning, yang merupakan pejabat struktural tertinggi ke-4 di Partai Komunis China (CCP), setelah Xi Jinping, Li Qiang, dan Zhao Leji.

Eddy juga mengunjungi pusat

PAN ini mengemukakan, perkembangan pesat China di berbagai bidang menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Bahkan, sambungnya, perkembangan pesat dari teknologi China di berbagai bidang dapat mengungguli negara-negara Barat.

"Pemanfaatan teknologi dan pen-dayagunaan merupakan kunci keberhasilan China melakukan tran-



negara-negara sahabat yang bertekad mendukung Indonesia dari aspek investasi, transfer teknologi dan pendanaan. Tujuannya agar tercapai dua hal: pertama, transisi energi menuju energi terbarukan dan terbangunnya industri dalam negeri yang mendukung pembangunan proyek-proyek energi terba-

teknologi kendaraan listrik dan industri panel surya di Kota Shenzhen pada akhir kunjungannya. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini perkembangan pesat China di berbagai bidang menjadi lesson learned penting untuk Indonesia.

Wakil Ketua Umum PAN (Waketum)

sisi energi secara swadaya, sekaligus membangun sektor manufaktur di dalam negeri. Pelajaran ini juga sangat penting untuk dapat kita terapkan di Indonesia," ungkapnya.

Ia berharap pula kunjungannya tidak hanya akan mempererat hubungan Indonesia dan China, tetapi semakin

meningkatkan investasi China di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi Indonesia membutuhkan investasi besar serta alih teknologi untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emission 2060. "Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus membangun sektor industri nasional," ujarnya.



Rupanya pusat teknologi kendaraan listrik yang menjadi tempat kunjungan Eddy di Shenzhen adalah pabrik mobil listrik China BYD di Shenzhen. Di Indonesia BYD tengah membangun plant atau pabrik produksi di Indonesia yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

"China saat ini ekspansi besar-besa-

ran ke mobil listrik dengan teknologi yang sangat modern namun harga yang lebih rendah dibanding pesaing-pesaingnya. Efeknya, mobil listrik mereka lebih laku dan terserap cepat di pasar," ungkap Eddy, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia, kemajuan mobil listrik di China seperti BYD sangat cepat karena mereka bukan hanya menjual mobil, namun lebih dari itu yang diprioritaskan adalah kemajuan teknologi dan inovasi. Eddy menambahkan akselerasi teknologi China harus bisa diikuti oleh Indonesia dengan memanfaatkan peluang transfer of knowledge dari investasi yang masuk ke Indonesia.

"Sebentar lagi BYD akan memulai produksi di pabrik mereka di Subang Jawa Barat. Saya yakin akan ada sera-

Ke depan, kata dia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tapi menjadi basis untuk ekspor. Ia juga menyampaikan upayanya untuk mendukung investasi yang bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi, manufaktur dan hilirisasi di Indonesia.

Pada titik ini Wakil Ketua MPR mulai menyinggung praktik premanisme dalam beberapa kasus investasi, Eddy meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. "Saya juga berkomitmen mengawal dan terus memastikan kebijakan ramah investasi dan bebas dari segala ancaman premanisme dalam bentuk apapun," kata Eddy.

Malah dalam unggahan pribadi di media sosial Instagram Eddy mengungkapkan, proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat,



pan tenaga kerja Indonesia yang besar, sehingga bisa terjadi transfer ilmu dan pengetahuan dalam memproduksi mobil listrik," kata Eddy.

Eddy meyakini, Indonesia tidak kekurangan talenta-talenta terbaik untuk memproduksi mobil listrik. Namun dibutuhkan manajemen talenta yang tepat untuk memastikan potensinya tersalurkan. "Kami berharap putra-putri terbaik Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan mobil listrik dan juga pembuatan baterai ke depannya. Apalagi Indonesia mempunyai sumber daya yang berlimpah untuk membuat baterai mobil listrik," kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

sempat menghadapi hambatan akibat ulah organisasi masyarakat (ormas) dan tindakan premanisme. Informasi ini diperolehnya saat melakukan kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, atas undangan resmi dari pemerintah setempat.

Saat ini, produsen kendaraan listrik asal Tiongkok tersebut tengah membangun fasilitas produksi di Indonesia, yang berlokasi di kawasan Subang. Meski demikian, Eddy tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok yang terlibat dalam gangguan tersebut.

"Ada laporan mengenai gangguan dari oknum ormas dan tindakan pre-

manisme yang sempat menghambat proses pembangunan pabrik BYD. Saya kira, hal seperti ini harus ditangani secara tegas,” ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya

Ia menekankan pentingnya pemerintah memberikan jaminan rasa aman kepada investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum dan

Toh soal premanisme dan ormas yang mengganggu investasi, terutama di lokasi kawasan investasi industri mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat sudah mengemuka sebelum Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berkunjung ke China. Sekitar dua bulan sebelumnya, tepatnya pada Jumat, 21 Februari 2025 berlangsung penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov



keamanan menjadi kunci utama agar iklim investasi tetap kondusif.

“Investor yang datang ke Indonesia harus merasa dilindungi dan mendapatkan jaminan keamanan. Ini merupakan fondasi utama agar investasi bisa tumbuh dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Jabar dengan Ketua DPRD, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar dan Kapolda Metro Jaya di acara Paripurna Pidato Gubernur Jabar periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jabar.

“Kami yang bertandatangan di bawah ini berkomitmen memberantas aksi premanisme yang terorganisasi

dan tidak terorganisasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Jabar sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan,” ucap Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman saat membacakan komitmen bersama pemberantasan aksi premanisme.

Dalam komitmen bersama itu, ada 4 poin yang akan dilakukan yakni mengantisipasi aksi premanisme dalam bentuk geng motor, ormas tidak jelas, makelar tenaga kerja, calo kendaraan umum, petugas parkir liar, pelaku pungutan liar dan segala bentuk premanisme lainnya. Kemudian mencegah terjadinya aksi premanisme melalui sosialisasi dan koordinasi yang terstruktur sistemik dan masif.

“Melakukan penegakkan hukum yang tegas dan adil terhadap semua pelanggaran hukum yang terjadi akibat premanisme. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan aksi premanisme,” ujar Faiz.

Sedangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, komitmen bersama itu dibuat sebagai jawaban Pemprov Jabar terkait keresahan akan maraknya aksi premanisme yang juga berdampak pada investasi. “Komitmen kita menjaga investasi, memberantas premanisme. Begitu saya masuk (dilantik gubernur) langsung saya siapkan konsepnya dan itu tadi malam dirumuskan. Minggu depan sudah rencana aksi,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya.

Lebih dari itu, Kang Dedi mengungkapkan bakal segera membentuk Satgas khusus yang ditugaskan untuk menangani aksi premanisme. Satgas ini rencananya bakal bertugas secara resmi. “Yang paling utama itu ke depan bagaimana cepat ditangani, maka segera dibentuk (Satgas Premanisme). Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin mungkin SK nya keluar,” kata dia

Gubernur Dedi mengungkapkan, Satgas Premanisme itu bakal diberi perlengkapan khusus untuk memberantas preman. Adapun anggotanya, akan terdiri dari TNI dan Polri. “Satgas untuk menangani premanisme itu terdiri dari unsur Polri, TNI dan POM atau PM (Polisi Militer) dan itu nanti ada

lembaga khusus yang menangani di kabupatennya,” ujarnya seraya menambahkan Satgas ini akan dilengkapi dengan fasilitas khusus dan nomor telepon call center.

Alhasil, Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, menangkap sembilan tersangka pelaku premanisme yang beroperasi di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Subang. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD yang investasinya hingga mencapai Rp 11,7 triliun.

Kepala Seksi Humas Polres Subang Ajun Komisaris Edi Juhaedi menjelaskan, para tersangka diamankan di tiga lokasi berbeda. Mereka terbagi dalam dua kelompok, masing-masing beroperasi di sekitar pabrik mobil listrik BYD dan PT Superior Porcelain Sukses (SPS).

“Tiga pelaku melakukan pungutan liar di sekitar area proyek BYD dengan modus meminta uang parkir serta memaksa sopir kendaraan material membeli air mineral dengan harga tinggi. Aksi ini berlangsung di beberapa titik dan membebani sopir hingga Rp 25.000 per kendaraan,” ujar Edi dalam keterangan pers, Kamis, 24 April 2025.

Sedangkan enam pelaku lainnya melakukan pungutan liar terhadap sopir ekspedisi yang mengangkut bahan baku dan hasil produksi dari PT SPS. Mereka menarik uang Rp 30.000 untuk truk besar dan Rp 10.000 untuk kendaraan kecil dengan alasan “bantuan keamanan” disertai pemberian karcis sebagai tanda bukti pembayaran.

Praktik ini, sambungnya, berlangsung sejak 25 Desember 2024 hingga Maret 2025. “Total kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai Rp 118 juta,” kata Edi.

Polisi telah menetapkan seluruh pelaku se-

bagai tersangka dan menjerat mereka dengan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pemerasan. Mereka diancam hukuman penjara hingga sembilan tahun. Edi menegaskan, proses hukum akan terus berjalan dan tidak akan diintervensi pihak mana pun. “Saat ini berkas perkara sembilan pelaku sudah masuk tahap satu. Penanganan kasus ini akan kami lanjutkan sampai ada putusan pengadilan,” ujarnya.

Polres Subang juga membuka ruang bagi masyarakat dan pihak industri untuk melaporkan setiap tindakan premanisme yang mengganggu aktivitas pekerjaan dan logistik di kawasan industri. “Kami akan bertindak tegas. Tidak boleh ada ruang bagi aksi semacam ini,” kata Edi.

Beriringan dengan itu, urusan premanisme maupun ormas terkait bisnis dan investasi menjadi wacana yang kian meluas dan menjadi wacana ekonomi politik di tingkat nasional. Bu-

kan sekadar masalah investasi industri ken-

daraan listrik BYD dan kawasan industri di Jawa Barat.

Tak kurang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersikap terhadap masalah ormas dan premanisme dalam konteks investasi dan bisnis. Kemenko Polkam pun menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang secara khusus membahas penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri pun menggagas revisi Undang-Undang Ormas sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Salah satu yang disorot adalah soal akuntabilitas keuangan Ormas.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap ormas yang menghambat aktivitas usaha masyarakat dan merusak iklim investasi di daerah. “Kalau perlu di-punishment, ya itu pembubaran. Kita pernah pembubaran HTI dan FPI, kenapa? Karena dia tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia, mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 April 2025.

Ia menekankan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membubarkan ormas yang menyimpang, seperti yang pernah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). “Undang-undang Keormasan itu sudah kita buat dan kita tetapkan, termasuk di dalam pembentukannya dan pembubarannya, saya kira itu,” ujar Aria Bima.

Nah, sudah lebih jelas sekarang. Di masa lalu sorotan terhadap Ormas lebih ke ideologi dan politik. Kini, terkait urusan investasi dan bisnis. •





DARI SATGAS HINGGA REVISI UU ORMAS

Sorotan terhadap ulah ormas maupun aksi premanisme yang mengganggu investasi terus bergulir. Merentang dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan hingga upaya merevisi Undang-Undang Ormas.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus. Agenda rapat yang berlangsung di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025 itu berfokus pada penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum. "Negara tidak akan tinggal diam terhadap

tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menyampaikan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. "Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," sambung Pak Menko Budi Gunawan.

Hadir di acara ini, antara lain perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tercatat antara lain perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar

Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

Menko Polkam menjelaskan, pemerintah tidak hanya akan menindak tegas, tetapi juga memberikan ruang pembinaan. Untuk menjaga ketertiban dan rasa aman, Menko Polkam juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui



saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Terpadu. “Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif,” jelas Menko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional. “Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tandas Menko Budi Gunawan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tu-

gas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk. Ia mengungkapkan Satgas ini berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam, dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

“Satgas premanisme leading sektornya Kemenko Polkam. Kemendagri hanya salah satu bagian di dalamnya,” ujar Mendagri Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.

Satgas ini, sambung Mendagri Tito, memiliki tugas utama menegakkan aturan yang sudah ada terkait keberadaan dan kegiatan ormas di Indonesia. Ia menjelaskan, ormas terbagi dalam dua kategori, yakni ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum namun terdaftar dalam pusat data pemerintah.

“Kalau ormas berbadan hukum, maka penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena mereka yang mengeluarkan izinnya,” kata Tito.

Sedangkan bagi ormas yang tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di Kemendagri, maka sanksi administratif menjadi wewenang Kemendagri. Tito

menambahkan, jika pelanggaran yang dilakukan ormas masuk ranah pidana, maka penindakan berada di tangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

“Jadi siapa berbuat apa sudah jelas. Kalau pidana ditindak kepolisian, kalau administratif oleh kementerian terkait, sesuai dengan status ormasnya,” katanya.

Menurut Mendagri, salah satu sanksi administratif yang bisa diberikan Kemendagri kepada ormas terdaftar adalah pencabutan status terdaftarnya. Konsekuensinya, ormas tersebut akan kehilangan hak untuk menerima fasilitas atau dana hibah dari pemerintah.

Sebelumnya, Mendagri Tito mengemukakan wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di Indonesia. Revisi UU Ormas tersebut dianggap penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih ketat dan transparan.

“Kita lihat banyak ormas yang bertindak di luar batas. Mungkin perlu sistem pengawasan yang lebih kuat, termasuk soal pengelolaan dan audit keuangan,”

ujar Tito, Jumat, 25 April 2025.

Ia menjelaskan, aspek pengawasan, terutama terkait transparansi finansial, menjadi hal yang krusial untuk ditinjau ulang. Menurut dia, ketidakjelasan dalam penggunaan dana oleh ormas bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di level akar rumput.

Tito mengingatkan keberadaan ormas merupakan bagian dari demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, kebebasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan seperti intimidasi, pemerasan, atau kekerasan. "Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana, korporasinya," kata dia.

Mantan Kapolri itu menjelaskan UU Ormas yang lahir setelah reformasi 1998 memang menitikberatkan pada kebebasan sipil. Namun, dalam praktiknya, ada organisasi yang menyalahgunakan status tersebut untuk mengejar kepentingan kekuasaan dengan pendekatan koersif.

Meski begitu, Tito menegaskan proses revisi tetap harus melalui mekanisme legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pihak yang berwenang. "Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-

perubahan sesuai situasi. Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan," ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Sebagai contoh, Tito menyebut aksi pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindak pidana yang harus ditindak tegas. "Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga," tegasnya.

Beriringan dengan itu tindakan premanisme yang terkait Ormas menjadi perhatian Komisi III DPR, mengingat belakangan ini terdapat dua kasus yang menyeret nama ormas. Pertama, pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno soal gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Selain itu ada pula insiden pembakaran mobil polisi oleh sejumlah anggota Ormas.

Tambahan pula, terjadi pula aksi premanisme di kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, dalam peristiwa bentrokan terkait sengketa kepemilikan lahan. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu, 30 April 2025. Dalam video yang viral di media sosial, publik menyoroti penggunaan senjata laras panjang oleh salah satu kelompok.

Terlepas dari itu, Tito menyatakan

masih banyak ormas yang berperan positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, ia juga mengakui terdapat sejumlah ormas yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk melakukan tindakan intimidatif dan melanggar hukum.

"Ormas itu adalah bentuk dari demokrasi, sama seperti kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan pers. Adapun tujuannya untuk mengakomodasi hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berkumpul," lanjutnya.

Ia mencontohkan sejumlah ormas yang aktif dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, hingga ketahanan pangan. Bahkan, organisasi seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) disebut Tito sebagai ormas yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Tito juga menyoroti keberadaan ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum dan berpotensi mengganggu keamanan. Ia menegaskan bahwa ormas tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.

"Ada juga mungkin ormas yang berkumpul, lalu memeras masyarakat, memeras pengusaha, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu harus ditindak, dipidana," tukasnya.

Mengenai revisi Undang-Undang Ormas, Koordinator Koalisi Kebebasan Ber-



serikat, Riza Abdali menyampaikan catatan kritis. "Revisi ini tidak menyelesaikan persoalan kekerasan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Justru (malah) berisiko melanggengkan dominasi OMS yang intimidatif karena akar masalahnya bukan pada transparansi keuangan, tapi lemahnya penegakan hukum," ungkap Riza dalam pernyataan resmi, Rabu, 30 April 2025,

Koalisi dengan Koordinator Riza Abdali juga menyampaikan lima catatan untuk pemerintah. Pertama, negara masih menganggap OMS sebagai ancaman. Koalisi menilai pernyataan Mendagri menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghormati peran OMS dalam demokrasi. Negara masih memosisikan OMS sebagai objek kontrol, bukan mitra pembangunan.

Kedua, permasalahan dalam ormas adalah penegakan hukum yang lemah, bukan kekosongan aturan. Tindakan intimidatif OMS sudah dapat ditindak dengan perangkat hukum yang ada. Seperti KUHP, UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU Ormas yang berlaku saat ini.

"Alih-alih menjalankan penegakan hukum secara adil, pemerintah malah sibuk membuat aturan baru. Padahal hukumnya sudah ada, tinggal ditegakkan,"

ujar Riza.

Ketiga, UU Ormas selama ini sudah menjadi alat represi yang membatasi OMS. Mulai dari kewajiban SKT, pelabelan ilegal bagi yang tidak terdaftar, hingga pembubaran sepihak tanpa proses peradilan. Keempat, ada kesalahan konseptual terkait akuntabilitas OMS. Jika suatu OMS tidak berbadan hukum, maka tidak logis apabila negara memaksakan pengawasan terhadap laporan keuangan mereka.

Kelima, revisi UU Ormas justru menghidupkan kembali pendekatan orde baru. Riza menilai, rencana revisi ini justru membuka kembali pendekatan represif masa lalu yang memandang partisipasi masyarakat sebagai ancaman.

"Ini rawan penanganan berbasis stigma, bukan bukti. Seharusnya UU Ormas dicabut, bukan direvisi. Kita butuh UU perkumpulan yang menjamin kebebasan," paparnya.

Toh Wakil ketua MPR, Eddy Soeparno mendukung wacana revisi UU Ormas. Dia penting merevisi UU tersebut agar dapat menindak ormas yang mengganggu ketertiban umum. Mengingat esensi dari revisi ini untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran ormas. Namun, jika penegakan hukum berjalan dengan baik, revisi bisa saja tidak diperlukan.

"Kalau penegakan hukumnya kuat dan konsisten, mungkin perubahan leg-

islasi tidak perlu, tapi kita tetap perlu pengawasan," ungkap Eddy.

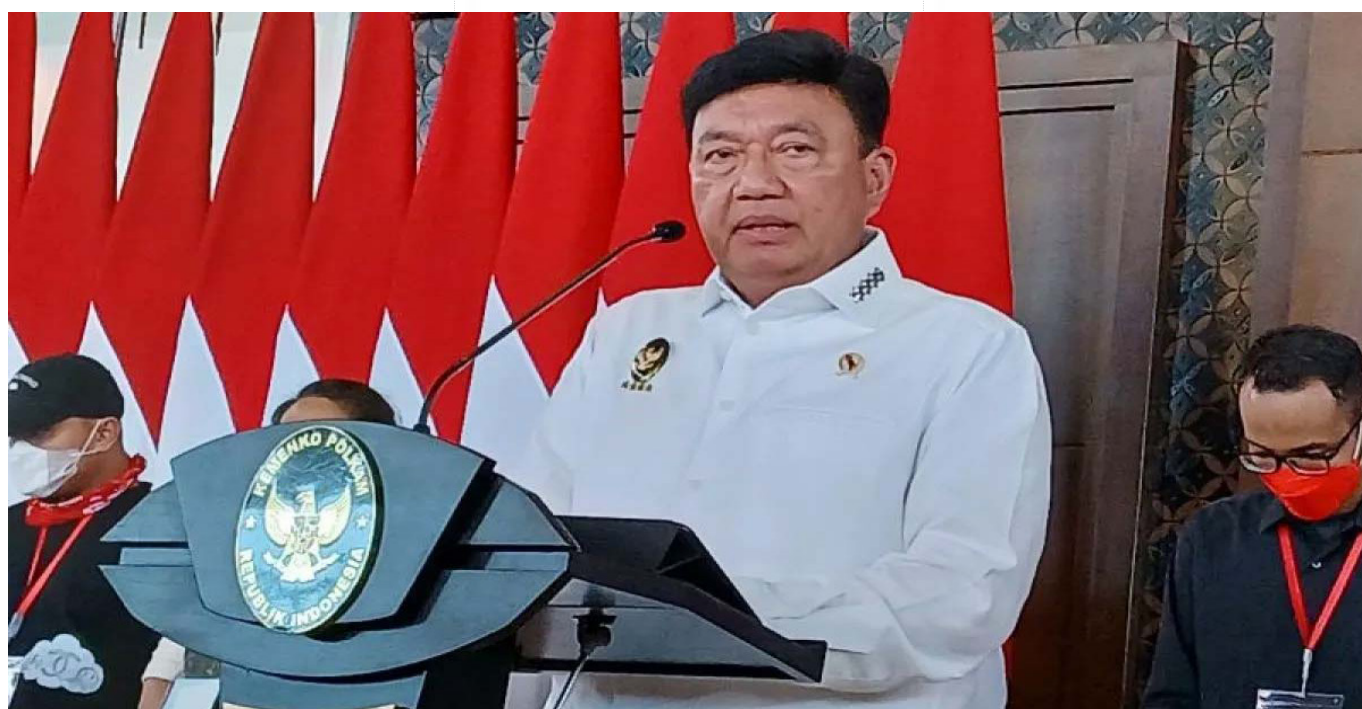
Sementara Revisi UU Ormas masih menjadi wacana, aparat penegak hukum mulai menyiapkan langkah konkret terkait kegiatan Satgas Terpadu yang menangani Ormas dan tindakan premanisme. Langkah konkret itu berlangsung di berbagai wilayah tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Bersinergi dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan operasi ini menasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

"Selain TNI, operasi ini juga bersinergi dengan pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang," ujarnya yang dikutip di laman web internet Humas Polri, Rabu, 7 Mei 2025.

Alhasil, kisah penanganan premanisme dan Ormas terkait gangguan terhadap investasi dan bisnis masih akan berlanjut. Kita simak saja pada saatnya.

• Editor: GE





SERENTAK MENGGELAR APEL SIAGA

Jajaran kepolisian menggelar apel siaga dan operasi di wilayah tugasnya. Berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait.

Jika terlihat kepolisian di berbagai wilayah Kepolisian Resort kota maupun kabupaten, menggelar apel siaga pada awal Mei 2025, kemungkinan besar memang ada kaitannya dengan persiapan operasi pemberantasan premanisme. Apel siaga itu memang terkoordinasi sebagaimana instruksi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Melalui Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia Kapolri Sigit menginstruksikan jajaran di bawahnya menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak untuk memberantas praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat.

Operasi ini telah dimulai serentak mulai 1 Mei 2025. "Tujuannya menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," ungkap Karopenmas

Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei 2025.

Truno mengatakan, operasi ini dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Operasi ini ditujukan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi," lanjut Truno.

Secara khusus, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan adalah pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

"Premanisme dalam bentuk apapun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditin-

dak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," sambung Truno.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Polri akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta pihak lain yang memegang kepentingan. Tercatat sejumlah Polres kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah menggelar apel siaga ini.

Di wilayah Jabar, tercatat antara lain apel siaga tingkat Polres di Kabupaten Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, maupun Sukabumi. Juga di Polres Bekasi Kota. Sedangkan di Jakarta, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya (Polda Metro Jaya) menggelar Apel Siaga Anti Premanisme dalam rangka untuk pemberantasan aksi premanisme yang banyak terjadi di masyarakat.

"Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif serta menciptakan iklim in-



vestasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Lapangan Monas, Jumat, 9 Mei 2025.

Kapolda Karyoto menjelaskan operasi ini dirancang berlangsung selama 15 hari mulai dari 9 Mei hingga 23 Mei 2025. “Operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, juga didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat,” ungkapnya.

Selain itu, Karyoto menyebutkan operasi ini akan diperkuat melalui langkah-langkah preemtif dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan. “Terutama terkait dengan aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat,” katanya.

Irjen Karyoto juga menginstruksikan kepada jajaran humas untuk selalu proaktif memantau dan menindaklanjuti berita hoaks di media sosial. “Dengan cara klarifikasi resmi dan valid secara cepat, akurat dan berbasis data guna mencegah disinformasi, serta publikasikan kegiatan positif dan aktivitas pendekatan hukum termasuk operasi penangkapan pelaku premanisme selama operasi ini berlangsung,” ujarnya.

Ia mengemukakan pula, dalam ope-

rasi anti premanisme tersebut telah dikerahkan sebanyak 999 personel gabungan. “Dari Polri ada 663 personel, TNI 306 personel dan 30 personel dari Pemda DKI Jakarta, namun pada prakteknya kita semua aparat siap turun, untuk menangani bila ada hal-hal yang berkaitan dengan premanisme,” katanya.

Kapolda Metro berharap sinergi dan kolaborasi antara Polri, TNI dan Pemda DKI Jakarta dapat lebih dioptimalkan untuk memberantas seluruh jaringan premanisme di wilayah Polda Metro Jaya. Dalam kaitan ini, Kapolda menegaskan bahwa individu-individu se-

cara perorangan yang berhimpun di organisasi masyarakat (Ormas) harus menjalankan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

“Kalau kita baca UU Ormas Tahun 2017, sudah sangat mengatur asasnya, pendiriannya dan tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, UUD, dan UU yang berlaku apalagi sebenarnya harus menjunjung tinggi



norma etika yang ada di dalam kehidupan masyarakat, norma agama, norma adat dan lain-lain,” kata Kapolda Ijen Karyoto.

Ia menyebutkan hal itu setelah seorang tokoh yang menurut masyarakat mengganggu kenyamanan baik yang diucapkan sebatas lisan dan perbuatan-perbuatan yang kontroversi oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam ormas. “Perlu saya sampaikan bahwa UU ormas sendiri sangat jelas mengatur tentang bagaimana pendirian ormas, asas tujuan dan cara beroperasinya sebuah ormas,” katanya.

Menurut dia, perorangan yang tergabung dalam ormas menjalankan UU sebagaimana mestinya. “Kalau betul-betul para individu yang tergabung dalam ormas itu menjalankan UU, maka sangatlah damai,” katanya.

hukum secara nyata, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar Undang-Undang,” ungkapnya.

Sedangkan bagi warga masyarakat korban premanisme berkedok Ormas, Kapolda mempersilakannya segera melapor ke petugas terdekat. “Bagi siapapun masyarakat, individu dan pelaku usaha yang mendapat gangguan-gangguan dari orang-orang, baik pribadi maupun ormas seperti pungli, pemaksaan, intimidasi, pemerasan dan lain-lain tolong laporkan kepada polisi yang terdekat,” kata Ijen Karyoto saat ditemui di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat.

Karyoto juga meminta kepada kepolisian sektor dan resort jajaran untuk segera menindak laporan tinda-

Polda Metro Jaya dan Pemerintah Daerah, untuk bersama-sama turun ke lapangan dan jajaran untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” katanya.

Dia juga telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberantas premanisme. Prioritas utamanya, kata Pangdam Jaya, di daerah industri dan pertokoan yang membuat masyarakat atau menghambat jalannya perputaran ekonomi daerah.

Sedangkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan operasi ini menyangar berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik premanisme seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, kawasan parkir liar, dan wilayah pemukiman yang sering dikeluhkan



Dia juga menyebutkan ormas itu sebuah kekuatan yang bersifat swadaya dan sukarela untuk membantu partisipasi masyarakat. “Namun pada kenyataannya banyak individu yang mencari pekerjaan melalui ormas,” kata Karyoto.

Karyoto juga berharap kegiatan Apel Siaga Anti Premanisme ini dapat mengurangi aksi individu yang mencari keonaran dengan atribut ormas. “Kami siap menindak secara hukum bilamana memang sudah ada pelanggaran

kan premanisme tersebut.” Artinya, tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, khususnya terhadap peraturan pidana seperti mengancam, mengintimidasi dan melakukan pemerasan,” katanya.

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay menjelaskan bersama-sama Polda Metro Jaya akan melaksanakan pemberantasan terhadap preman-preman, tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kami berkomitmen bersama dengan

masyarakat.

Kombes Ade menjelaskan penanggulangan premanisme ini dimulai dengan langkah preemtif dengan cara memberikan penyuluhan, pendekatan dialogis, dan membangun kesadaran hukum pada masyarakat. Kemudian, dilanjutkan dengan langkah preventif seperti patroli rutin dan penjagaan di titik-titik rawan. “Jika masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penegakan hukum secara tegas,” tandasnya. ● Editor: GE

nfo indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

MEGAWATI: PDIP BABAK BELUR!

